



**TAHUN  
2025**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

***Hasil Pendataan  
Profil Kecamatan Kawasan  
Perbatasan Kabupaten  
Nunukan***

***Badan Pengelolah Perbatasan Daerah  
Kabupaten Nunukan***



# Hasil Pendataan Profil Kecamatan

## Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2025

**Ukuran Buku:** 18,2 cm x 25,7 cm

**Jumlah Halaman:** xxii + 333 halaman

**Naskah:**

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

**Penyunting:**

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

**Desain Kover:**

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

**Penerbit:**

©Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

**Dicetak oleh:**

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunuka**



## **TIM PENYUSUN**

### **Hasil Pendataan Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2025**

Penanggung Jawab:  
Robby N Serang, S.H

Penyunting:  
Hermiyati Zainuddin, S.Sos.,  
M.AP

Penulis:  
Ardiyanto, S.AB

Pengolahan Data:  
Ahmad Eka Pratama,  
S.IP Iin Juniarti, S.IP  
Salahuddin, S.H  
Sri Hardiyanti

Desain:  
Ryan Ferdyan Hasmi



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya sehingga Publikasi Hasil Pendataan Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2025 telah selesai dengan baik.

Publikasi ini menyajikan gambaran umum yang menjadi informasi kondisi kecamatan perbatasan dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Nunukan. Publikasi ini penting untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait kondisi dan ketersediaan sarana prasarana yang ada di kecamatan perbatasan yang selanjutnya diharapkan pembangunan perbatasan akan semakin ditingkatkan sehingga menjadi beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan bersaing dengan negara Malaysia. Teknis penyusunan buku ini dilakukan dengan mengunjungi kecamatan perbatasan sebagai lokus dan mendapatkan data sekunder sebagai data tambahan.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan semua pihak lainnya yang telah berkolaborasi untuk menghasilkan publikasi ini.

Menyadari mungkin masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini, untuk ini sangat diharapkan saran dan masukan bagi perbaikan publikasi ini.

Nunukan, Februari 2026

Kepala BPPD  
Kabupaten Nunukan



ROBBY NAHAK SERANG. S.H

NIP.



NIP.



## **DAFTAR ISI**

### **Hasil Pendataan Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2025**

<b>TIM PENYUSUN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Dasar Hukum.....	10
1.4. Maksud dan Tujuan .....	11
1.5. Pembiayaan .....	12
1.6. Capaian Output dan Outcome.....	12
<b>BAB II METODOLOGI.....</b>	<b>13</b>
2.1. Variabel dan Indikator .....	14
2.2. Syarat Petugas Pendataan, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	15
2.3. Responden .....	18
2.4. Waktu Pelaksanaan.....	19
2.5. Manajemen Risiko .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Kabupaten Nunukan .....	24
3.2. Kecamatan Krayan Selatan .....	39]
3.3. Kecamatan Krayan Tengah .....	56



3.4. Kecamatan Krayan .....	74
3.5. Kecamatan Krayan Timur.....	90
3.6. Kecamatan Krayan Barat.....	105
3.7. Kecamatan Lumbis Ogong .....	121
3.8. Kecamatan Lumbis Pansiangan .....	138
3.9. Kecamatan Lumbis Hulu .....	154
3.10. Kecamatan Tulin Onsoi .....	171
3.11. Kecamatan Sei Menggaris.....	187
3.12. Kecamatan Nunukan.....	203
3.13. Kecamatan Nunukan Selatan.....	209
3.14. Kecamatan Sebatik Barat .....	225
3.15. Kecamatan Sebatik.....	239
3.16. Kecamatan Sebatik Timur .....	252
3.17. Kecamatan Sebatik Tengah.....	274
3.18. Kecamatan Sebatik Utara.....	296
AB IV RANGKUMAN .....	319
DAFTAR PUSTAKA.....	320
LAMPIRAN.....	327



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Analisis SWOT .....	9
Tabel 2.4.1 Tahapan Pelaksanaan .....	19
Tabel 2.5.1 Manajemen Risiko.....	20
Tabel 3.2.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Selatan, 2024.....	40
Tabel 3.2.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Selatan, 2025 .....	41
Tabel 3.2.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	42
Tabel 3.2.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	43
Tabel 3.2.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	44
Tabel 3.2.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	45
Tabel 3.2.7 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	46
Tabel 3.2.8 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	47
Tabel 3.2.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	49
Tabel 3.2.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	50
Tabel 3.2.11 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	51
Tabel 3.2.12 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Selatan, 2025.....	53
Tabel 3.3.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Tengah, 2024.....	57
Tabel 3.3.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Tengah, 2025 .....	59
Tabel 3.3.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	60
Tabel 3.3.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	60
Tabel 3.3.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	61



Tabel 3.3.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	63
Tabel 3.3.7 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	64
Tabel 3.3.8 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	65
Tabel 3.3.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	67
Tabel 3.3.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	68
Tabel 3.3.11 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	69
Tabel 3.3.12 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Tengah, 2025.....	71
Tabel 3.4.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan, 2024....	74
Tabel 3.4.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan, 2025.....	76
Tabel 3.4.3 Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan, 2025.....	77
Tabel 3.4.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan, 2025.....	77
Tabel 3.4.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan, 2025.....	78
Tabel 3.4.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan, 2025.....	80
Tabel 3.4.7 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan, 2025.....	81
Tabel 3.4.8 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan, 2025 .....	82
Tabel 3.4.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan, 2025.....	83
Tabel 3.4.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan, 2025.....	85
Tabel 3.4.11 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan, 2025.....	86
Tabel 3.4.12 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan, 2025.....	87
Tabel 3.5.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Timur, 2024.....	90
Tabel 3.5.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Timur, 2025..	92
Tabel 3.5.3 Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	93



Tabel 3.5.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	93
Tabel 3.5.5 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	95
Tabel 3.5.6 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	96
Tabel 3.5.7 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Timur, 2025 .....	97
Tabel 3.5.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	98
Tabel 3.5.9 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	100
Tabel 3.5.10 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	101
Tabel 3.5.11 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Timur, 2025.....	102
Tabel 3.6.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Barat, 2024.....	105
Tabel 3.6.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Barat, 2025	107
Tabel 3.6.3 Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	108
Tabel 3.6.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	109
Tabel 3.6.5 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	110
Tabel 3.6.6 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	111
Tabel 3.6.7 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	112
Tabel 3.6.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	114
Tabel 3.6.9 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	116
Tabel 3.6.10 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	117
Tabel 3.6.11 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Barat, 2025 .....	118
Tabel 3.7.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2024 .....	121



Tabel 3.7.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025 .....	124
Tabel 3.7. 3 Kondisi BBM di Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025 .	125
Tabel 3.7.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama .....	125
Tabel 3.7.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain .....	127
Tabel 3.7.6 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025.....	129
Tabel 3.7.7 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan.....	130
Tabel 3.7.8 Jumlah Siswa dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah .....	132
Tabel 3.7.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan.....	132
Tabel 3.7.10 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan.....	133
Tabel 3.7.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan .....	134
Tabel 3.7.12 Potensi Komoditas Unggulan Menurut Sektor Ekonomi ..	135
Tabel 3.8.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Lumbis Pansiangan Tahun 2024 .....	139
Tabel 3.8.2 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lumbis Pansiangan, 2023/2024 dan 2024/2025 .....	147
Tabel 3.8.3 Jumlah Siswa dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Semester 1 2025/2026.....	148
Tabel 3.9.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2024 .....	155
Tabel 3.9.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2025.....	157
Tabel 3.9.3 Kondisi BBM di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025.....	158
Tabel 3.9.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025 .....	158
Tabel 3.9.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025 ..	159
Tabel 3.9.6 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025.....	161
Tabel 3.9.7 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu, 2023/2024 dan 2024/2025.....	162
Tabel 3.9.8 . Jumlah Siswa dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kecamatan Lumbis Hulu, Semester 1 2025/2026.....	164



Tabel 3.9.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2025 .....	164
Tabel 3.9.10 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025 .....	166
Tabel 3.9.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2025 .....	167
Tabel 3.10.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Tulin Onsoi, 2024 .....	172
Tabel 3.10.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025 .	174
Tabel 3.10.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025 .....	175
Tabel 3.10.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025 .....	176
Tabel 3.10.5 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025 .....	177
Tabel 3.10.6 Keberadaan Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025.....	178
Tabel 3.10.7 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025.....	180
Tabel 3.10.8 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025 .....	182
Tabel 3.10.9 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025.....	183
Tabel 3.10.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025 .....	184
Tabel 3.11.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sei Menggaris, 2024.....	188
Tabel 3.11.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	189
Tabel 3.11.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	189
Tabel 3.11.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	190
Tabel 3.11.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	191
Tabel 3.11.6 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	191
Tabel 3.11.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	193



Tabel 3.11.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sei Menggaris, Tahun 2025.....	194
Tabel 3.11.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	196
Tabel 3.11.10 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	197
Tabel 3.11.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025.....	198
Tabel 3.11.12 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	200
Tabel 3.11.13 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sei Menggaris, 2025 .....	201
Tabel 3.12.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan berdasarkan Pendidikan Terakhir yang ditamatkan .....	203
Tabel 3.12.2 Jumlah Sarana Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan	204
Tabel 3.12.3 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	205
Tabel 3.12.4 Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro/kecil yang didirikan/difasilitasi di Kecamatan Nunukan .....	206
Tabel 3.12.5 Volume Total Perikanan Budidaya sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan.....	207
Tabel 3.12.6 Volume Total Perikanan Tangkapan sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan.....	208
Tabel 3.13.1 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Nunukan Selatan, 2024.....	210
Tabel 3.13.2 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Nunukan Selatan, 2024.....	211
Tabel 3.13.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Nunukan Selatan, 2025.....	212
Tabel 3.13.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di	213
Tabel 3.13.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Nunukan Selatan, 2025.....	213
Tabel 3.13.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Nunukan , 2025.....	214
Tabel 3.13.7 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Nunukan Selatan, 2025.....	215
Tabel 3.13.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025.....	215



Tabel 3.13.9 Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan Selatan berdasarkan Pendidikan Terakhir yang ditamatkan.....	216
Tabel 3.13.10 Jumlah Sarana Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan diKecamatan Nunukan Selatan .....	217
Tabel 3.13.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Nunukan Selatan .....	218
Tabel 3.13.12 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nunukan Selatan.....	219
Tabel 3.13.13 Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro/kecil yang didirikan/difasilitasi di Kecamatan Nunukan Selatan.....	220
Tabel 3.13.14 Volume Total Perikanan Budidaya sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan Selatan.....	220
Tabel 3.13.15 Volume Total Perikanan Tangkapan sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan Selatan.....	221
Tabel 3.13.16 Potensi Komoditas Unggulan Menurut Sektor Ekonomi di Kecamatan Nunukan Selatan, Tahun 2025.....	221
Tabel 3.14.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sebatik Barat, 2024.....	225
Tabel 3.14.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Sebatik Barat, 2025 .....	226
Tabel 3.14.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	227
Tabel 3.14.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	228
Tabel 3.14.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	228
Tabel 3.14.6 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	229
Tabel 3.14.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	230
Tabel 3.14.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik Barat, Tahun 2025.....	231
Tabel 3.14.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	232
Tabel 3.14.10 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	234
Tabel 3.14.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	235



Tabel 3.14.12 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	236
Tabel 3.14.13 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Barat, 2025.....	237
Tabel 3.15.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sebatik, 2024	239
Tabel 3.15.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	240
Tabel 3.15.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain diKecamatan Sebatik, 2025 .....	241
Tabel 3.15.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	241
Tabel 3.15.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	242
Tabel 3.15.6 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	243
Tabel 3.15.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	244
Tabel 3.15.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik, Tahun 2025.....	245
Tabel 3.15.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	246
Tabel 3.15.10 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	247
Tabel 3.15.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2025	248
Tabel 3.15.12 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	249
Tabel 3.15.13 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik, 2025 .....	250
Tabel 3.16.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin .....	253
Tabel 3.16.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Sebatik Timur, 2025.....	254
Tabel 3.16.3 Ketersediaan Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	255
Tabel 3.16.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	257
Tabel 3.16.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	258
Tabel 3.16.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	261



Tabel 3.16.7 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025.....	264
Tabel 3.16.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	265
Tabel 3.16.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	267
Tabel 3.16.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025.....	268
Tabel 3.16.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	269
Tabel 3.16.12 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	271
Tabel 3.17.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2024 .....	275
Tabel 3.17.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025.....	276
Tabel 3.17.3 Ketersediaan Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	277
Tabel 3.17.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	279
Tabel 3.17.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	281
Tabel 3.17.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	284
Tabel 3.17.7 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik Tengah, Tahun 2025.....	286
Tabel 3.17. 8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	287
Tabel 3.17.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	289
Tabel 3.17.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025.....	290
Tabel 3.17.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	291
Tabel 3.17.12 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	293
Tabel 3.18.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2024.....	297
Tabel 3.18.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Sebatik Utara, 2025 .....	298



Tabel 3.18.3 Ketersediaan Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Utara, 2025.....	299
Tabel 3.18.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Sebatik Utara, 2025 .....	301
Tabel 3.18.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Utara, 2025.....	302
Tabel 3.18.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Utara, 2025 .....	306
Tabel 3.18.7 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik Utara, Tahun 2025.....	308
Tabel 3.18.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025.....	310
Tabel 3.18.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025 .....	311
Tabel 3.18.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025.....	313
Tabel 3.18.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025.....	314
Tabel 3.18.12 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Utara, 2025.....	315



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1. Diagram Fishbone Kurangnya Basis Data Terkait Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan yang Akurat dan Terkoneksi .....	4
Gambar 2.2.1. Dokumentasi Pengawasan Pendataan Pulau Sebatik ....	16
Gambar 2.2.2. Dokumentasi Pengawasan Pendataan Krayan.....	17
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan (Persen), 2020-2024.....	26
Gambar 3.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Nunukan (Persen) menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 .....	27
Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Nunukan (Persen) menurut Pengeluaran Tahun 2024.....	28
Gambar 3.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan, 2021-2025.....	30
Gambar 3.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan, 2020-2025.....	33
Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan, 2020-2025.....	35
Gambar 3.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Nunukan, 2024-2025 .....	37
Gambar 3.8 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang .....	128
Gambar 3.9 Persentase Desa/Keluarahan Berdasarkan Jenis Sarana Transportasi di Kecamatan Lumbis Pansiangan Tahun 2025.....	142
Gambar 3.10 Persentase Desa Berdasarkan Sumber Penggunaan Listrik di Kecamatan Lumbis Pansiangan Tahun 2025 .....	143
Gambar 3.11 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang di Kecamatan Sebatik Timur, 2025 .....	260
Gambar 3.12 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025 .....	282
Gambar 3.13 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang di Kecamatan Sebatik Utara, 2025.....	304



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2025.....	328
--	-----



Tahun  
2025

**PEMERINTAHAN KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENGELOLA  
PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

# BAB I PENDAHULUAN

***Badan Pengelolah Perbatasan Daerah  
Kabupaten Nunukan***



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah negara mengatur bahwa wewenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dikawasan perbatasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. berdasarkan hal tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur tentang kedudukan susunan, tugas, fungsi, serta sasaran kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menjelaskan bahwa salah satu tugas BPPD Kabupaten Nunukan adalah melakukan koordinasi, memfasilitasi serta merumuskan kebijakan dalam bentuk penyediaan data dan laporan sebagai bahan kebijakan teknis operasional, monitoring dan evaluasi pembangunan di kawasan perbatasan.

Kabupaten Nunukan sendiri terdiri atas 21 kecamatan, di mana 17 di antaranya telah ditetapkan sebagai PPKP (Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan) dan KPP (Kecamatan Prioritas Perbatasan). Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara. Penetapan ini



menunjukkan komitmen pemerintah dalam memfokuskan pembangunan dan pelayanan di wilayah-wilayah strategis ini.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **A. Analisis Fishbone**

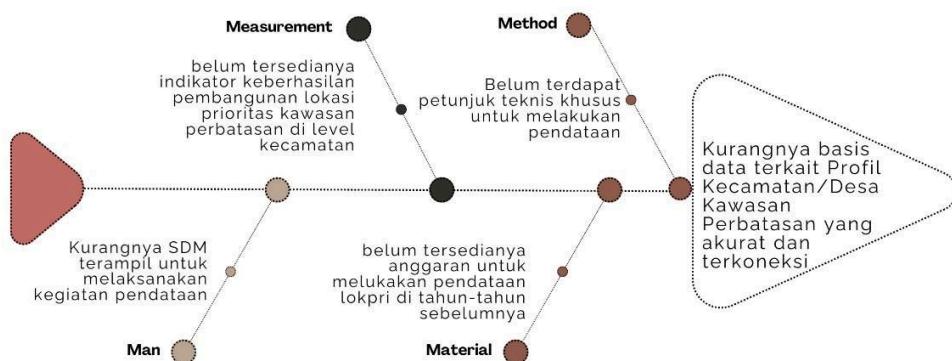
Masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah kurangnya basis data yang akurat dan terkoneksi terkait profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi penghambat signifikan dalam upaya perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah prioritas tersebut. Identifikasi akar masalah menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi pada kondisi ini:

1. Man (Sumber Daya Manusia): Kurangnya tenaga kerja terampil yang mampu melaksanakan kegiatan pendataan menjadi salah satu kendala utama. SDM yang tersedia sering kali belum memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan dan pengolahan data berbasis teknologi, yang diperlukan untuk mengembangkan basis data yang akurat dan terkoneksi.
2. Method (Metode Pendataan): Selama ini, belum tersedia petunjuk teknis khusus yang mengatur bagaimana proses pendataan profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan seharusnya dilakukan. Ketidakjelasan dalam metode dan prosedur ini mengakibatkan pendataan yang tidak konsisten dan hasil data yang bervariasi dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya.
3. Measurement (Pengukuran Keberhasilan): Belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan

pembangunan di lokasi prioritas kawasan perbatasan di tingkat kecamatan menambah tantangan dalam proses pendataan. Tanpa indikator yang terukur, penilaian terhadap perkembangan pembangunan dan efektivitas kebijakan menjadi kurang akurat dan sulit dilakukan.

4. Material (Sumber Daya Finansial): Pendanaan yang terbatas juga menjadi penghambat utama dalam upaya pendataan. Selama beberapa tahun terakhir, anggaran untuk melakukan pendataan di PPKP dan KPP belum tersedia, sehingga kegiatan pendataan tidak dapat dilaksanakan secara memadai dan terstruktur.

Menurut hasil pencarian akar masalah tersebut, ringkasan hasil identifikasi masalah kurangnya basis data terkait profil kecamatan/desa kawasan kerbatasan yang akurat dan terkoneksi dapat dijelaskan melalui diagram *fishbone* seperti berikut.



Gambar 1.2.1. Diagram Fishbone Kurangnya Basis Data Terkait Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan yang Akurat dan Terkoneksi

Berdasarkan hasil indentifikasi masalah ini menunjukkan bahwa kurangnya basis data akurat dan terkoneksi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari



gabungan berbagai kendala, mulai dari kurangnya SDM terampil, metode yang tidak jelas, hingga kekurangan anggaran.

## B. Analisis SWOT

Penyediaan data yang akurat dan lengkap mengenai profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan terukur. Namun, proses pengumpulan dan pengelolaan data ini menghadapi tantangan internal dan eksternal yang mempengaruhi kelancaran dan kualitas hasil yang diperoleh. Analisis SWOT berikut ini memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam upaya pengembangan basis data profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan.

### **Kekuatan (Strengths)**

Pengembangan basis data di kawasan perbatasan memiliki beberapa keunggulan internal yang dapat diandalkan. Salah satu kekuatan utama adalah adanya hubungan baik dengan pemerintah kecamatan dan instansi lain yang terlibat. Hubungan yang terjalin ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam pengumpulan data dan pengelolaan informasi, sehingga proses kerja dapat berjalan lebih lancar dan mendapatkan dukungan administratif serta operasional.

Kekuatan lainnya adalah ketersediaan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja terlatih,



peralatan, serta fasilitas yang mendukung kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Ketersediaan ini memastikan bahwa proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Selain itu, ada kesadaran yang tinggi di antara pemangku kepentingan mengenai pentingnya data yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang efektif. Kesadaran ini memberikan dorongan motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyusun kebijakan pembangunan.

### **Kelemahan (Weaknesses)**

Meskipun ada kekuatan yang mendukung, terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah belum adanya pendataan yang lengkap dan terstruktur terkait profil kecamatan di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi tantangan besar karena data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan tidak tersedia secara memadai, sehingga proses pembangunan bisa terhambat.

Keterbatasan akses internet dan teknologi di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu kelemahan signifikan. Keterbatasan ini menghambat proses pengumpulan data secara real-time dan memperlambat komunikasi serta transfer data antarinstansi. Hal ini menyebabkan efisiensi pengolahan dan pembaruan data menurun.

Kelemahan lain yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan data terkait perbatasan secara lengkap. Informasi



penting yang belum tersedia ini menghambat upaya untuk melakukan analisis menyeluruh dan perencanaan strategis di wilayah perbatasan.

### **Peluang (Opportunities)**

Di sisi peluang, terdapat kebijakan anggaran pemerintah yang mendukung pengembangan wilayah perbatasan. Kebijakan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan finansial yang cukup guna mengembangkan infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperbaiki sistem pengelolaan data. Peluang ini penting dalam mengatasi berbagai kelemahan yang ada.

Selain itu, ada potensi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders*/intansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), maupun Bappeda Litbang. Kerjasama ini bisa membantu dalam pengembangan metodologi pengumpulan data yang lebih baik dan mendukung proses validasi data agar lebih akurat dan relevan.

### **Ancaman (Threats)**

Meskipun ada peluang yang dapat dimanfaatkan, terdapat beberapa ancaman yang dapat menghambat upaya pengembangan basis data. Salah satu ancaman terbesar adalah kondisi geografis dan cuaca ekstrem di kawasan perbatasan. Medan yang sulit diakses dan iklim yang tidak menentu bisa mengganggu proses pengumpulan data, memperlambat perjalanan, serta meningkatkan biaya dan risiko operasional.



Ancaman lainnya adalah ketidakberlanjutan kegiatan pengumpulan data yang menyebabkan data menjadi usang dan terputus. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan jangka panjang dan pendanaan yang tidak konsisten. Ketidakberlanjutan ini membuat data yang diperoleh menjadi kurang relevan dan tidak dapat diandalkan untuk proses pengambilan keputusan.

Ringkasan dari analisis SWOT dari kegiatan pendataan pusat informasi data PPKP dan KPP kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2025 tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.



Tabel 1.2.1 Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki hubungan baik dengan pemerintah kecamatan dan instansi lain</li><li>• Ketersediaan sumber daya yang mencukupi</li><li>• Kesadaran akan pentingnya data untuk perencanaan pembangunan yang efektif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada pendataan terkait profil kecamatan perbatasan</li><li>• Terdapat keterbatasan dalam akses internet dan teknologi</li><li>• Data terkait perbatasan yang belum tersedia</li></ul>
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan anggaran yang mendukung pengembangan wilayah perbatasan</li><li>• Adanya kerjasama dengan <i>stakeholders</i> terkait</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa kawasan perbatasan</li><li>• Ketidakberlanjutan kegiatan sehingga data terputus</li></ul>

Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan basis data profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan memiliki sejumlah kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan pemerintah dan kerjasama dengan stakeholders. Namun, kelemahan seperti belum adanya data lengkap dan keterbatasan teknologi harus diatasi, dan ancaman berupa kondisi geografis serta ketidakberlanjutan kegiatan harus diantisipasi dengan strategi mitigasi yang tepat.



### **1.3. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, dan ruang udara Indonesia, termasuk penetapan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga.
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah.
- d. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2024).
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.
- h. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.
- i. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 4)



- j. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 677 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Job Desk Penyusunan Data Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun basis data terkait Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan yang akurat dan terkoneksi sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan untuk memajukan potensi Kecamatan/Desa kawasan perbatasan PPKP dan KPP.
- b. Penyusunan Data potensi kecamatan/desa kawasan perbatasan di 17 kecamatan yang masuk pada PPKP dan KPP meliputi peningkatan infrastruktur wilayah, sektor industri dari hasil produksi sektor primer, jejaring social budaya masyarakat di perbatasan, sektor kelautan perikanan, sector pelayanan social dasar serta sektor ekonomi kreatif.
- c. Mengangkat isu-isu perbatasan dalam yang akan diangkat dalam job desk di 17 Kecamatan PPKP dan KPP :
  1. Mengenai bentang fisik batas negara yang di beberapa wilayah belum selesai atau masih ada ketidaksepakatan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya akan mengganggu proses pembangunan di wilayah tersebut karena masih ada negosiasi batas wilayah.
  2. Kondisi tersebut di atas membuat terjadinya lintas batas menjadi lebih tidak terdeteksi. Akibatnya, kegiatan atau aktivitas ilegal seringkali terjadi di wilayah perbatasan. "Sebut saja mengenai penyelundupan barang, human trafficking,



hingga pencurian hasil alam laut dan darat seringkali terjadi di perbatasan.

3. Isu mengenai kebutuhan sosial dasar. Kebutuhan menyangkut layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya masih menjadi isu besar di wilayah perbatasan. Apalagi, bentang wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit seringkali membuat pemenuhan kebutuhan dasar seperti tersebut di atas menjadi kurang efektif.
4. soal infrastruktur yang menjadi kendala dalam mengakses perbatasan.

### **1.5. Pembiayaan**

Anggaran kegiatan Monitoring, Evaluasi Kewilyahan Program Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dibebankan pada APBD Kabupaten Nunukan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 sebesar Rp. 121.149.150,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

### **1.6. Capaian Output dan Outcome**

Output kegiatan pada 2025 ialah Dokumen Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan di 17 Kecamatan yang masuk dalam PPKP dan KPP. Outcome kegiatan ini ialah dari hasil Job Desk yang dilaksanakan yang akan menjadi bahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENGELOLA  
PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

*BAB II*  
*METODOLOGI*

*Badan Pengelolah Perbatasan Daerah  
Kabupaten Nunukan*



## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Variabel dan Indikator**

Pendataan ini dilakukan berdasarkan variabel dan indikator yang diambil untuk menjelaskan kondisi pada Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan di Kabupaten Nunukan.

##### **A. Variabel**

Variabel pada pendataan ini ditarik atau diambil berdasarkan Dimensi, yaitu:

1. Dimensi Tata Kelola;
2. Dimensi Sosial Ekonomi; dan
3. Dimensi Infrastruktur.

##### **B. Indikator**

Indikator pendataan ini diambil berdasarkan 3 Dimensi yang telah dirumuskan pada kuesioner pendataan sebagai berikut:

1. Keterangan Umum Kecamatan;
2. Transportasi dan Infrastruktur;
3. Pusat Perdagangan dan Jasa;
4. Pariwisata;
5. Pendidikan;
6. Kesehatan; dan
7. Industri Pengolahan.

Selain dari kuesioner yang telah dibuat dan menjadi instrument pendataan, data sekunder juga akan diminta dari beberapa K/L/D/I untuk membantu menjelas kondisi Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan.



## **2.2. Syarat Petugas Pendataan, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

### **1. Syarat Petugas Pendataan**

Dalam pendataan ini, berikut syarat-syarat petugas pendataan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan :

- a. Aparatur Sipil Negara Dinas Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan
- b. Sehat jasmani maupun rohani
- c. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik serta membaca dan menulis huruf latin
- d. Mampu berkomunikasi dengan baik
- e. Mampu bekerja sama dalam tim

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Mengirimkan kuesioner kepada 17 Kecamatan yang masuk dalam PPKP dan KPP, yaitu:
  1. Krayan Selatan
  2. Krayan Tengah
  3. Krayan
  4. Krayan Timur
  5. Krayan Barat
  6. Lumbis Ogong
  7. Lumbis Hulu
  8. Lumbis Pansiangan
  9. Tulin Onsoi
  10. Sei Menggaris
  11. Nunukan
  12. Nunukan Selatan
  13. Sebatik Barat



14. Sebatik
  15. Sebatik Timur
  16. Sebatik Tengah
  17. Sebatik Utara
- b. Melakukan Pengawasan Pendataan di Beberapa Tempat
1. Melakukan Pengawasan Pendataan di Pulau Sebatik



Gambar 2.2.1. Dokumentasi Pengawasan Pendataan Pulau Sebatik



## 2. Melakukan Pengawasan Pendataan di Krayan



Gambar 2.2.2. Dokumentasi Pengawasan Pendataan Krayan

- c. Pengumpulan dan konfirmasi Data Sekunder.
- ### 3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
- a. Memasukkan hasil penilaian kuesioner dalam tabulasi data menggunakan *Google Spreadsheet*.
  - b. Melakukan analisa data penilaian kuesioner dengan melihat data-data sekunder.



### **2.3. Responden**

Pejabat yang menjadi responden dalam pendataan Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2025 di 17 Kecamatan adalah :

1. Camat Krayan Selatan
2. Camat Krayan Tengah
3. Camat Krayan
4. Camat Krayan Timur
5. Camat Krayan Barat
6. Camat Lumbis Ogong
7. Camat Lumbis Hulu
8. Camat Lumbis Pansiangan
9. Camat Tulin Onsoi
10. Camat Sei Menggaris
11. Camat Nunukan
12. Camat Nunukan Selatan
13. Camat Sebatik Barat
14. Camat Sebatik
15. Camat Sebatik Timur
16. Camat Sebatik Tengah
17. Camat Sebatik Utara



## 2.4. Waktu Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud berlaku satu tahun Anggaran, dengan tahapan:

Tabel 2.4.1 Tahapan Pelaksanaan

Nama Kegiatan	Tanggal
Pengiriman Kuesioner	1- 3 November 2025
Pengisian Mandiri oleh Kecamatan	1-30 November 2025
Pendampingan di Kecamatan	1-30 November 2025
1. Lokus Sebatik (5)	3 - 5 November 2025
2. Lokus Krayan (5)	10-12 November 2025
Finalisasi Data	22-30 November 2025
Pengolahan Data	1-31 Desember 2025
Pembuatan Publikasi Cetak	1 Januari – 28 Februari 2026
Evaluasi	Maret 2026

## 2.5. Manajemen Risiko

Pengelolaan basis data yang akurat dan terkoneksi sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif di kawasan perbatasan. Meskipun memiliki berbagai kekuatan dan peluang, upaya ini menghadapi risiko-risiko tertentu yang perlu dikelola dengan baik. Identifikasi risiko berikut melibatkan pemahaman mendalam tentang penyebab utama dari setiap risiko untuk membantu merumuskan strategi mitigasi yang efektif.



Tabel 2.5.1 Manajemen Risiko

No	Risiko yang Mungkin Muncul	Penyebab	Penanganan/Mitigasi Risiko
1	Kurangnya koordinasi antar instansi	Fragmentasi kebijakan dan perbedaan prioritas antarinstansi terkait. Kurangnya platform bersama atau mekanisme komunikasi yang efektif juga menyebabkan kesulitan dalam berbagi data dan berkoordinasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun platform koordinasi dan kolaborasi yang memungkinkan berbagai instansi berbagi data secara efisien.</li><li>2. Mengadakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan prioritas dan kebijakan.</li></ol>
2	Kualitas data yang kurang konsisten	Proses pengumpulan data yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lain.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan pelatihan berkala kepada petugas lapangan mengenai standar dan protokol pengumpulan data.</li><li>2. Menetapkan metadata untuk memastikan konsistensi.</li></ol>
3	Kondisi geografis dan cuaca ekstrem	Topografi yang sulit diakses, seperti pegunungan, hutan lebat, atau area perairan yang luas. Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, atau badai juga sering kali terjadi di beberapa wilayah perbatasan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun jadwal pengumpulan data yang disesuaikan dengan musim dan kondisi cuaca lokal.</li></ol>
4	Ketidakberlanjutan kegiatan pengumpulan data	Keterbatasan pendanaan jangka panjang dan kurangnya perencanaan yang berkelanjutan. Program pengumpulan data sering kali bergantung pada proyek sementara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merancang program pengumpulan data yang memiliki dukungan anggaran rutin dan kemitraan atau kerjasama baik dengan instansi pemerintahan maupun organisasi non-pemerintah.</li></ol>

Pengelolaan basis data yang akurat dan terkoneksi di kawasan perbatasan memang penuh tantangan, namun dengan



pemahaman yang mendalam mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi, langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat diambil untuk mengurangi dampaknya. Pengelolaan risiko yang efektif, mulai dari membangun *platform* koordinasi dan kolaborasi yang memungkinkan berbagai instansi berbagi data secara efisien hingga Menetapkan metadata untuk memastikan konsistensi., akan mendukung keberlanjutan proses pengumpulan dan pemanfaatan data yang akurat.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENGELOLA  
PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

# *BAB III PEMBAH ASAN*

***Badan Pengelola Perbatasan Daerah  
Kabupaten Nunukan***



## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1. Kabupaten Nunukan**

Kondisi pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan menunjukkan arah pemulihan dan perbaikan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 berhasil kembali tumbuh positif sejak 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022, meskipun pada periode berikutnya laju pertumbuhan mulai melambat ke arah yang lebih moderat. Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian serta didorong oleh aktivitas ekspor, yang menandakan tingginya ketergantungan terhadap sektor primer dan pasar eksternal. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor industri pengolahan, jasa, dan konsumsi domestik agar pertumbuhan lebih seimbang dan berkelanjutan.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun dan stabil, menunjukkan adanya perbaikan pasar kerja, meskipun jumlah pengangguran masih berfluktuasi yang mengindikasikan tantangan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Kondisi kemiskinan memperlihatkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin, namun masih rentan terhadap dinamika ekonomi, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses dan ketergantungan pada sektor tertentu. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat secara konsisten yang mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia, walaupun peningkatannya masih moderat sehingga diperlukan percepatan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Di sisi stabilitas ekonomi, inflasi Kabupaten Nunukan selama 2024–2025 relatif terkendali meskipun bersifat fluktuatif akibat faktor musiman, pasokan, dan distribusi barang. Karakter wilayah



perbatasan menyebabkan inflasi sangat dipengaruhi oleh kelancaran rantai pasok dan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Secara keseluruhan, arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu difokuskan pada diversifikasi ekonomi, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan sistem logistik dan layanan publik agar pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan menjadi lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

## **PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR PDRB**

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui indikator pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan perubahan kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. Indikator ini umumnya dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil tanpa pengaruh perubahan harga. Dalam perspektif teori ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan yang dicapai, maka semakin besar pula peluang kemajuan dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

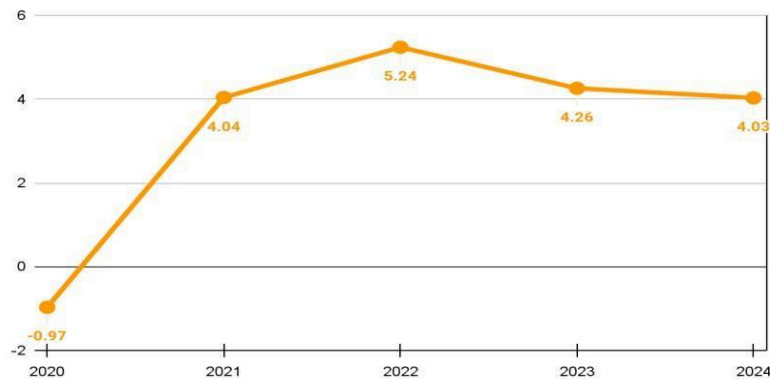
Ekonomi Kabupaten Nunukan mulai menunjukkan pemulihan dan tumbuh positif kembali setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2021, perekonomian tumbuh sebesar 4,04 persen, kemudian meningkat menjadi 5,24 persen pada 2022, yang menjadi capaian pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perbaikan kondisi ekonomi ini terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, membaiknya mobilitas, serta kembali menguatnya sektor-sektor utama seperti pertambangan, perdagangan, dan konstruksi. Memasuki tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi masih berada pada zona positif masing-masing sebesar 4,26 persen dan 4,03 persen, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi



tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Nunukan tetap tumbuh stabil dengan dukungan aktivitas produksi dan perdagangan, meskipun laju pertumbuhannya mulai menyesuaikan menuju kondisi yang lebih moderat.

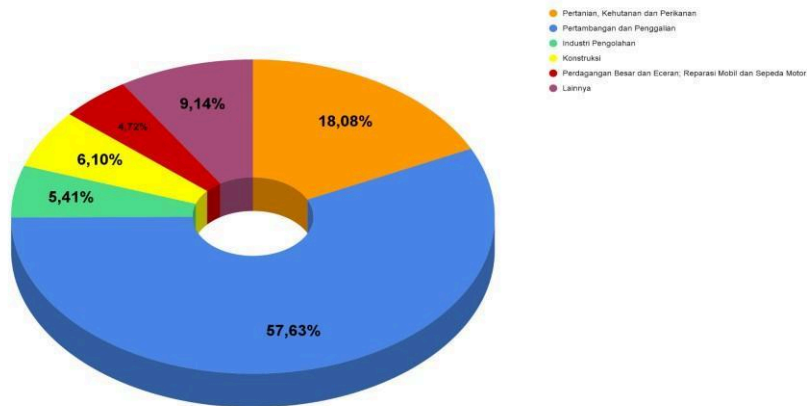
Sementara struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peran masing-masing lapangan usaha dalam membentuk nilai tambah yang dihasilkan di wilayah tersebut. Seiring dengan dinamika dan perkembangan ekonomi, komposisi antar lapangan usaha dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk memahami perubahan tersebut, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan melihat kontribusi tiap lapangan usaha terhadap total perekonomian yang tercermin melalui data PDRB atas dasar harga berlaku.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

Gambar 3.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Nunukan (Persen)  
menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

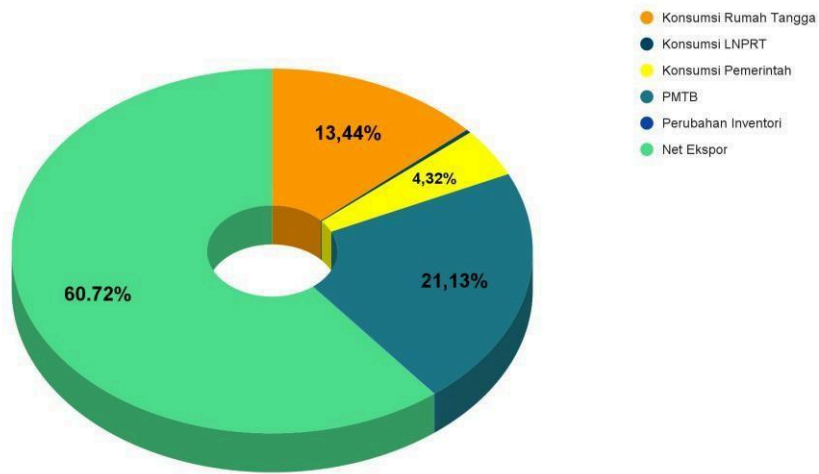


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

Struktur perekonomian Kabupaten Nunukan tahun 2024 menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi terbesar sebesar 57,63 persen, menandakan tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor berbasis sumber daya alam. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 18,08 persen, yang menunjukkan peran penting sektor primer sebagai penopang ekonomi daerah. Sementara itu, sektor konstruksi (6,10 persen), industri pengolahan (5,41 persen), dan perdagangan besar dan eceran (4,72 persen) memberikan kontribusi yang lebih kecil namun tetap penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Adapun kategori lainnya sebesar 9,14 persen mencerminkan peran sektor jasa dan kegiatan ekonomi lainnya. Secara umum, struktur ini menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Nunukan masih terkonsentrasi pada sektor primer, meskipun sektor sekunder dan tersier mulai memberikan kontribusi sebagai penyeimbang.



Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Nunukan (Persen)  
menurut Pengeluaran Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

Selain itu, struktur perekonomian Kabupaten Nunukan menurut pengeluaran tahun 2024 menunjukkan bahwa komponen net ekspor menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan kontribusi sekitar 60,72 persen, yang menandakan bahwa perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan luar daerah atau ekspor. Komponen terbesar berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar

21,13 persen, mencerminkan peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 13,44 persen, menunjukkan peran konsumsi masyarakat sebagai penopang permintaan domestik. Adapun konsumsi pemerintah sebesar 4,32 persen, sedangkan komponen lainnya seperti konsumsi lembaga non-profit dan perubahan inventori memiliki porsi relatif kecil. Secara umum, struktur ini menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 lebih didorong oleh sektor eksternal dan investasi dibandingkan konsumsi domestik.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan menunjukkan pemulihan yang positif pasca kontraksi tahun 2020



meskipun laju pertumbuhan mulai melambat pada periode terakhir, sementara struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian serta sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekspor, yang menandakan tingginya ketergantungan terhadap sektor eksternal dan komoditas berbasis sumber daya alam. Di sisi lain, kontribusi sektor industri pengolahan, jasa, dan konsumsi domestik masih relatif terbatas, sehingga diperlukan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang berfokus pada diversifikasi ekonomi, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan investasi produktif, pengembangan pusat perdagangan dan logistik perbatasan, serta peningkatan peran sektor domestik agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan menjadi lebih seimbang, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat perbatasan.

## **KETENAGAKERJAAN**

Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, karena berperan dalam mengolah input menjadi output yang bernilai tambah. Kualitas SDM menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah, termasuk dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang seperti Indonesia Emas 2045. Dalam konteks Kabupaten Nunukan, peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang strategis mengingat struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam yang memerlukan tenaga kerja terampil agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

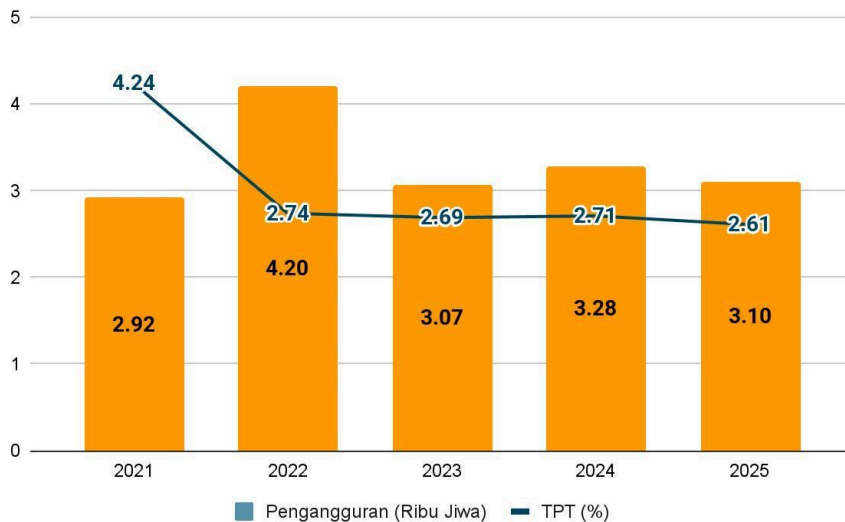
Kabupaten Nunukan juga berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Kondisi ini menjadi peluang bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Namun demikian, seiring waktu, perubahan struktur penduduk menuju peningkatan usia lanjut perlu diantisipasi sejak dini melalui penguatan kualitas pendidikan,



pelatihan keterampilan, serta kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.

Optimalisasi bonus demografi di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu berperan lebih besar dalam sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, perdagangan, dan jasa. Di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan tetap perlu diperhatikan, terutama terkait kesesuaian antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak dikelola dengan baik, kesenjangan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang memengaruhi stabilitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan kualitas SDM dan penciptaan kesempatan kerja menjadi kunci penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan yang berkelanjutan.

Gambar 3.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan, 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

Gambar perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Nunukan tahun 2021–2025 diatas menunjukkan bahwa



kondisi ketenagakerjaan secara umum mengalami perbaikan dan cenderung stabil. Tingkat pengangguran terbuka menurun cukup signifikan dari 4,24 persen pada 2021 menjadi 2,74 persen pada 2022, kemudian relatif stabil pada kisaran 2,6–2,7 persen hingga tahun 2025. Dari sisi jumlah pengangguran, terjadi peningkatan dari 2,92 ribu jiwa pada 2021 menjadi 4,20 ribu jiwa pada 2022, namun selanjutnya menurun menjadi 3,07 ribu jiwa pada 2023, sempat naik sedikit pada 2024 menjadi 3,28 ribu jiwa, dan kembali turun menjadi 3,10 ribu jiwa pada 2025. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengangguran mengalami fluktuasi, proporsi pengangguran terhadap total angkatan kerja cenderung membaik, yang mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja serta stabilisasi kondisi ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka relatif rendah dan cenderung stabil, namun jumlah pengangguran masih berfluktuasi sehingga mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang belum sepenuhnya kuat dan adanya kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama karena struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor primer yang rentan terhadap dinamika komoditas. Sebagai wilayah perbatasan, Nunukan juga menghadapi tantangan mobilitas tenaga kerja dan perlunya peningkatan daya saing SDM lokal agar mampu berperan lebih besar dalam aktivitas ekonomi formal dan produktif. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan sertifikasi tenaga kerja, penguatan pelatihan vokasi berbasis potensi unggulan daerah, penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan agroindustri, UMKM dan sektor jasa, penguatan keterhubungan antara dunia usaha dan pendidikan, serta mendorong investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal agar pembangunan ekonomi perbatasan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



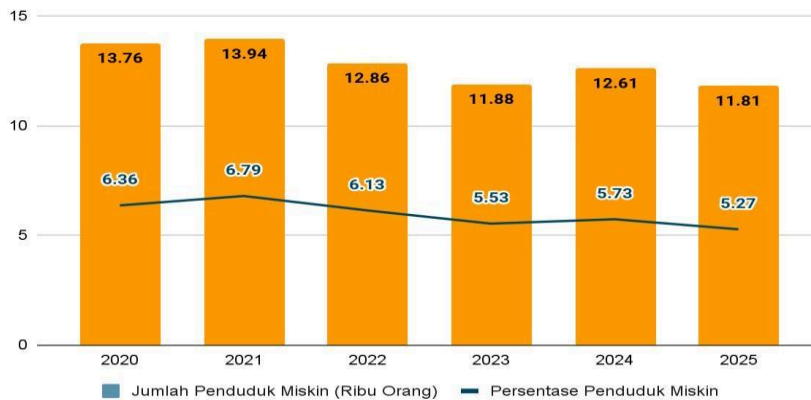
## KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang bersifat kompleks karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kehidupan yang layak dan bermartabat merupakan hak dasar setiap individu, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama pembangunan, termasuk dalam tujuan global Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Dalam pelaksanaannya, ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan berkualitas menjadi hal yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, evaluasi program, perbandingan kondisi antarwilayah dan antarwaktu, serta penentuan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan secara tepat.

Secara teoritis, kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural berkaitan dengan faktor nilai, kebiasaan, atau budaya yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang atau kelompok untuk keluar dari kondisi miskin. Sementara itu, kemiskinan struktural terjadi akibat keterbatasan akses dan posisi yang lemah dalam sistem sosial dan ekonomi, sehingga individu atau kelompok tertentu sulit memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu, secara konsep kemiskinan juga dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan standar hidup yang berlaku di masyarakat setempat dan bersifat kontekstual, sedangkan kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Standar minimum tersebut dikenal sebagai garis kemiskinan, yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah.

Gambar 3.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nunukan, 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Nunukan tahun 2020–2025 menunjukkan tren penurunan secara bertahap meskipun sempat mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 13,76 ribu orang pada 2020 menjadi 13,94 ribu orang pada 2021, kemudian menurun menjadi 12,86 ribu orang pada 2022 dan kembali turun hingga 11,88 ribu orang pada 2023. Pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi 12,61 ribu orang, sebelum kembali menurun menjadi 11,81 ribu orang pada 2025. Pola yang sama terlihat pada persentase penduduk miskin yang turun dari 6,36 persen (2020) menjadi 5,27 persen (2025), meskipun sempat meningkat pada 2021 dan 2024. Secara umum, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, namun fluktuasi yang terjadi mengindikasikan bahwa kelompok rentan masih mudah terdampak oleh dinamika ekonomi sehingga program pengurangan kemiskinan perlu terus diperkuat dan lebih tepat sasaran.

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan Kabupaten Nunukan periode 2020–2025 menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin meskipun masih terjadi fluktuasi pada beberapa tahun, yang



mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan sudah berjalan namun kelompok rentan masih mudah terdampak oleh perubahan kondisi ekonomi, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses layanan dan ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Dari perspektif kebijakan pembangunan perbatasan, kondisi ini memberikan insight bahwa pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi perlu diperkuat dengan strategi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja produktif, pengembangan UMKM dan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, peningkatan akses infrastruktur dasar dan layanan publik, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan berbasis data sasaran yang akurat. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah memperkuat integrasi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan, mendorong investasi yang berdampak langsung pada masyarakat lokal, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, serta memperkuat sistem monitoring kemiskinan berbasis data untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat perbatasan.

## **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**

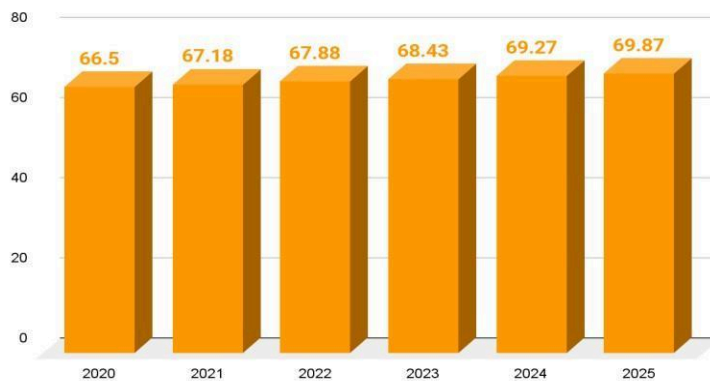
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan manusia sebagai pusat utama dalam proses pembangunan, karena kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan dan daya saing suatu wilayah. Pembangunan manusia tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan pembangunan daerah yang merata serta keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Oleh sebab itu, IPM digunakan sebagai salah satu indikator strategis untuk menilai keberhasilan pembangunan melalui gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup penduduk. Peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak diharapkan



mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera.

Secara konsep, IPM merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa dimensi utama pembangunan manusia. Penyusunan IPM di Indonesia mengacu pada kerangka yang ditetapkan oleh UNDP dengan penyesuaian tertentu sesuai ketersediaan indikator pada tingkat nasional maupun daerah. Dimensi kesehatan diukur melalui indikator umur harapan hidup saat lahir, sedangkan dimensi pendidikan menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun dimensi standar hidup layak direpresentasikan melalui indikator pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan, sehingga secara keseluruhan IPM mampu menggambarkan capaian pembangunan manusia secara komprehensif.

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan, 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan tahun 2020–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 66,50 pada 2020 menjadi 69,87 pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup masyarakat. Peningkatan IPM berlangsung secara bertahap setiap tahun, dengan kenaikan yang relatif stabil hingga mencapai 69,27



pada 2024, sebelum kembali meningkat pada 2025. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan berjalan positif dan berkelanjutan, meskipun laju peningkatannya cenderung moderat sehingga masih diperlukan upaya percepatan terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat agar capaian IPM dapat terus meningkat secara lebih optimal.

Dari gambar diatas, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan tahun 2020–2025 yang menunjukkan tren meningkat secara konsisten mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia di wilayah perbatasan, namun laju peningkatan yang masih moderat mengindikasikan bahwa tantangan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak masih perlu mendapat perhatian lebih serius. Dari perspektif kebijakan pembangunan perbatasan, kondisi ini memberikan insight bahwa peningkatan IPM harus diarahkan pada penguatan akses dan kualitas layanan dasar di wilayah terpencil dan perbatasan, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal, penguatan layanan kesehatan dasar dan pencegahan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan peluang ekonomi produktif. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah memperkuat integrasi pembangunan manusia dengan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan, memperluas infrastruktur layanan publik yang merata, mendorong kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kualitas SDM, serta memperkuat intervensi berbasis data agar peningkatan IPM dapat berlangsung lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

## **INFLASI**

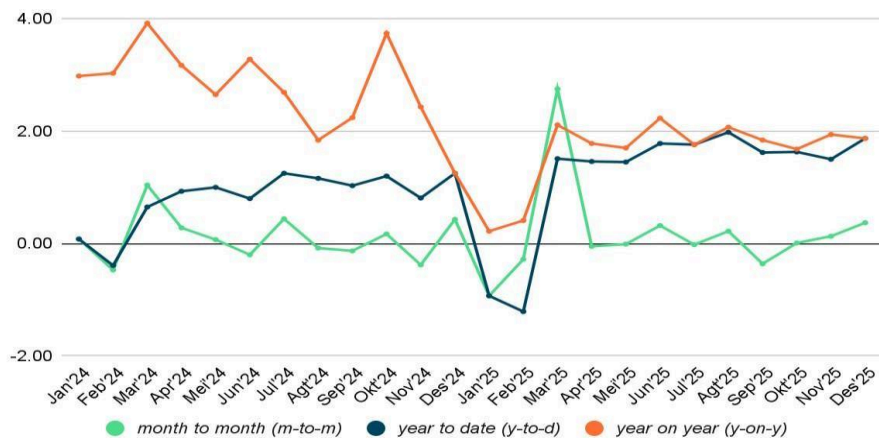
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang penting dalam menggambarkan perubahan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pergerakan inflasi mencerminkan dinamika keseimbangan antara



permintaan dan penawaran di pasar, sehingga dapat memengaruhi daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Tingkat inflasi yang terkendali menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat karena berkurangnya kemampuan daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

Dalam konteks pembangunan daerah, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor nasional, tetapi juga kondisi lokal seperti ketersediaan pasokan barang, kelancaran distribusi, perubahan harga komoditas strategis, serta faktor musiman. Oleh karena itu, pemantauan perkembangan inflasi menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Analisis inflasi juga dapat memberikan gambaran mengenai tekanan harga pada kelompok pengeluaran tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat.

Gambar 3.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Nunukan, 2024-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2026

Tingkat inflasi Kabupaten Nunukan tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa pergerakan inflasi bersifat fluktuatif namun



secara umum masih berada pada tingkat yang terkendali. Inflasi *year on year (y-on-y)* terlihat relatif tinggi pada awal tahun 2024 dengan kisaran di atas 2 persen bahkan mendekati 4 persen pada beberapa bulan, kemudian cenderung menurun hingga akhir tahun dan kembali stabil pada kisaran sekitar 1,5–2 persen sepanjang tahun

2025. Sementara itu, inflasi *month to month (m-to-m)* menunjukkan perubahan harga bulanan yang cukup bergejolak, dengan beberapa periode mengalami deflasi terutama di awal tahun 2025, namun sempat terjadi lonjakan inflasi bulanan pada Maret 2025 sebelum kembali stabil. Adapun inflasi *year to date (y-to-d)* sempat turun hingga bernilai negatif pada awal 2025, lalu kembali meningkat dan bergerak stabil di kisaran positif hingga akhir tahun. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa tekanan harga di Kabupaten Nunukan masih dapat dikendalikan, meskipun terdapat pengaruh faktor musiman dan dinamika pasokan yang menyebabkan fluktuasi inflasi pada periode tertentu.

Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Nunukan tahun 2024–2025 yang cenderung fluktuatif namun tetap berada pada kisaran yang relatif terkendali menunjukkan bahwa stabilitas harga daerah secara umum masih terjaga, meskipun terdapat tekanan inflasi pada periode tertentu akibat faktor musiman, gangguan pasokan, dan dinamika distribusi barang di wilayah perbatasan. Kondisi ini memberikan insight bahwa karakter inflasi di Nunukan sangat dipengaruhi oleh kelancaran rantai pasok dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, sehingga pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan harga tetapi juga pada penguatan sistem logistik dan ketersediaan barang. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan harga komoditas strategis, peningkatan konektivitas dan infrastruktur distribusi di kawasan perbatasan, penguatan cadangan pangan dan kerja sama antarwilayah, serta mendorong pengembangan produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan eksternal sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.



### **3.2. Kecamatan Krayan Selatan**

Krayan Selatan merupakan kawasan dataran tinggi terpencil dengan aksesibilitas yang masih sangat bergantung pada transportasi udara serta jaringan jalan darat yang terbatas. Infrastruktur perdagangan modern belum berkembang, sementara distribusi sejumlah kebutuhan pokok masih dipengaruhi interaksi lintas batas.

Meskipun demikian, struktur ekonomi wilayah tidak semata bertumpu pada konsumsi dan distribusi. Krayan Selatan telah memiliki kegiatan industri pengolahan padi adan menjadi beras adan yang menjadi identitas sekaligus komoditas unggulan daerah. Produk ini memiliki reputasi baik dan menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat, bahkan berperan dalam perdagangan keluar wilayah.

Pada pelayanan dasar, listrik telah menjangkau seluruh desa, namun tantangan masih terlihat pada konektivitas transportasi, frekuensi penerbangan perintis, serta keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Situasi ini menuntut kebijakan pembangunan yang tidak hanya membuka isolasi wilayah, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi lokal agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi perbatasan.

#### **GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Krayan Selatan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pedalaman Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar

744,44 km<sup>2</sup> dengan karakteristik topografi berupa dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk serta didukung kondisi lingkungan yang relatif masih alami. Kecamatan Krayan Selatan terdiri dari 13 desa dengan luas tiap-tiap desa ditunjukkan dalam tabel berikut.



Tabel 3.2.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Selatan, 2024

<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)</b>
(1)	(2)	(3)
Long Pasia	7,67	1,03
Liang Lunuk	5,09	0,68
Pa' Ibang	107,02	14,38
Pa' Amai	26,11	3,51
Pa' Kaber	33,65	4,52
Pa' Tera	23,00	3,09
Pa' Sing	166,27	22,33
Long Budung	27,45	3,69
Pa' Dalam	78,25	10,51
Pa' Urang	87,66	11,78
Long Birar	4,60	0,62
Pa' Upan	53,40	7,17
Long Pupung	124,27	16,69
<b>Krayan Selatan</b>	<b>744,44</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Krayan Selatan dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

Secara geografis, Krayan Selatan berada pada kawasan strategis perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi keterisolasian wilayah menyebabkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan, sehingga



mobilitas penduduk dan distribusi logistik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana transportasi yang terbatas.

Masyarakat Krayan Selatan didominasi oleh suku Dayak dengan kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal. Pada sektor ekonomi, pertanian menjadi mata pencaharian utama, khususnya budidaya padi dataran tinggi yang dikenal memiliki kualitas baik.

Dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, pengembangan wilayah Krayan Selatan tetap memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur serta pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Ketersediaan listrik di Kecamatan Krayan Selatan telah menjangkau seluruh desa. Dari total desa yang ada, sebanyak 13 desa mayoritas menggunakan listrik yang bersumber dari PLN. Tidak terdapat desa yang mayoritas menggunakan sumber listrik non-PLN, dan tidak ada desa yang belum menikmati aliran listrik.

Tabel 3.2.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	13
Mayoritas listrik non-PLN	0



Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Keadaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur ketenagalistrikan di Krayan Selatan relatif merata dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 3.2.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak Ada
Udara	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Akses transportasi antardesa atau ke kecamatan lain di Kecamatan Krayan Selatan hanya dapat dilalui melalui moda transportasi darat dan udara. Tidak ada ada moda transportasi air yang dapat menjangkau wilayah ini mengingat kondisi geografisnya yang berada di dataran tinggi.



Tabel 3.2.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan keberadaan fasilitas perhubungan darat, di Kecamatan Krayan Selatan tidak terdapat terminal. Baik terminal barang maupun terminal penumpang tercatat tidak tersedia di wilayah ini. Ketiadaan sarana terminal tersebut menggambarkan bahwa sistem transportasi darat di Krayan Selatan masih terbatas dan belum ditunjang oleh fasilitas simpul angkutan resmi. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana mobilitas orang dan distribusi barang berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan energi seperti bahan bakar minyak serta pemanfaatan akses darat menuju wilayah negara tetangga.

Kondisi keterbatasan infrastruktur transportasi tersebut berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Krayan Selatan. Pasokan BBM umumnya mengandalkan distribusi melalui jalur udara sehingga ketersediaannya relatif terbatas dan pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan. Jaringan jalan darat yang sebagian besar masih berupa jalan tanah turut memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat.

Selain itu, penerangan jalan umum (PJU) belum tersedia. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat juga banyak memanfaatkan kendaraan yang berasal dari Malaysia. Kedekatan geografis wilayah perbatasan menyebabkan terdapat jalur-jalur darat yang biasa digunakan warga untuk menuju wilayah negara tetangga guna menunjang berbagai kebutuhan.



Tabel 3.2.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Perintis	1	70
Bandar Udara Domestik	0	0
Bandar Udara Internasional	0	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas III Nunukan, 2025)

Ketersediaan prasarana angkutan udara di Kecamatan Krayan Selatan masih bertumpu pada keberadaan bandara perintis. Tercatat terdapat satu bandara perintis dengan frekuensi penerbangan sekitar 70 kali dalam setahun. Sementara itu, bandara domestik maupun bandara internasional tidak tersedia di wilayah ini.

Dalam operasionalnya, fasilitas bandara perintis tersebut masih sederhana. Landasan pacu berupa rumput dan sarana terminal belum memadai untuk menampung aktivitas penumpang maupun barang dalam jumlah besar. Dengan frekuensi penerbangan rata-rata sekitar dua kali dalam seminggu, masyarakat menilai layanan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan mobilitas. Pada kondisi tertentu, penerbangan sering kali penuh sehingga tidak seluruh permintaan angkutan dapat terlayani. Warga pada umumnya mengharapkan adanya penambahan jadwal menjadi sedikitnya tiga kali dalam seminggu.

Bagi masyarakat Krayan Selatan, transportasi udara memiliki peran yang sangat vital. Selain menjadi sarana utama pergerakan penduduk, bandara juga dimanfaatkan sebagai jalur masuk berbagai kebutuhan pokok, termasuk sembako dan bahan bakar minyak. Di



sisi lain, moda ini turut menjadi jalur distribusi keluar bagi komoditas unggulan daerah, terutama beras.

## PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

Kondisi wilayah perbatasan memengaruhi pola pasokan berbagai komoditas di Kecamatan Krayan Selatan. Sejumlah kebutuhan masyarakat tercatat diperoleh melalui suplai dari negara lain, meskipun sebagian komoditas tetap bersumber dari dalam negeri.

Tabel 3.2.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Komoditas	Kedaaan Pasokan Komoditas dari Negara Lain	Sumber Pasokan Komoditas
(1)	(2)	(3)
Sembako	Ada	Mayoritas dari negara lain
Elpiji	Ada	Mayoritas dari negara lain
Bahan Bakar Minyak	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Alat Transportasi	Ada	Mayoritas dari negara lain
Hasil Pertanian	Tidak Ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Pakaian	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Bahan Bangunan	Ada	Mayoritas dari negara lain

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komoditas sembako dan elpiji tersedia, dengan mayoritas pasokannya berasal dari negara lain. Demikian pula alat transportasi



serta bahan bangunan, yang sebagian besar dipenuhi melalui sumber di luar negeri. Sementara itu, bahan bakar minyak juga tersedia, namun mayoritas didatangkan dari dalam negeri. Berbeda dengan komoditas lainnya, hasil pertanian tidak dipasok dari negara lain karena seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Kecamatan Krayan Selatan justru menjual hasil pertanian unggulannya ke negara lain. Adapun untuk pakaian, ketersediaannya ada dengan mayoritas pasokan berasal dari dalam negeri.

Gambaran ini menunjukkan bahwa interaksi lintas batas memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat Krayan Selatan, terutama bagi beberapa komoditas tertentu, sementara pada komoditas lainnya ketergantungan terhadap pasokan domestik masih dominan.

Tabel 3.2.7 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

<b>Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan</b>	<b>Persentase Pasokan Komoditas Perdagangan (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Lokal	13,00
Kecamatan Lain	2,00
Kabupaten/ Kota Lain	10,00
Negara Lain	75,00

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komposisi sumber pasokan komoditas perdagangan di Kecamatan Krayan Selatan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah masih cukup besar. Pasokan yang berasal dari negara lain mendominasi dengan kontribusi sebesar 75,00 persen. Sementara itu, pasokan dari lokal



memberikan andil sebesar 13,00 persen. Adapun pasokan yang bersumber dari kabupaten/kota lain tercatat sebesar 10,00 persen, sedangkan dari kecamatan lain relatif kecil, yakni 2,00 persen.

Gambaran ini menegaskan kuatnya peran perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan komoditas di Krayan Selatan dibandingkan dengan suplai dari wilayah sekitarnya di dalam negeri.

Ketersediaan fasilitas ekonomi di Kecamatan Krayan Selatan masih relatif terbatas. Dari berbagai jenis sarana perdagangan dan akomodasi, hanya terdapat satu pasar dengan bangunan permanen yang menjadi pusat aktivitas jual beli masyarakat. Tidak terdapat kelompok pertokoan, pasar semi permanen, maupun pasar tanpa bangunan. Selain itu, minimarket juga belum tersedia di wilayah ini.

Tabel 3.2.8 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Selatan,

2025

<b>Fasilitas Ekonomi</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Kelompok Pertokoan	0
Pasar dengan Bangunan Permanen	1
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	0
Pasar tanpa Bangunan	0
Minimarket	0
Rumah Makan	0
Kedai Makan	3
Hotel	0
Penginapan	2



Pemerintahan Kabupaten  
Nunukan  
Badan Pengelola Perbatasan  
Daerah



Fasilitas Ekonomi	Jumlah
(1)	(2)
Toko Kelontong	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Untuk fasilitas konsumsi, tidak ditemukan rumah makan, namun terdapat tiga kedai makan yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pada sektor akomodasi, tidak terdapat hotel, sementara penginapan yang tersedia berjumlah dua unit. Adapun toko kelontong juga tidak tercatat keberadaannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada sarana yang sederhana dengan jumlah yang terbatas.

## **PARIWISATA**

Potensi pariwisata di Kecamatan Krayan Selatan masih berskala terbatas. Tercatat terdapat satu objek daya tarik wisata, yaitu balai adat yang menjadi representasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Pada satu tahun terakhir juga terdapat penyelenggaraan kegiatan atau event pariwisata, namun belum melibatkan partisipasi dari negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, kunjungan wisatawan mancanegara juga belum tercatat.

Ke depan, pengembangan pariwisata di Krayan Selatan diharapkan memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, antara lain melalui kebijakan yang mendorong kemajuan sektor pariwisata, peningkatan promosi, penyediaan permodalan, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas daya tarik wilayah sekaligus meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat.



## PENDIDIKAN

Tabel 3.2.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Pendidikan Anak Usia Dini	2
Taman Kanak-Kanak	1
<i>Raudhatul Athfall Bustanul Athfal</i>	0
Sekolah Dasar	2
Madrasah <i>Ibtidaiyah</i>	0
Sekolah Menengah Pertama	2
Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	0
Sekolah Menengah Atas	1
Madrasah <i>Aliyah</i>	0
Sekolah Menengah Kejuruan	0
Perguruan Tinggi	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Krayan Selatan mencakup beberapa jenjang, dan seluruh desa tercatat telah dapat mengakses layanan pendidikan tersebut. Fasilitas yang tersedia meliputi dua unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), satu unit Taman Kanak-Kanak, serta dua unit Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan menengah, terdapat dua unit Sekolah Menengah Pertama dan satu unit Sekolah Menengah Atas.



Sementara itu, fasilitas pendidikan berbasis madrasah, baik Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah belum tersedia. Demikian pula Sekolah Menengah Kejuruan dan perguruan tinggi tidak terdapat di wilayah ini. Kecamatan terdekat dari Kecamatan Krayan Selatan yang terdapat fasilitas tersebut adalah Kecamatan Nunukan Selatan yang dapat diakses melalui udara.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar hingga menengah atas telah tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh desa, meskipun pilihan jenis satuan pendidikan masih relatif terbatas.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana pendidikan di Kecamatan Krayan Selatan masih menghadapi beberapa keterbatasan. Dukungan air dan akses internet telah tersedia sehingga dapat membantu proses belajar mengajar serta kebutuhan administrasi pendidikan. Namun demikian, fasilitas listrik pada sarana pendidikan tercatat belum tersedia.

Tabel 3.2.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Tidak Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Di tengah kondisi tersebut, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tetap terjaga. Penduduk usia sekolah pada umumnya tidak menunjukkan kecenderungan untuk meninggalkan pendidikan



demu bekerja, sehingga keberlangsungan kegiatan belajar masih menjadi prioritas bagi keluarga di wilayah ini.

## KESEHATAN

Pada tahun 2025, ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Selatan masih didominasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar. Tercatat terdapat 1 puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang menjadi rujukan utama masyarakat. Selain itu, tersedia 4 puskesmas pembantu serta 13 pos kesehatan desa (poskesdes) yang tersebar untuk mendekatkan layanan kepada penduduk.

Tabel 3.2.11 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	0
Rumah Sakit Bersalin	0
Puskemas dengan Fasilitas Rawat Inap	1
Puskesmas Tanpa Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Pembantu	4
Poliklinik	0
Tempat Praktik Dokter	0
Rumah Bersalin	0
Tempat Praktik Bidan	0



Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Poskesdes	13
Polindes	0
Apotek	0
Toko Obat	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sementara itu, berbagai fasilitas kesehatan lainnya belum tersedia di wilayah ini. Tidak terdapat rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas tanpa rawat inap, poliklinik, tempat praktik dokter, rumah bersalin, tempat praktik bidan, polindes, apotek, maupun toko obat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat di Krayan Selatan masih bertumpu pada keberadaan puskesmas dan jaringan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Selatan masih menghadapi keterbatasan. Dukungan air dan akses internet telah tersedia pada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga membantu pelaksanaan layanan medis maupun administrasi. Namun demikian, fasilitas listrik belum tersedia, sehingga dalam praktiknya pelayanan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada.



Tabel 3.2.12 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Selatan, 2025

Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Listrik	Tidak Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain keterbatasan sarana, jumlah tenaga kesehatan juga masih relatif kurang dibandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada situasi tertentu, sebagian kecil warga memilih mencari pengobatan ke luar negeri sebagai alternatif untuk memperoleh layanan kesehatan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun layanan kesehatan dasar telah tersedia, peningkatan dukungan infrastruktur dan ketersediaan tenaga kesehatan masih menjadi kebutuhan penting di Krayan Selatan.

## INDUSTRI PENGOLAHAN

Kegiatan industri pengolahan di Kecamatan Krayan Selatan telah berkembang terutama pada komoditas pertanian lokal. Salah satu yang menonjol adalah pengolahan padi adan menjadi beras adan, yang dikenal luas sebagai produk khas kawasan Krayan. Aktivitas ini memberikan nilai tambah bagi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.

Keberadaan pengolahan tersebut menunjukkan bahwa geliat ekonomi Krayan Selatan tidak hanya bertumpu pada perdagangan dan distribusi barang, tetapi juga telah mencakup proses



peningkatan nilai melalui kegiatan produksi. Beras adan menjadi komoditas unggulan kecamatan karena selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, produk ini juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke luar wilayah.

Meskipun demikian, pengembangan industri pengolahan masih menghadapi tantangan, terutama terkait aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kelancaran distribusi. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan tetap diperlukan agar kapasitas produksi dan daya saing komoditas unggulan dapat terus meningkat.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Dengan adanya industri pengolahan padi adan, arah pembangunan Krayan Selatan perlu bergeser dari semata memperlancar arus barang masuk menjadi memperkuat daya saing barang keluar. Infrastruktur transportasi tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan kualitas jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta penguatan kapasitas angkutan udara agar distribusi hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, kebijakan perlu difokuskan pada pengembangan rantai nilai beras adan. Modernisasi peralatan pengolahan, peningkatan standar mutu, sertifikasi, dukungan kemasan, hingga perluasan akses pemasaran akan mendorong komoditas ini naik kelas dari produk lokal menjadi produk unggulan yang mampu menembus pasar lebih luas. Penguatan kelembagaan seperti koperasi atau BUMDes dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pasokan.

Terbatasnya fasilitas perdagangan menunjukkan perlunya penciptaan pusat ekonomi baru yang dapat menampung aktivitas jual beli sekaligus distribusi komoditas unggulan. Dengan dukungan tersebut, masyarakat tidak hanya bergantung pada barang dari luar negeri, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari produksi sendiri.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan agar sumber daya manusia lokal mampu



mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan industri pengolahan. Penyediaan fasilitas penunjang, pemenuhan tenaga profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat kapasitas wilayah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pembangunan Krayan Selatan harus ditempatkan sebagai strategi memperkuat kemandirian ekonomi perbatasan. Ketika komoditas unggulan berkembang, akses membaik, dan layanan publik meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh seiring dengan semakin kuatnya peran wilayah dalam sistem perekonomian nasional.



### 3.3. Kecamatan Krayan Tengah

Krayan Tengah merupakan kecamatan pedalaman seluas ±1.012,65 km<sup>2</sup> dengan karakter dataran tinggi serta sebaran desa yang luas sehingga menghadirkan tantangan besar dalam penyediaan layanan publik dan konektivitas. Akses transportasi bertumpu pada jalur darat dan udara, sementara moda air tidak tersedia. Infrastruktur darat masih didominasi jalan tanah, belum terdapat terminal, penerangan jalan umum belum tersedia, dan distribusi BBM cukup sering mengalami kendala. Transportasi udara menjadi urat nadi mobilitas. Hanya terdapat satu bandara perintis dengan frekuensi sekitar 106 penerbangan per tahun, yang dinilai belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat. Banyak penerbangan berada pada kapasitas penuh sehingga warga mengharapkan penambahan jadwal.

Di bidang ekonomi, fasilitas perdagangan masih sangat terbatas. Aktivitas ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor pertanian dengan komoditas unggulan beras ada, serta tanaman pangan lain seperti jiwawut dan sorgum. Berbeda dengan sejumlah wilayah perbatasan lainnya, struktur pasokan barang di Krayan Tengah relatif lebih kuat ditopang jaringan domestik.

Pada pelayanan dasar, pendidikan baru tersedia hingga SMP, sementara jenjang lebih tinggi harus diakses ke kecamatan lain melalui transportasi udara. Fasilitas penunjang seperti listrik dan internet di sekolah belum tersedia. Di sektor kesehatan, layanan masih bertumpu pada puskesmas pembantu dengan dukungan utilitas yang terbatas serta kekurangan tenaga medis.

Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan intervensi pembangunan untuk membuka isolasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat basis ekonomi lokal agar masyarakat perbatasan memperoleh manfaat optimal dari posisinya yang strategis.

#### **GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Krayan Tengah merupakan salah satu kecamatan di wilayah pedalaman Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang memiliki karakteristik geografis berupa dataran tinggi



dan pegunungan dengan lingkungan yang masih relatif alami. Luas wilayah Krayan Tengah tercatat sekitar 1.012,65 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam sejumlah desa dengan ukuran wilayah yang bervariasi.

Berdasarkan distribusi luas wilayahnya, Desa Tang Paye merupakan desa terluas dengan cakupan sekitar 346,15 km<sup>2</sup> atau 34,18 persen dari total luas kecamatan. Selanjutnya diikuti oleh Desa Long Rungan seluas 227,49 km<sup>2</sup> (22,46 persen) dan Desa Long Rian seluas 159,63 km<sup>2</sup> (15,76 persen). Ketiga desa tersebut mencakup lebih dari separuh wilayah Krayan Tengah.

Sementara itu, desa dengan luas wilayah relatif kecil antara lain Binuang seluas 9,40 km<sup>2</sup> (0,93 persen) dan Tang Badui seluas 10,32 km<sup>2</sup> (1,02 persen). Desa-desa lainnya seperti Long Padi, Pa' Yalau, Long Mutan, Long Kelupan, Ba' Liku, dan Pa' Milau memiliki proporsi luas yang berada di antara kedua kelompok tersebut.

Tabel 3.3.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Tengah, 2024

<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Tang Paye	346,15	34,18
Long Kelupan	30,31	2,99
Long Rungan	227,49	22,46
Pa' Milau	16,29	1,61
Pa' Yalau	58,12	5,74
Long Mutan	51,32	5,07
Tang Badui	10,32	1,02
Long Padi	73,12	7,22



<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)</b>
(1)	(2)	(3)
Long Rian	159,63	15,76
Ba' Liku	30,50	3,01
Binuang	9,40	0,93
<b>Krayan Tengah</b>	<b>1.012,65</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Krayan Tengah dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

Sebaran luas wilayah ini memberikan gambaran awal mengenai tantangan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta jangkauan mobilitas penduduk di Krayan Tengah. Wilayah dengan cakupan yang besar tentu memerlukan strategi pengelolaan dan konektivitas yang berbeda dibandingkan desa dengan ukuran yang lebih kecil.

## **TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR**

Ketersediaan listrik di Kecamatan Krayan Tengah menunjukkan bahwa seluruh desa telah memperoleh akses penerangan. Namun demikian, sumber listrik yang digunakan belum berasal dari jaringan PLN. Dari seluruh desa yang ada, sebanyak 11 desa tercatat mayoritas memanfaatkan sumber listrik lainnya, sementara tidak terdapat desa yang menggunakan listrik PLN maupun non-PLN, dan tidak ada desa yang belum teraliri listrik.



Tabel 3.3.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Tengah,  
2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	0
Mayoritas listrik non-PLN	0
Mayoritas listrik lainnya	11
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sumber listrik lainnya yang dimaksud umumnya berasal dari mesin generator dan panel surya yang dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga maupun fasilitas umum. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemenuhan listrik di Krayan Tengah masih sangat bergantung pada penyediaan mandiri dengan kapasitas yang relatif terbatas, sehingga keberlanjutan pasokan dan jam layanan dapat berbeda antarwilayah.

Akses transportasi antardesa maupun menuju kecamatan lain di Krayan Tengah tersedia melalui jalur darat dan udara. Kedua moda tersebut menjadi sarana utama mobilitas penduduk serta distribusi barang di wilayah ini. Sebaliknya, transportasi air tidak tersedia. Kondisi ini berkaitan dengan karakter geografis Krayan Tengah yang berada di dataran tinggi, sehingga pergerakan masyarakat tidak memungkinkan untuk memanfaatkan jalur sungai atau perairan sebagai alternatif transportasi. Gambaran tersebut menegaskan pentingnya peran infrastruktur darat dan udara dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Krayan Tengah.



Tabel 3.3.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak Ada
Udara	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data fasilitas perhubungan darat, di Kecamatan Krayan Tengah tidak terdapat terminal, baik terminal barang maupun terminal penumpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas transportasi darat masih berlangsung tanpa dukungan simpul angkutan resmi sehingga pengaturan arus penumpang dan distribusi logistik berjalan secara terbatas.

Tabel 3.3.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Keterbatasan prasarana tersebut berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan bahan bakar



minyak (BBM) tercatat cukup sering mengalami kelangkaan karena distribusinya sangat dipengaruhi oleh akses yang tidak selalu lancar. Jaringan jalan yang ada pada umumnya masih berupa jalan tanah, sehingga mobilitas sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kemampuan sarana angkut.

Selain itu, penerangan jalan umum (PJU) belum tersedia, yang menyebabkan aktivitas transportasi pada malam hari relatif terbatas. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat juga banyak memanfaatkan kendaraan yang berasal dari negara luar, seiring dengan kedekatan wilayah perbatasan yang memudahkan interaksi lintas negara.

Gambaran ini menegaskan bahwa penguatan infrastruktur transportasi darat masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi di Krayan Tengah.

Ketersediaan prasarana angkutan udara di Kecamatan Krayan Tengah masih bergantung pada satu bandar udara perintis dengan frekuensi penerbangan sekitar 106 kali dalam setahun. Sementara itu, bandara domestik maupun bandara internasional tidak terdapat di wilayah ini.

Bandara perintis tersebut telah memiliki landasan pacu beraspal, namun aksesibilitas masyarakat dari sebagian besar desa menuju lokasi bandara masih tergolong sulit. Jarak yang jauh serta kondisi jaringan jalan yang terbatas menyebabkan tidak seluruh kebutuhan mobilitas dapat terlayani secara optimal.

Tabel 3.3.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

<b>Kategori Bandar Udara</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Frekuensi Penerbangan dalam Setahun</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Bandar Udara Perintis	1	106
Bandar Udara Domestik	0	0



Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Internasional	0	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas III Nunukan, 2025)

Dengan frekuensi penerbangan rata-rata sekitar dua kali dalam seminggu, kapasitas angkutan sering kali belum mampu mengimbangi permintaan. Pada banyak kesempatan, penerbangan hampir selalu penuh sehingga masyarakat harus menunggu jadwal berikutnya. Warga menilai bahwa kebutuhan ideal setidaknya tiga kali penerbangan dalam seminggu agar arus penumpang maupun distribusi barang dapat berjalan lebih lancar.

Keberadaan transportasi udara ini memiliki peran penting sebagai penghubung utama wilayah Krayan Tengah dengan daerah lain, baik untuk pergerakan penduduk maupun masuk keluarnya logistik dan kebutuhan pokok.

## **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Pola pasokan komoditas perdagangan di Kecamatan Krayan Tengah memperlihatkan kuatnya pengaruh interaksi lintas batas. Sejumlah kebutuhan masyarakat tersedia melalui suplai dari negara lain, meskipun beberapa komoditas masih sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri.



Tabel 3.3.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

Komoditas	Keadaan Pasokan Komoditas dari Negara Lain	Sumber Pasokan Komoditas
(1)	(2)	(3)
Sembako	Ada	Mayoritas dari negara lain
Elpiji	Ada	Mayoritas dari negara lain
Bahan Bakar Minyak	Ada	Pasokan dalam dan luar negeri seimbang
Alat Transportasi	Ada	Mayoritas dari negara lain
Hasil Pertanian	Tidak Ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Pakaian	Tidak Ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Bahan Bangunan	Ada	Seluruhnya dari negara lain

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komoditas sembako dan elpiji tercatat tersedia dengan mayoritas pasokan berasal dari negara lain. Demikian pula alat transportasi, yang sebagian besar didatangkan dari luar negeri. Untuk bahan bangunan, seluruh pasokan diketahui berasal dari negara lain. Sementara itu, bahan bakar minyak tersedia dengan sumber pasokan yang relatif berimbang antara dalam negeri dan luar negeri.

Berbeda dengan komoditas tersebut, hasil pertanian dan pakaian tidak berasal dari negara lain karena seluruhnya dipenuhi dari dalam negeri. Bahkan, untuk hasil pertanian, masyarakat Krayan Tengah justru berperan sebagai pemasok, dengan komoditas unggulan terutama beras adan yang banyak dijual ke luar negeri.



Gambaran ini menunjukkan bahwa hubungan perdagangan lintas batas tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi jalur pemasaran bagi produk pertanian unggulan dari Krayan Tengah.

Komposisi sumber pasokan komoditas perdagangan di Kecamatan Krayan Tengah menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih banyak ditopang oleh wilayah dalam negeri. Pasokan terbesar berasal dari kecamatan lain dengan kontribusi mencapai 40,00%. Sementara itu, pasokan dari lokal memberikan andil sebesar 25,00%, dan dari kabupaten/kota lain sebesar 25,00%.

Tabel 3.3.7 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

<b>Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan</b>	<b>Persentase Pasokan Komoditas Perdagangan (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Lokal	25,00
Kecamatan Lain	40,00
Kabupaten/ Kota Lain	25,00
Negara Lain	10,00

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Adapun pasokan yang bersumber dari negara lain relatif kecil, yakni hanya 10,00%. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun berada di kawasan perbatasan, ketergantungan Krayan Tengah terhadap suplai lintas negara tidak sebesar beberapa wilayah perbatasan lainnya, karena sebagian besar kebutuhan masih dapat dipenuhi melalui jaringan distribusi domestik.

Ketersediaan fasilitas ekonomi di Kecamatan Krayan Tengah masih tergolong sederhana dan terbatas. Sarana perdagangan



utama yang tercatat hanyalah satu pasar tanpa bangunan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tidak terdapat kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen maupun semi permanen, serta minimarket di wilayah ini.

Tabel 3.3.8 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

<b>Fasilitas Ekonomi</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Kelompok Pertokoan	0
Pasar dengan Bangunan Permanen	0
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	0
Pasar tanpa Bangunan	1
Minimarket	0
Rumah Makan	0
Kedai Makan	0
Hotel	0
Penginapan	1
Toko Kelontong	4

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025) dan Kecamatan krayan Tengah dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

Untuk fasilitas konsumsi, baik rumah makan maupun kedai makan belum tersedia. Pada sektor akomodasi, terdapat satu unit



penginapan yang melayani kebutuhan pendatang maupun mobilitas masyarakat. Sementara itu, toko kelontong berjumlah empat unit dan menjadi penopang utama pemenuhan kebutuhan harian warga.

Di tengah keterbatasan fasilitas tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan bertumpu pada sektor pertanian. Kecamatan Krayan Tengah dikenal memiliki komoditas unggulan berupa beras adan, serta tanaman pangan lain seperti jiwawut dan sorgum, yang menjadi sumber penghidupan penting sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.

## **PARIWISATA**

Potensi pariwisata di Kecamatan Krayan Tengah didukung oleh keberadaan sejumlah objek daya tarik wisata, baik yang berbasis sejarah, budaya, maupun alam. Beberapa di antaranya berupa situs-situs peninggalan, termasuk Batu Ruyud, yang memiliki nilai penting bagi identitas dan tradisi masyarakat setempat. Selain itu, kekayaan lanskap pegunungan dan kehidupan adat menjadi daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah dilaksanakan kegiatan atau event wisata dan budaya. Namun demikian, penyelenggaraan tersebut belum melibatkan partisipasi dari negara asing, dan kunjungan wisatawan mancanegara juga belum tercatat.

Ke depan, masyarakat berharap adanya dukungan pemerintah yang lebih kuat untuk mendorong perkembangan sektor ini, terutama melalui pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan peningkatan kapasitas dan fasilitas, potensi wisata Krayan Tengah diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal.

## **PENDIDIKAN**

Ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Krayan Tengah pada tahun 2025 masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar. Tercatat terdapat 3 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 4 unit Sekolah Dasar yang melayani kebutuhan pendidikan



masyarakat. Pada jenjang menengah pertama tersedia 1 unit Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 3.3.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Pendidikan Anak Usia Dini	3
Taman Kanak-Kanak	0
<i>Raudhatul Athfall Bustanul Athfal</i>	0
Sekolah Dasar	4
Madrasah <i>Ibtidaiyah</i>	0
Sekolah Menengah Pertama	1
Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	0
Sekolah Menengah Atas	0
Madrasah <i>Aliyah</i>	0
Sekolah Menengah Kejuruan	0
Perguruan Tinggi	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sementara itu, sejumlah fasilitas pendidikan lainnya belum terdapat di wilayah ini. Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, hingga perguruan tinggi tidak tersedia di Krayan Tengah. Untuk mengakses jenjang pendidikan tersebut, masyarakat



umumnya harus menuju ke Kecamatan Nunukan atau Kecamatan Nunukan Selatan yang dapat dijangkau melalui transportasi udara.

Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun layanan pendidikan dasar telah tersedia di dalam kecamatan, pilihan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi masih memerlukan mobilitas keluar wilayah dengan konsekuensi biaya dan akses yang tidak ringan bagi masyarakat.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana pendidikan di Kecamatan Krayan Tengah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dukungan air telah tersedia dan membantu kebutuhan operasional sekolah sehari-hari. Akan tetapi, fasilitas listrik dan akses internet belum tersedia sehingga proses belajar mengajar belum dapat memanfaatkan perangkat elektronik maupun sumber pembelajaran digital secara optimal. Kegiatan pendidikan pada akhirnya masih bertumpu pada metode konvensional dengan segala penyesuaian terhadap kondisi sarana yang ada.

Tabel 3.3.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Tidak ada
Air	Ada
Internet	Tidak ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Dalam situasi tersebut, minat masyarakat terhadap pendidikan pada dasarnya tetap ada. Namun demikian, terdapat sebagian kecil penduduk yang pada kondisi tertentu cenderung memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah, terutama



ketika dihadapkan pada keterbatasan fasilitas serta kebutuhan ekonomi keluarga.

Gambaran ini menunjukkan bahwa peningkatan dukungan infrastruktur pendidikan tetap menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan partisipasi sekolah sekaligus mendorong masyarakat agar semakin menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

## KESEHATAN

Pada tahun 2025, ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Tengah masih sangat terbatas dan didominasi oleh fasilitas pelayanan dasar. Fasilitas yang tercatat tersedia hanya

3 unit puskesmas pembantu yang menjadi tumpuan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Sementara itu, berbagai jenis sarana kesehatan lainnya belum terdapat di wilayah ini. Tidak tersedia rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan maupun tanpa fasilitas rawat inap, poliklinik, tempat praktik dokter, rumah bersalin, tempat praktik bidan, poskesdes, polindes, apotek, maupun toko obat.

Tabel 3.3.11 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	0
Rumah Sakit Bersalain	0
Puskemas dengan Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Tanpa Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Pembantu	3
Poliklinik	0



Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Tempat Praktik Dokter	0
Rumah Bersalin	0
Tempat Praktik Bidan	0
Poskesdes	0
Polindes	0
Apotek	0
Toko Obat	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan lanjutan masih memerlukan rujukan ke wilayah lain, sehingga penguatan fasilitas dan kapasitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting di Krayan Tengah.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Tengah masih menghadapi keterbatasan yang cukup mendasar. Dari sisi utilitas, dukungan air telah tersedia untuk menunjang pelayanan. Namun demikian, fasilitas listrik dan akses internet belum tersedia sehingga kegiatan pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian terhadap kondisi yang ada.



Tabel 3.3.12 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Tengah, 2025

Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Listrik	Tidak ada
Air	Ada
Internet	Tidak ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain keterbatasan sarana, jumlah tenaga kesehatan juga masih relatif kurang dibandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Situasi ini menyebabkan kapasitas layanan yang dapat diberikan menjadi terbatas, terutama untuk penanganan kasus tertentu yang memerlukan dukungan peralatan maupun kompetensi tambahan.

Meskipun berada di kawasan perbatasan, masyarakat tidak tercatat melakukan pengobatan ke luar negeri. Dengan demikian, pelayanan yang tersedia di dalam wilayah maupun rujukan ke daerah lain di dalam negeri tetap menjadi andalan bagi penduduk Krayan Tengah.

## INDUSTRI PENGOLAHAN

Kegiatan industri pengolahan di Kecamatan Krayan Tengah berkembang terutama pada komoditas pertanian lokal. Salah satu yang menonjol adalah pengolahan padi adan menjadi beras adan, yang telah dikenal luas sebagai produk khas wilayah ini. Aktivitas pengolahan tersebut memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat posisi komoditas ini dalam perdagangan.



Beras akan kemudian menjadi komoditas unggulan kecamatan karena tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki daya saing untuk dipasarkan ke luar wilayah. Keberadaan industri pengolahan ini menunjukkan bahwa meskipun berada di daerah perbatasan dengan berbagai keterbatasan infrastruktur, masyarakat Krayan Tengah telah mampu mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Sebagai kawasan perbatasan darat yang memiliki potensi pertanian bernilai tinggi, pembangunan Krayan Tengah perlu diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah sebagai fondasi utama. Tanpa akses yang memadai, upaya peningkatan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan akan sulit mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan darat agar dapat dilalui sepanjang musim, penyediaan penerangan jalan umum, serta pembukaan jalur distribusi logistik yang lebih pasti menjadi prioritas mendesak. Pada saat yang sama, kapasitas transportasi udara perlu diperkuat melalui penambahan frekuensi penerbangan guna menjawab kebutuhan mobilitas penumpang dan arus barang.

Di sektor ekonomi, keberadaan industri pengolahan padi akan menjadi modal penting bagi transformasi wilayah. Kebijakan pembangunan perlu mendorong hilirisasi yang lebih kuat melalui modernisasi alat produksi, peningkatan mutu, sertifikasi, serta penguatan akses pemasaran. Dengan demikian, Krayan Tengah tidak hanya dikenal sebagai wilayah produksi, tetapi juga sebagai pusat nilai tambah komoditas pertanian perbatasan. Dukungan terhadap pengembangan jiwawut dan sorgum sebagai pangan lokal alternatif juga dapat memperluas diversifikasi ekonomi masyarakat.

Terbatasnya fasilitas perdagangan menunjukkan perlunya intervensi pemerintah dalam menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Pembangunan pasar yang lebih representatif, dukungan permodalan UMKM, serta pembinaan usaha jasa akan mempercepat perputaran ekonomi lokal dan mengurangi biaya yang harus ditanggung masyarakat.



Pada bidang pendidikan, tantangan terbesar terletak pada keterbatasan jenjang dan fasilitas pendukung. Penyediaan listrik dan internet di sekolah akan membuka peluang pembelajaran modern sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, dukungan beasiswa, penyediaan asrama, atau skema pendidikan jarak jauh dapat menjadi solusi bagi siswa yang harus melanjutkan pendidikan ke luar kecamatan.

Dalam sektor kesehatan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas layanan dasar melalui penambahan tenaga kesehatan, penyediaan utilitas, dan penguatan sistem rujukan. Dengan langkah ini, masyarakat tidak hanya memperoleh akses yang lebih baik, tetapi juga kepastian pelayanan di wilayah sendiri.

Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan situs sejarah seperti Batu Ruyud juga patut menjadi agenda strategis. Dengan dukungan infrastruktur, promosi, dan peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pelaku wisata, sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tetap menjaga kelestarian adat.

Secara keseluruhan, arah pembangunan Krayan Tengah harus dipandang sebagai investasi jangka panjang negara di wilayah perbatasan. Ketika konektivitas membaik, pelayanan meningkat, dan ekonomi lokal tumbuh, masyarakat akan semakin kuat terikat dengan sistem nasional dan memperoleh kesejahteraan yang lebih merata.



### 3.4. Kecamatan Krayan

Kecamatan Krayan merupakan satu dari lima kecamatan yang terletak di dataran tinggi krayan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 777,91 km<sup>2</sup> dengan karakteristik topografi berupa dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk serta didukung kondisi lingkungan yang relatif masih alami. Kecamatan Krayan terdiri dari 23 desa dengan luas tiap-tiap desa ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan, 2024

No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pa' Matung	3,54	1,39
2	Pa' Putuk	12,03	4,73
3	Cinglat	45,39	17,84
4	Pa' Padi	11,34	4,46
5	Liang Bidung	5,11	2,01
6	Wa' Laya	37,08	14,57
7	Long Matung	4,58	1,80
8	Long Rupan	5,85	2,30
9	Long Katung	4,14	1,63
10	Pa' Terutun	18,27	7,18
11	Long Bawan	2,94	1,16



No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Pa' Rupai	27,60	10,85
13	Buduk Tumu	4,39	1,73
14	Long Nawang	4,33	1,70
15	Buduk Kinangan	3,01	1,18
16	Wa' Yanud	14,12	5,55
17	Pa' Sire	8,96	3,52
18	Pa' Nado	6,96	2,74
19	Liang Tuer	5,80	2,28
20	Pa' Api	9,44	3,71
21	Ba Sikor	4,18	1,64
22	Long Berayang	12,87	5,06
23	Liang Butan	2,52	0,99
	Total (Krayan)	254,45	100

Sumber: Kecamatan Krayan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Secara geografis, Krayan berada pada kawasan strategis perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi keterisolasian wilayah menyebabkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan, sehingga mobilitas penduduk dan distribusi logistik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana transportasi yang terbatas. Kecamatan Krayan hanya bisa diakses melalui udara dari wilayah Indonesia. Sedangkan untuk akses darat yang terbuka adalah ke Malaysia.



Masyarakat Krayan didominasi oleh suku Dayak dengan kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal. Pada sektor ekonomi, pertanian menjadi mata pencaharian utama, khususnya budidaya padi dataran tinggi yang dikenal memiliki kualitas baik.

Dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, pengembangan wilayah Krayan tetap memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur serta pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya PLBN akan sangat mendukung pengembangan kecamatan Krayan dan konektivitas 5 kecamatan di dataran tinggi krayan.

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Ketersediaan listrik di Kecamatan Krayan telah menjangkau seluruh desa. Dari total desa yang ada, sebanyak 21 desa mayoritas menggunakan listrik yang bersumber dari PLN dan ada 2 desa yang mayoritas menggunakan sumber listrik non-PLN yaitu menggunakan panel surya, dan tidak ada desa yang belum menikmati aliran listrik.

Tabel 3.4.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan, 2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	21
Mayoritas listrik non-PLN	2
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Keadaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur ketenagalistrikan di Krayan relatif merata dan dapat mendukung



pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

### 3.4.3 Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan, 2025

Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak Ada
Udara	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Akses transportasi antar desa atau ke kecamatan lain di Kecamatan Krayan hanya dapat dilalui melalui moda transportasi darat dan udara. Moda transportasi darat merupakan cara utama masyarakat kecamatan Krayan ke kecamatan lain. Untuk akses transportasi udara dominan tujuannya ke ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Nunukan. Tidak ada ada moda transportasi air yang dapat menjangkau wilayah ini mengingat kondisi geografisnya yang berada di dataran tinggi.

Tabel 3.4.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Berdasarkan keberadaan fasilitas perhubungan darat, di Kecamatan Krayan tidak terdapat terminal. Baik terminal barang maupun terminal penumpang tercatat tidak tersedia di wilayah ini. Ketiadaan sarana terminal tersebut menggambarkan bahwa sistem transportasi darat di Krayan masih terbatas dan belum ditunjang oleh fasilitas simpul angkutan resmi. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana mobilitas orang dan distribusi barang berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan energi seperti bahan bakar minyak serta pemanfaatan akses darat menuju wilayah negara tetangga.

Kondisi keterbatasan infrastruktur transportasi tersebut berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Krayan. Pasokan BBM umumnya mengandalkan distribusi melalui jalur udara sehingga ketersediaannya relatif terbatas dan pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan. Jaringan jalan darat yang sebagian besar masih berupa jalan tanah turut memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat.

Selain itu, penerangan jalan umum (PJU) belum tersedia. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat juga banyak memanfaatkan kendaraan yang berasal dari Malaysia. Hampir seluruh kendaraan roda 4 yang ada di Kecamatan Krayan adalah mobil dari Malaysia. Kedekatan geografis wilayah perbatasan menyebabkan terdapat jalur-jalur darat yang biasa digunakan warga untuk menuju wilayah negara tetangga guna menunjang berbagai kebutuhan.

Tabel 3.4.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan, 2025

Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Perintis	1	350
Bandar Udara Domestik	0	0



Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Internasional	0	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas III Nunukan, 2025)

Ketersediaan prasarana angkutan udara di Kecamatan Krayan masih bertumpu pada keberadaan bandara perintis dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari Pemerintah Daerah Nunukan. Tercatat terdapat satu bandara perintis dengan frekuensi penerbangan sekitar 350 kali dalam setahun. Sementara itu, bandara domestik maupun bandara internasional tidak tersedia di wilayah ini.

Dalam operasionalnya, fasilitas bandara perintis tersebut masih sederhana. Landasan pacu berupa aspal. Dengan frekuensi penerbangan rata-rata sekitar sebelas kali dalam seminggu, masyarakat menilai layanan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan mobilitas. Pada kondisi tertentu, penerbangan sering kali penuh sehingga tidak seluruh permintaan angkutan dapat terlayani. Warga pada umumnya mengharapkan adanya penambahan jadwal menjadi sedikitnya lima belas kali dalam seminggu.

Bagi masyarakat Krayan, transportasi udara memiliki peran yang sangat vital. Selain menjadi sarana utama pergerakan penduduk, bandara juga dimanfaatkan sebagai jalur masuk berbagai kebutuhan pokok, termasuk sembako dan bahan bakar minyak. Di sisi lain, moda ini turut menjadi jalur distribusi keluar bagi komoditas unggulan daerah, yaitu beras, garam gunung, dan buah nanas.

## **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Kondisi wilayah perbatasan mempengaruhi pola pasokan berbagai komoditas di Kecamatan Krayan. Sejumlah kebutuhan



masyarakat tercatat diperoleh melalui suplai dari negara lain, meskipun sebagian komoditas tetap bersumber dari dalam negeri.

Tabel 3.4.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan, 2025

<b>Komoditas</b>	<b>Keadaan Pasokan Komoditas dari Negara Lain</b>	<b>Sumber Pasokan Komoditas</b>
(1)	(2)	(3)
Sembako	Ada	Mayoritas dari negara lain
Elpiji	Ada	Mayoritas dari negara lain
Bahan Bakar Minyak	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Alat Transportasi	Ada	Mayoritas dari negara lain
Hasil Pertanian	Tidak Ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Pakaian	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Bahan Bangunan	Ada	Mayoritas dari negara lain

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komoditas sembako dan elpiji tersedia, dengan mayoritas pasokannya berasal dari negara lain. Demikian pula alat transportasi serta bahan bangunan, yang sebagian besar dipenuhi melalui sumber di luar negeri. Sementara itu, bahan bakar minyak juga tersedia, namun mayoritas didatangkan dari dalam negeri. Berbeda dengan komoditas lainnya, hasil pertanian tidak dipasok dari negara lain karena seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Kecamatan Krayan justru menjual hasil pertanian unggulannya ke negara lain. Adapun untuk pakaian, ketersediaannya ada dengan mayoritas pasokan berasal dari dalam negeri.



Gambaran ini menunjukkan bahwa interaksi lintas batas memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat Krayan, terutama bagi beberapa komoditas tertentu, sementara pada komoditas lainnya ketergantungan terhadap pasokan domestik masih dominan.

Tabel 3.4.7 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan, 2025

<b>Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan</b>	<b>Persentase Pasokan Komoditas Perdagangan (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Lokal	13,00
Kecamatan Lain	2,00
Kabupaten/ Kota Lain	10,00
Negara Lain	75,00

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komposisi sumber pasokan komoditas perdagangan di Kecamatan Krayan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah masih cukup besar. Pasokan yang berasal dari negara lain mendominasi dengan kontribusi sebesar 75,00 persen. Sementara itu, pasokan dari lokal memberikan andil sebesar 13,00 persen. Adapun pasokan yang bersumber dari kabupaten/kota lain tercatat sebesar 10,00 persen, sedangkan dari kecamatan lain relatif kecil, yakni 2,00 persen.

Gambaran ini menegaskan kuatnya peran perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan komoditas di Krayan dibandingkan dengan suplai dari wilayah sekitarnya di dalam negeri.



Ketersediaan fasilitas ekonomi di Kecamatan Krayan masih relatif terbatas. Dari berbagai jenis sarana perdagangan dan akomodasi, hanya terdapat satu pasar dengan bangunan permanen



yang menjadi pusat aktivitas jual beli masyarakat. Terdapat satu kelompok pertokoan, dua pasar semi permanen, sedangkan tidak ada pasar tanpa bangunan. Selain itu, minimarket juga belum tersedia di wilayah ini.

Tabel 3.4.8 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan, 2025

<b>Fasilitas Ekonomi</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Kelompok Pertokoan	1
Pasar dengan Bangunan Permanen	1
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	2
Pasar tanpa Bangunan	0
Minimarket	1
Rumah Makan	0
Kedai Makan	10
Hotel	2
Penginapan	5
Toko Kelontong	30

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Untuk fasilitas konsumsi, tidak ditemukan rumah makan, namun terdapat sepuluh warung/kedai makan yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pada sektor akomodasi, terdapat

2 hotel, sementara penginapan yang tersedia berjumlah lima unit. Adapun toko kelontong terdapat 30 unit.



Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada sarana yang sederhana dengan jumlah yang terbatas.

## **PARIWISATA**

Potensi pariwisata di Kecamatan Krayan masih berskala terbatas. Tercatat terdapat dua objek daya tarik wisata, yaitu lokasi pembuatan garam gunung di Long Midang, serta Buduk Yuvai Semaring yang merupakan destinasi wisata perbukitan yang terkenal dengan pemandangan alam memukau ("negeri di atas awan") dan memiliki nilai sejarah/legenda bagi masyarakat Dayak Lundayeh. Pada satu tahun terakhir juga terdapat penyelenggaraan kegiatan atau event pariwisata, namun belum melibatkan partisipasi dari negara asing. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kecamatan Krayan cukup banyak, ada lebih dari 50 orang yang berkunjung setiap tahunnya.

Ke depan, pengembangan pariwisata di Krayan diharapkan memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, antara lain melalui kebijakan yang mendorong kemajuan sektor pariwisata, peningkatan promosi, penyediaan permodalan, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas daya tarik wilayah sekaligus meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat.

## **PENDIDIKAN**

Tabel 3.4.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan, 2025

<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Pendidikan Anak Usia Dini	6



Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Taman Kanak-Kanak	1
<i>Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal</i>	0
Sekolah Dasar	7
Madrasah <i>Ibtidaiyah</i>	0
Sekolah Menengah Pertama	2
Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	0
Sekolah Menengah Atas	1
Madrasah <i>Aliyah</i>	0
Sekolah Menengah Kejuruan	1
Perguruan Tinggi	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Krayan mencakup beberapa jenjang, dan seluruh desa tercatat telah dapat mengakses layanan pendidikan tersebut. Fasilitas yang tersedia meliputi enam unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), satu unit Taman Kanak-Kanak, serta tujuh unit Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan menengah, terdapat dua unit Sekolah Menengah Pertama dan satu unit Sekolah Menengah Atas serta satu unit Sekolah Menengah Kejuruan.

Sementara itu, fasilitas pendidikan berbasis madrasah, baik Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah belum tersedia. Kecamatan terdekat dari Kecamatan Krayan yang terdapat fasilitas tersebut



adalah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang dapat diakses melalui udara.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar hingga menengah atas telah tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh desa, meskipun pilihan jenis satuan pendidikan masih relatif terbatas.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana pendidikan di Kecamatan Krayan masih menghadapi beberapa keterbatasan. Dukungan air, listrik dan akses internet telah tersedia sehingga dapat membantu proses belajar mengajar serta kebutuhan administrasi pendidikan. Namun demikian, fasilitas internet pada sarana pendidikan tercatat masih mengandalkan starlink yang mempunyai keterbatasan banyaknya pengguna.

Tabel 3.4.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Di tengah kondisi tersebut, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tetap terjaga. Penduduk usia sekolah pada umumnya tidak menunjukkan kecenderungan untuk meninggalkan pendidikan demi bekerja, sehingga keberlangsungan kegiatan belajar masih menjadi prioritas bagi keluarga di wilayah ini.



## KESEHATAN

Pada tahun 2025, ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Krayan masih didominasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar. Tercatat terdapat 1 puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang menjadi rujukan utama masyarakat. Selain itu, tersedia 4 puskesmas pembantu, 3 tempat praktek dokter, 1 tempat praktek bidan, serta 6 apotek yang tersebar untuk mendekatkan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 3.4.11 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan, 2025

Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	0
Rumah Sakit Bersalin	0
Puskesmas dengan Fasilitas Rawat Inap	1
Puskesmas Tanpa Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Pembantu	4
Poliklinik	0
Tempat Praktek Dokter	3
Rumah Bersalin	0
Tempat Praktek Bidan	1
Poskesdes	0
Polindes	0
Apotek	6
Toko Obat	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Sementara itu, berbagai fasilitas kesehatan lainnya belum tersedia di wilayah ini. Tidak terdapat rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas tanpa rawat inap, poliklinik, rumah bersalin, polindes, maupun toko obat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat di Krayan masih bertumpu pada keberadaan puskesmas dan jaringan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana kesehatan di Kecamatan Krayan masih menghadapi keterbatasan. Dukungan air, listrik, dan akses internet telah tersedia pada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga membantu pelaksanaan layanan medis maupun administrasi.

Tabel 3.4.12 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain keterbatasan sarana, jumlah tenaga kesehatan juga masih relatif kurang dibandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada situasi tertentu, sebagian kecil warga memilih mencari pengobatan ke luar negeri sebagai alternatif untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelayanan kesehatan dasar telah tersedia, peningkatan dukungan



infrastruktur dan ketersediaan tenaga kesehatan masih menjadi kebutuhan penting di Krayan.

## **INDUSTRI PENGOLAHAN**

Kegiatan industri pengolahan di Kecamatan Krayan telah berkembang terutama pada komoditas pertanian lokal. Salah satu yang menonjol adalah pengolahan padi adan menjadi beras adan, yang dikenal luas sebagai produk khas kawasan Krayan. Selain beras adan, Kecamatan mempunyai industri pembuatan garam gunung. Garam Gunung Krayan merupakan produk unggulan yang diolah dari sumur air asin alami di dataran tinggi, bukan dari air laut. Prosesnya dilakukan secara tradisional oleh Masyarakat Adat Lundayeh melalui perebusan hingga kristalisasi, sehingga menghasilkan garam bertekstur kasar, kaya mineral, dan bercita rasa khas. Aktivitas ini memberikan nilai tambah bagi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.

Keberadaan pengolahan tersebut menunjukkan bahwa geliat ekonomi Krayan tidak hanya bertumpu pada perdagangan dan distribusi barang, tetapi juga telah mencakup proses peningkatan nilai melalui kegiatan produksi. Beras adan menjadi komoditas unggulan kecamatan karena selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, produk ini juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke luar wilayah.

Meskipun demikian, pengembangan industri pengolahan masih menghadapi tantangan, terutama terkait aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kelancaran distribusi. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan tetap diperlukan agar kapasitas produksi dan daya saing komoditas unggulan dapat terus meningkat.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Dengan adanya industri pengolahan padi adan, arah pembangunan Krayan perlu bergeser dari semata memperlancar arus barang masuk menjadi memperkuat daya saing barang keluar.



Infrastruktur transportasi tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan kualitas jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta penguatan kapasitas angkutan udara agar distribusi hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, kebijakan perlu difokuskan pada pengembangan rantai nilai beras ada. Modernisasi peralatan pengolahan, peningkatan standar mutu, sertifikasi, dukungan kemasan, hingga perluasan akses pemasaran akan mendorong komoditas ini naik kelas dari produk lokal menjadi produk unggulan yang mampu menembus pasar lebih luas. Penguatan kelembagaan seperti koperasi atau BUMDes dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pasokan.

Terbatasnya fasilitas perdagangan menunjukkan perlunya penciptaan pusat ekonomi baru yang dapat menampung aktivitas jual beli sekaligus distribusi komoditas unggulan. Dengan dukungan tersebut, masyarakat tidak hanya bergantung pada barang dari luar negeri, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari produksi sendiri.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan agar sumber daya manusia lokal mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan industri pengolahan. Penyediaan fasilitas penunjang, pemenuhan tenaga profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat kapasitas wilayah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pembangunan Krayan harus ditempatkan sebagai strategi memperkuat kemandirian ekonomi perbatasan. Ketika komoditas unggulan berkembang, akses membaik, dan layanan publik meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh seiring dengan semakin kuatnya peran wilayah dalam sistem perekonomian nasional.



### 3.5. Kecamatan Krayan Timur

Kecamatan Krayan Timur merupakan satu dari lima kecamatan yang terletak di dataran tinggi Krayan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 1.273,17 km<sup>2</sup> dengan karakteristik topografi berupa dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk serta didukung kondisi lingkungan yang relatif masih alami. Kecamatan Krayan Timur terdiri dari 17 desa dengan luas tiap-tiap desa ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Timur, 2024

No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kampung Baru	3,22	0,25
2	Long Umung	3,42	0,27
3	Pa' Kebuan	3,68	0,29
4	Pa' Betung	183,36	14,40
5	Bungayan	19,28	1,51
6	Wa' Yagung	264,09	20,74
7	Pa' Melade	2,05	0,16
8	Long Sepayang	7,29	0,57
9	Pa' Umung	35,35	2,78
10	Pa' Pawan	4,81	0,38
11	Long Nuat	34,77	2,73



No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Long Tenem	10,22	0,80
13	Pa' Lidung	38,06	2,99
14	Pa' Rangeb	2,09	0,16
15	Pa' Raye	577,92	45,38
16	Pa' Pala	80,40	6,31
17	Sinar Baru	3,58	0,28
	<b>Krayan Timur</b>	<b>1.273,59</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Krayan Timur dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Secara geografis, Krayan Timur berada pada kawasan strategis perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi keterisolasian wilayah menyebabkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan, sehingga mobilitas penduduk dan distribusi logistik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana transportasi yang terbatas. Kecamatan Krayan Timur hanya bisa diakses melalui udara dari wilayah Indonesia, itupun melalui bandara di kecamatan Krayan. Sedangkan untuk akses darat yang terbuka adalah ke Malaysia.

Masyarakat Krayan Timur didominasi oleh suku Dayak dengan kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal. Pada sektor ekonomi, pertanian menjadi mata pencaharian utama, khususnya budidaya padi dataran tinggi yang dikenal memiliki kualitas baik.

Dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, pengembangan wilayah Krayan Timur tetap memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur serta pelayanan publik guna mendorong



pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya PLBN di kecamatan Krayan serta terhubungnya jalan Krayan ke Kabupaten Malinau akan sangat mendukung pengembangan kecamatan Krayan Timur dan konektivitas 5 kecamatan di dataran tinggi Krayan.

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Ketersediaan listrik di Kecamatan Krayan Timur telah menjangkau seluruh desa. Dari total desa yang ada, sebanyak 15 desa mayoritas menggunakan listrik yang bersumber dari PLN dan ada 2 desa yang mayoritas menggunakan sumber listrik non-PLN yaitu menggunakan panel surya, dan tidak ada desa yang belum menikmati aliran listrik

Tabel 3.5.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Timur, 2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	15
Mayoritas listrik non-PLN	2
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Keadaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur ketenagalistrikan di Krayan Timur relatif merata dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.



Tabel 3.5.3 Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Timur, 2025

Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak Ada
Udara	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Akses transportasi antar desa atau ke kecamatan lain di Kecamatan Krayan Timur hanya dapat dilalui melalui moda transportasi darat. Moda transportasi darat merupakan cara utama masyarakat kecamatan Krayan Timur ke kecamatan lain. Tidak ada ada moda transportasi air yang dapat menjangkau wilayah ini mengingat kondisi geografisnya yang berada di dataran tinggi.

Tabel 3.5.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Timur, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan keberadaan fasilitas perhubungan darat, di Kecamatan Krayan Timur tidak terdapat terminal. Baik terminal barang maupun terminal penumpang tercatat tidak tersedia di



wilayah ini. Ketiadaan sarana terminal tersebut menggambarkan bahwa sistem transportasi darat di Krayan Timur masih terbatas dan belum ditunjang oleh fasilitas simpul angkutan resmi. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana mobilitas orang dan distribusi barang berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan energi seperti bahan bakar minyak serta pemanfaatan akses darat menuju wilayah negara tetangga, dan kabupaten Malinau.

Kondisi keterbatasan infrastruktur transportasi tersebut berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Krayan Timur. Pasokan BBM umumnya mengandalkan distribusi melalui jalur udara di kecamatan Krayan sehingga ketersediaannya relatif terbatas dan pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan. Jaringan jalan darat yang sebagian besar masih berupa jalan tanah turut memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat.

Selain itu, penerangan jalan umum (PJU) belum tersedia. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat juga banyak memanfaatkan kendaraan yang berasal dari Malaysia. Hampir seluruh kendaraan roda 4 yang ada di Kecamatan Krayan Timur adalah mobil dari Malaysia. Kedekatan geografis wilayah perbatasan menyebabkan terdapat jalur-jalur darat yang biasa digunakan warga untuk menuju wilayah negara tetangga guna menunjang berbagai kebutuhan.

## **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Kondisi wilayah perbatasan mempengaruhi pola pasokan berbagai komoditas di Kecamatan Krayan Timur. Sejumlah kebutuhan masyarakat tercatat diperoleh melalui suplai dari negara lain, meskipun sebagian komoditas tetap bersumber dari dalam negeri.



Tabel 3.5.5 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Timur, 2025

Komoditas	Keadaan Pasokan Komoditas dari Negara Lain	Sumber Pasokan Komoditas
(1)	(2)	(3)
Sembako	Ada	Mayoritas dari negara lain
Elpiji	Ada	Mayoritas dari negara lain
Bahan Bakar Minyak	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Alat Transportasi	Ada	Mayoritas dari negara lain
Hasil Pertanian	Tidak Ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Pakaian	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Bahan Bangunan	Ada	Mayoritas dari negara lain

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komoditas sembako dan elpiji tersedia, dengan mayoritas pasokannya berasal dari negara lain. Demikian pula alat transportasi serta bahan bangunan, yang sebagian besar dipenuhi melalui sumber di luar negeri. Sementara itu, bahan bakar minyak juga tersedia, namun mayoritas didatangkan dari dalam negeri. Berbeda dengan komoditas lainnya, hasil pertanian tidak dipasok dari negara lain karena seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Kecamatan Krayan Timur justru menjual hasil pertanian unggulannya ke negara lain. Adapun untuk pakaian, ketersediaannya ada dengan mayoritas pasokan berasal dari dalam negeri.

Gambaran ini menunjukkan bahwa interaksi lintas batas memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan



masyarakat Krayan Timur, terutama bagi beberapa komoditas tertentu, sementara pada komoditas lainnya ketergantungan terhadap pasokan domestik masih dominan.

Tabel 3.5.6 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Timur, 2025

<b>Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan</b>	<b>Persentase Pasokan Komoditas Perdagangan (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Lokal	10,00
Kecamatan Lain	10,00
Kabupaten/ Kota Lain	20,00
Negara Lain	60,00

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komposisi sumber pasokan komoditas perdagangan di Kecamatan Krayan Timur menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah masih cukup besar. Pasokan yang berasal dari negara lain mendominasi dengan kontribusi sebesar 60,00 persen. Sementara itu, pasokan dari lokal memberikan andil sebesar 10,00 persen. Adapun pasokan yang bersumber dari kabupaten/kota lain tercatat sebesar 10,00 persen, sedangkan dari kecamatan lain relatif kecil, yakni 10,00 persen.

Gambaran ini menegaskan kuatnya peran perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan komoditas di Krayan Timur dibandingkan dengan suplai dari wilayah sekitarnya di dalam negeri.

Ketersediaan fasilitas ekonomi di Kecamatan Krayan Timur masih sangat terbatas. Dari berbagai jenis sarana perdagangan dan akomodasi, hanya terdapat satu pasar dengan bangunan semi permanen yang menjadi pusat aktivitas jual beli masyarakat. Tidak



terdapat kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, pasar tanpa bangunan, dan juga minimarket.

Tabel 3.5.7 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Timur, 2025

Fasilitas Ekonomi	Jumlah
(1)	(2)
Kelompok Pertokoan	0
Pasar dengan Bangunan Permanen	0
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	1
Pasar tanpa Bangunan	0
Minimarket	0
Rumah Makan	0
Kedai Makan	1
Hotel	0
Penginapan	1
Toko Kelontong	

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Untuk fasilitas konsumsi, tidak ditemukan rumah makan, namun terdapat satu warung/kedai makan yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pada sektor akomodasi, terdapat 1 penginapan. Adapun toko kelontong terdapat ... unit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada sarana yang sederhana dengan jumlah yang terbatas.



## PARIWISATA

Potensi pariwisata di Kecamatan Krayan Timur masih berskala terbatas. Tercatat terdapat dua objek daya tarik wisata, yaitu Batu Narit yaitu benda cagar budaya tingkat nasional yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada 2025. Batu ini merupakan peninggalan bersejarah berbentuk batu pahatan/ukiran yang berusia lebih dari 50 tahun dan mewakili gaya pertahanan/kebudayaan masyarakat Dayak di wilayah Krayan. Objek daya tarik wisata selanjutnya adalah Air Terjun Pa' Remayo yang terletak di desa Pa' Betung. Keindahan alam dan sejuknya air pegunungan krayan ditawarkan oleh objek wisata satu ini.

Ke depan, pengembangan pariwisata di Krayan Timur diharapkan memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, antara lain melalui kebijakan yang mendorong kemajuan sektor pariwisata, peningkatan promosi, penyediaan permodalan, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas daya tarik wilayah sekaligus meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat kecamatan Krayan Timur.

## PENDIDIKAN

Tabel 3.5.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Timur, 2025

Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Pendidikan Anak Usia Dini	4
Taman Kanak-Kanak	0
<i>Raudhatul Athfall Bustanul Athfal</i>	0



Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Sekolah Dasar	6
Madrasah <i>Ibtidaiyah</i>	0
Sekolah Menengah Pertama	1
Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	0
Sekolah Menengah Atas	0
Madrasah <i>Aliyah</i>	0
Sekolah Menengah Kejuruan	0
Perguruan Tinggi	1

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Krayan Timur mencakup beberapa jenjang, dan seluruh desa tercatat telah dapat mengakses layanan pendidikan tersebut. Fasilitas yang tersedia meliputi empat unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta enam unit Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan menengah, terdapat satu unit Sekolah Menengah Pertama. Pada jenjang tingkat perguruan tinggi terdapat 1 perguruan tinggi di Krayan Timur.

Sementara itu, fasilitas pendidikan berbasis madrasah, baik *Raudhatul Athfal* *Bustanul Athfal*, Madrasah *Ibtidaiyah*, Madrasah *Tsanawiyah*, maupun Madrasah *Aliyah* belum tersedia. Kecamatan terdekat dari Kecamatan Krayan Timur yang terdapat fasilitas tersebut adalah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang dapat diakses melalui udara lewat kecamatan Krayan.



Gambaran tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar hingga menengah atas telah tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh desa, meskipun pilihan jenis satuan pendidikan masih relatif terbatas. Tetapi belum adanya sekolah menengah atas di kecamatan ini menjadi satu hal yang perlu perhatian dari pemerintah.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana pendidikan di Kecamatan Krayan Timur masih menghadapi beberapa keterbatasan. Dukungan air, listrik dan akses internet telah tersedia sehingga dapat membantu proses belajar mengajar serta kebutuhan administrasi pendidikan. Namun demikian, fasilitas internet pada sarana pendidikan tercatat masih mengandalkan *starlink* yang mempunyai keterbatasan banyaknya pengguna.

Tabel 3.5.9 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Timur, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Ada (starlink)

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Di tengah kondisi tersebut, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tetap terjaga. Penduduk usia sekolah pada umumnya tidak menunjukkan kecenderungan untuk meninggalkan pendidikan demi bekerja, sehingga keberlangsungan kegiatan belajar masih menjadi prioritas bagi keluarga di wilayah ini.



## KESEHATAN

Pada tahun 2025, ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Timur masih didominasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang sangat minim. Tercatat terdapat 4 puskesmas pembantu saja yang tersebar untuk mendekatkan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 3.5.10 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Timur, 2025

Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	0
Rumah Sakit Bersalin	0
Puskesmas dengan Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Tanpa Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Pembantu	4
Poliklinik	0
Tempat Praktek Dokter	0
Rumah Bersalin	0
Tempat Praktek Bidan	0
Poskesdes	0
Polindex	0
Apotek	0
Toko Obat	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Sementara itu, berbagai fasilitas kesehatan lainnya belum tersedia di wilayah ini. Tidak terdapat rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, poliklinik, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, apotek, maupun toko obat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat di Krayan Timur masih sangat kurang dengan hanya bertumpu pada keberadaan puskesmas pembantu.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Timur masih menghadapi keterbatasan. Dukungan air dan listrik telah tersedia pada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga membantu pelaksanaan layanan medis maupun administrasi. Sedangkan untuk fasilitas internet belum tersedia di faskes Krayan Timur.

Tabel 3.5.11 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Timur, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain keterbatasan sarana, jumlah tenaga kesehatan juga masih relatif kurang dibandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada situasi tertentu, sebagian kecil warga memilih mencari pengobatan ke luar negeri sebagai alternatif untuk memperoleh pelayanan kesehatan.



Gambaran tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan dukungan infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kesehatan masih menjadi kebutuhan penting di Krayan Timur.

## **INDUSTRI PENGOLAHAN**

Kegiatan industri pengolahan di Kecamatan Krayan Timur telah berkembang terutama pada komoditas pertanian lokal. Salah satu yang menonjol adalah pengolahan padi adan menjadi beras adan, yang dikenal luas sebagai produk khas kawasan Krayan Timur. Selain beras adan, Kecamatan mempunyai industri pembuatan gula dari tebu. Aktivitas ini memberikan nilai tambah bagi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.

Keberadaan pengolahan tersebut menunjukkan bahwa geliat ekonomi Krayan Timur tidak hanya bertumpu pada perdagangan dan distribusi barang, tetapi juga telah mencakup proses peningkatan nilai melalui kegiatan produksi. Beras adan menjadi komoditas unggulan kecamatan karena selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, produk ini juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke luar wilayah dan luar negeri.

Meskipun demikian, pengembangan industri pengolahan masih menghadapi tantangan, terutama terkait aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kelancaran distribusi. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan tetap diperlukan agar kapasitas produksi dan daya saing komoditas unggulan dapat terus meningkat.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Dengan adanya industri pengolahan padi adan dan produksi garam gunung, arah pembangunan Krayan Timur perlu bergeser dari semata memperlancar arus barang masuk menjadi memperkuat daya saing barang keluar. Infrastruktur transportasi tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan kualitas jalan, penyediaan



penerangan jalan umum, serta penguatan kapasitas angkutan udara agar distribusi hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, kebijakan perlu difokuskan pada pengembangan rantai nilai beras adan, gula tebu, serta nanas krayan yang dikenal memiliki rasa yang manis. Modernisasi peralatan pengolahan, peningkatan standar mutu, sertifikasi, dukungan kemasan, hingga perluasan akses pemasaran akan mendorong komoditas ini naik kelas dari produk lokal menjadi produk unggulan yang mampu menembus pasar lebih luas. Penguatan kelembagaan seperti koperasi atau BUMDes dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pasokan.

Terbatasnya fasilitas perdagangan menunjukkan perlunya penciptaan pusat ekonomi baru yang dapat menampung aktivitas jual beli sekaligus distribusi komoditas unggulan. Dengan dukungan tersebut, masyarakat tidak hanya bergantung pada barang dari luar negeri, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari produksi sendiri.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan agar sumber daya manusia lokal mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan industri pengolahan. Penyediaan fasilitas penunjang, pemenuhan tenaga profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat kapasitas wilayah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pembangunan Krayan Timur harus ditempatkan sebagai strategi memperkuat kemandirian ekonomi perbatasan. Ketika komoditas unggulan berkembang, akses membaik, dan layanan publik meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh seiring dengan semakin kuatnya peran wilayah dalam sistem perekonomian nasional.



### 3.6. Kecamatan Krayan Barat

Kecamatan Krayan Barat merupakan satu dari lima kecamatan yang terletak di dataran tinggi Krayan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 307,22,17 km<sup>2</sup> dengan karakteristik topografi berupa dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk serta didukung kondisi lingkungan yang relatif masih alami. Kecamatan Krayan Barat terdiri dari 17 desa dengan luas tiap-tiap desa ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Krayan Barat, 2024

No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pa' Inan	21,73	7,08
2	Pa' Mulak	4,61	1,50
3	Long Mangan	15,89	5,18
4	Long Kabid	12,00	3,91
5	Pa' Butal	10,37	3,38
6	Pa' Urud	9,94	3,24
7	Pa' Kemut	6,69	2,18
8	Buduk Kubul	21,24	6,92
9	Long Tugul	42,56	13,88
10	Long Puak	10,82	3,53
11	Lembudud	110,11	35,90



No	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Pa' Delung	4,35	1,42
13	Pa' Kidang	1,26	0,41
14	Lembada	1,36	0,44
15	Liang Turan	4,27	1,39
16	Liang Aliq	0,72	0,23
17	Pa' Payak	0,91	0,30
18	Pa' Mering	7,62	2,48
19	Lepatar	1,88	0,61
20	Liang Bua	2,53	0,82
21	Pa' Pirit	1,32	0,43
22	Ma' Libu	7,19	2,34
23	Pa' Lutut	5,27	1,72
24	Sembudud	0,38	0,12
25	Pa' Pani	1,71	0,56
	<b>Krayan Barat</b>	<b>306,73</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Krayan Barat dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Secara geografis, Krayan Barat berada pada kawasan strategis perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi keterisolasian wilayah menyebabkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan, sehingga mobilitas penduduk dan distribusi logistik sangat dipengaruhi oleh



ketersediaan sarana transportasi yang terbatas. Kecamatan Krayan Barat hanya bisa diakses melalui udara dari wilayah Indonesia, itupun melalui bandara di kecamatan Krayan. Sedangkan untuk akses darat yang terbuka adalah ke Malaysia.

Masyarakat Krayan Barat didominasi oleh suku Dayak dengan kehidupan sosial yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal. Pada sektor ekonomi, pertanian menjadi mata pencaharian utama, khususnya budidaya padi dataran tinggi yang dikenal memiliki kualitas baik.

Dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, pengembangan wilayah Krayan Barat tetap memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur serta pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya PLBN di kecamatan Krayan serta terhubungnya jalan Krayan ke Kabupaten Malinau akan sangat mendukung pengembangan kecamatan Krayan Barat dan konektivitas 5 kecamatan di dataran tinggi Krayan.

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Ketersediaan listrik di Kecamatan Krayan Barat telah menjangkau seluruh desa. Dari total desa yang ada, sebanyak 25 desa atau semua desa menggunakan listrik yang bersumber dari PLN.

Tabel 3.6.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Krayan Barat, 2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	25
Mayoritas listrik non-PLN	0



<b>Sumber Listrik di Desa</b>	<b>Jumlah Desa</b>
(1)	(2)
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Keadaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur ketenagalistrikan di Krayan Barat relatif merata dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 3.6.3 Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Krayan Barat, 2025

<b>Akses Transportasi Antar Desa atau ke Kecamatan Lain</b>	<b>Keadaan</b>
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak Ada
Udara	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Akses transportasi antar desa atau ke kecamatan lain di Kecamatan Krayan Barat hanya dapat dilalui melalui moda transportasi darat. Moda transportasi darat merupakan cara utama masyarakat kecamatan Krayan Barat ke kecamatan lain. Tidak ada ada moda transportasi udara dari kecamatan Krayan Barat, akses transportasi udara terdekat adalah ke Kecamatan Krayan. Tidak ada



transportasi air yang dapat menjangkau wilayah ini mengingat kondisi geografisnya yang berada di dataran tinggi.

Tabel 3.6.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Barat, 2025

<b>Jenis Terminal</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan keberadaan fasilitas perhubungan darat, di Kecamatan Krayan Barat tidak terdapat terminal. Baik terminal barang maupun terminal penumpang tercatat tidak tersedia di wilayah ini. Ketiadaan sarana terminal tersebut menggambarkan bahwa sistem transportasi darat di Krayan Barat masih terbatas dan belum ditunjang oleh fasilitas simpul angkutan resmi. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana mobilitas orang dan distribusi barang berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan bahan pokok dan energi seperti bahan bakar minyak serta pemanfaatan akses darat menuju wilayah negara tetangga, dan kabupaten Malinau.

Kondisi keterbatasan infrastruktur transportasi tersebut berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Krayan Barat. Pasokan BBM umumnya mengandalkan distribusi melalui jalur udara di kecamatan Krayan sehingga ketersediaannya relatif terbatas dan pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan. Jaringan jalan darat yang sebagian besar masih berupa jalan tanah turut memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat.



Selain itu, penerangan jalan umum (PJU) belum tersedia. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat juga banyak memanfaatkan kendaraan yang berasal dari Malaysia. Hampir seluruh kendaraan roda 4 yang ada di Kecamatan Krayan Barat adalah mobil dari Malaysia. Kedekatan geografis wilayah perbatasan menyebabkan terdapat jalur-jalur darat yang biasa digunakan warga untuk menuju wilayah negara tetangga guna menunjang berbagai kebutuhan.

## PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

Kondisi wilayah perbatasan mempengaruhi pola pasokan berbagai komoditas di Kecamatan Krayan Barat. Sejumlah kebutuhan masyarakat tercatat diperoleh melalui suplai dari negara lain, meskipun sebagian komoditas tetap bersumber dari dalam negeri.

Tabel 3.6.5 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Krayan Barat, 2025

<b>Komoditas</b>	<b>Keadaan Pasokan Komoditas dari Negara Lain</b>	<b>Sumber Pasokan Komoditas</b>
(1)	(2)	(3)
Sembako	Ada	Mayoritas dari negara lain
Elpiji	Ada	Mayoritas dari negara lain
Bahan Bakar Minyak	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Alat Transportasi	Ada	Roda 2 dari dalam negeri, roda 4 dari Malaysia
Hasil Pertanian	Tidak Ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Pakaian	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Bahan Bangunan	Ada	Mayoritas dari negara lain



Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komoditas sembako dan elpiji tersedia, dengan mayoritas pasokannya berasal dari negara lain. Demikian pula alat transportasi roda 4 serta bahan bangunan, yang sebagian besar dipenuhi melalui sumber di luar negeri. Sementara itu, bahan bakar minyak juga tersedia, namun mayoritas didatangkan dari dalam negeri. Berbeda dengan komoditas lainnya, hasil pertanian tidak dipasok dari negara lain karena seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri. Kecamatan Krayan Barat justru menjual hasil pertanian unggulannya ke negara lain. Adapun untuk pakaian, ketersediaannya ada dengan mayoritas pasokan berasal dari dalam negeri.

Gambaran ini menunjukkan bahwa interaksi lintas batas memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat Krayan Barat, terutama bagi beberapa komoditas tertentu, sementara pada komoditas lainnya ketergantungan terhadap pasokan domestik masih dominan.

Tabel 3.6.6 Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan di Kecamatan Krayan Barat, 2025

<b>Sumber Pasokan Komoditas Perdagangan</b>	<b>Persentase Pasokan Komoditas Perdagangan (%)</b>
(1)	(2)
Lokal	10,00
Kecamatan Lain	10,00
Kabupaten/ Kota Lain	10,00
Negara Lain	70,00

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Komposisi sumber pasokan komoditas perdagangan di Kecamatan Krayan Barat menunjukkan bahwa ketergantungan



terhadap pasokan dari luar wilayah masih cukup besar. Pasokan yang berasal dari negara lain mendominasi dengan kontribusi sebesar 70,00 persen. Sementara itu, pasokan dari lokal memberikan andil sebesar 10,00 persen. Adapun pasokan yang bersumber dari kabupaten/kota lain tercatat sebesar 10,00 persen, sedangkan dari kecamatan lain relatif kecil, yakni 10,00 persen.

Gambaran ini menegaskan kuatnya peran perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan komoditas di Krayan Barat dibandingkan dengan suplai dari wilayah sekitarnya di dalam negeri.

Ketersediaan fasilitas ekonomi di Kecamatan Krayan Barat masih sangat terbatas. Dari berbagai jenis sarana perdagangan, tidak terdapat kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen pasar dengan bangunan semi permanen, pasar tanpa bangunan, serta minimarket.

Tabel 3.6.7 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Krayan Barat, 2025

<b>Fasilitas Ekonomi</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Kelompok Pertokoan	0
Pasar dengan Bangunan Permanen	0
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	0
Pasar tanpa Bangunan	0
Minimarket	0
Rumah Makan	0
Kedai Makan	8
Hotel	0



Fasilitas Ekonomi	Jumlah
(1)	(2)
Penginapan	0
Toko Kelontong	25

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Untuk fasilitas konsumsi, tidak ditemukan rumah makan, namun terdapat dua puluh lima warung/kedai makan yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pada sektor akomodasi tidak terdapat penginapan. Adapun toko kelontong terdapat 25 unit.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Krayan Barat masih bertumpu pada sarana yang sederhana dengan jumlah yang terbatas.

## PARIWISATA

Potensi pariwisata di Kecamatan Krayan Barat masih berskala terbatas. Tercatat terdapat beberapa objek daya tarik wisata, yang pertama Buduk Udan yaitu Bukit tertinggi di kawasan ini yang menawarkan pemandangan menakjubkan, terutama saat matahari terbit atau tertutup kabut, menjadikannya spot favorit wisatawan lokal maupun dari Malaysia. Selamat setahun terakhir, setidaknya ada 20 orang wisatawan mancanegara dari Malaysia yang berkunjung ke objek ini. Perjalanan menuju Buduk Udan melibatkan *trekking* sekitar 5 km melalui jalur yang menyuguhkan keanekaragaman hayati khas Kalimantan. Di kawasan hutan Buduk Udan terdapat flora langka, yaitu *Rafflesia Pricei*. Daya tarik selanjutnya dari kecamatan ini adalah wilayah ini merupakan Gerbang Taman Nasional Kayan Mentarang, wilayah ini menjadi akses menuju kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang yang masih asri. Selain itu, pengalaman berinteraksi dengan masyarakat Dayak Lundayeh dan melihat budidaya beras



organik serta nanas khas krayan merupakan satu hal yang ditawarkan apabila berkunjung ke Kecamatan Krayan Barat.

Ke depan, pengembangan pariwisata di Krayan Barat diharapkan memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, antara lain melalui kebijakan yang mendorong kemajuan sektor pariwisata, peningkatan promosi, penyediaan permodalan, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas daya tarik wilayah sekaligus meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian masyarakat kecamatan Krayan Barat.

## PENDIDIKAN

Tabel 3.6.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Krayan Barat, 2025

Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Pendidikan Anak Usia Dini	7
Taman Kanak-Kanak	0
<i>Raudhatul Athfall Bustanul Athfal</i>	0
Sekolah Dasar	7
Madrasah <i>Ibtidaiyah</i>	0
Sekolah Menengah Pertama	2
Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	0
Sekolah Menengah Atas	0
Madrasah <i>Aliyah</i>	0



Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Sekolah Menengah Kejuruan	0
Perguruan Tinggi	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Krayan Barat mencakup beberapa jenjang, dan seluruh desa tercatat telah dapat mengakses layanan pendidikan tersebut. Fasilitas yang tersedia meliputi tujuh unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta tujuh unit Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan menengah, terdapat dua unit Sekolah Menengah Pertama.

Sementara itu, fasilitas pendidikan berbasis madrasah, baik *Raudhatul Athfall Bustanul Athfal*, *Madrasah Ibtidaiyah*, *Madrasah Tsanawiyah*, maupun *Madrasah Aliyah* belum tersedia. Kecamatan terdekat dari Kecamatan Krayan Barat yang terdapat fasilitas tersebut adalah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan yang dapat diakses melalui udara lewat kecamatan Krayan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar hingga menengah atas telah tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat di seluruh desa, meskipun pilihan jenis satuan pendidikan masih relatif terbatas. Tetapi belum adanya sekolah menengah atas di kecamatan ini menjadi satu hal yang perlu perhatian dari pemerintah.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana pendidikan di Kecamatan Krayan Barat masih menghadapi beberapa keterbatasan. Dukungan air, listrik dan akses internet telah tersedia sehingga dapat membantu proses belajar mengajar serta kebutuhan administrasi pendidikan



Tabel 3.6.9 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Krayan Barat, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Di tengah kondisi tersebut, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tetap terjaga. Penduduk usia sekolah pada umumnya tidak menunjukkan kecenderungan untuk meninggalkan pendidikan demi bekerja, sehingga keberlangsungan kegiatan belajar masih menjadi prioritas bagi keluarga di wilayah ini.

## **KESEHATAN**

Pada tahun 2025, ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Barat masih didominasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang sangat minim. Tercatat terdapat 1 Rumah Sakit dan 4 puskesmas pembantu yang tersedia untuk melayani penduduk Krayan Barat. Khusus untuk Rumah Sakit di Krayan Barat ini menjadi tumpuan masyarakat di wilayah dataran tinggi Krayan.



Tabel 3.6.10 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Krayan Barat, 2025

Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	1
Rumah Sakit Bersalin	0
Puskesmas dengan Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Tanpa Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Pembantu	4
Poliklinik	0
Tempat Praktek Dokter	0
Rumah Bersalin	0
Tempat Praktek Bidan	0
Poskesdes	0
Polindes	0
Apotek	0
Toko Obat	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sementara itu, berbagai fasilitas kesehatan lainnya belum tersedia di wilayah ini. Tidak terdapat rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, poliklinik, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, apotek, maupun toko obat.



Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat di Krayan Barat masih sangat kurang dengan hanya bertumpu pada keberadaan puskesmas pembantu.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana kesehatan di Kecamatan Krayan Barat masih menghadapi keterbatasan. Dukungan air, listrik, dan internet telah tersedia pada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga membantu pelaksanaan layanan medis maupun administrasi.

Tabel 3.6.11 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Krayan Barat, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain keterbatasan sarana, jumlah tenaga kesehatan juga masih relatif kurang dibandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada situasi tertentu, sebagian kecil warga memilih mencari pengobatan ke luar negeri sebagai alternatif untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Gambaran tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan dukungan infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kesehatan masih menjadi kebutuhan penting di Krayan Barat.



## **INDUSTRI PENGOLAHAN**

Kegiatan industri pengolahan di Kecamatan Krayan Barat berkembang pada komoditas pertanian lokal. Salah satu yang menonjol adalah pengolahan padi adan menjadi beras adan, yang dikenal luas sebagai produk khas kawasan Krayan Barat. Aktivitas ini memberikan nilai tambah bagi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.

Keberadaan pengolahan tersebut menunjukkan bahwa geliat ekonomi Krayan Barat tidak hanya bertumpu pada perdagangan dan distribusi barang, tetapi juga telah mencakup proses peningkatan nilai melalui kegiatan produksi. Beras adan menjadi komoditas unggulan kecamatan karena selain memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, produk ini juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke luar wilayah dan luar negeri.

Meskipun demikian, pengembangan industri pengolahan masih menghadapi tantangan, terutama terkait aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kelancaran distribusi. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan tetap diperlukan agar kapasitas produksi dan daya saing komoditas unggulan dapat terus meningkat.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

Dengan adanya industri pengolahan padi adan dan budidaya nanas, arah pembangunan Krayan Barat perlu bergeser dari semata memperlancar arus barang masuk menjadi memperkuat daya saing barang keluar. Infrastruktur transportasi tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan kualitas jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta penguatan kapasitas angkutan udara agar distribusi hasil produksi masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan.

Di sektor ekonomi, kebijakan perlu difokuskan pada pengembangan rantai nilai beras adan, serta nanas krayan yang



dikenal memiliki rasa yang manis. Modernisasi peralatan pengolahan, peningkatan standar mutu, sertifikasi, dukungan kemasan, hingga perluasan akses pemasaran akan mendorong komoditas ini naik kelas dari produk lokal menjadi produk unggulan yang mampu menembus pasar lebih luas. Penguatan kelembagaan seperti koperasi atau BUMDes dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan kesinambungan pasokan.

Terbatasnya fasilitas perdagangan menunjukkan perlunya penciptaan pusat ekonomi baru yang dapat menampung aktivitas jual beli sekaligus distribusi komoditas unggulan. Dengan dukungan tersebut, masyarakat tidak hanya bergantung pada barang dari luar negeri, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari produksi sendiri.

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan agar sumber daya manusia lokal mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan industri pengolahan. Penyediaan fasilitas penunjang, pemenuhan tenaga profesional, serta pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat kapasitas wilayah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pembangunan Krayan Barat harus ditempatkan sebagai strategi memperkuat kemandirian ekonomi perbatasan. Ketika komoditas unggulan berkembang, akses membaik, dan layanan publik meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan tumbuh seiring dengan semakin kuatnya peran wilayah dalam sistem perekonomian nasional.



### 3.7. Kecamatan Lumbis Ogong

#### GAMBARAN UMUM

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dengan luas 1.628,66 km<sup>2</sup> dan karakter geografis yang didominasi aliran sungai serta keterisolasian antarwilayah. Hasil pendataan tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan kecamatan bukan semata pada potensi ekonomi, melainkan pada keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar yang berdampak luas terhadap pelayanan publik, biaya logistik, serta ketergantungan terhadap wilayah dan negara lain.

Kecamatan Lumbis Ogong memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter geografis berbasis sungai dan bukan kawasan pesisir, sehingga pola aktivitas sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbatasan aksesibilitas. Kondisi bentang alam ini menyebabkan biaya distribusi barang, mobilitas penduduk, serta jangkauan layanan publik menjadi tinggi dan tidak efisien, sehingga pendekatan pembangunan memerlukan strategi khusus yang berbasis keterhubungan antara permukiman dan penguatan simpul transportasi air.

Tabel 3.7.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Payang	50	41	91
2	Suyadon	64	55	119



No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tukulon	185	180	365
4	Bulu Mengolom	80	77	157
5	Batung	54	46	100
6	Ubol Sulok	87	83	170
7	Ubol Alung	76	62	138
8	Nansapan	54	45	99
9	Sedalit	31	28	59
10	Tambalang Hilir	44	36	80
11	Paluan	58	49	107
12	Jukup	69	64	133
13	Long Bulu	139	130	269
14	Kalambuku	43	38	81
15	Tadungus	59	63	122



No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Semata	79	76	155
17	Linsayung	23	29	52
18	Salan	68	51	119
19	Sungoi	45	43	88
20	Sinampila I	43	38	81
21	Samunti	93	91	184
22	Sinampila II	98	93	191
23	Limpakon	45	32	77
24	Labuk	144	131	275
25	Sanal	57	57	114
26	Tumantalas	32	29	61
Lumbis Ogong		1.696	1.560	3.256

Sumber: Kecamatan Lumbis Ogong dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan



## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Mobilitas masyarakat saat ini hampir sepenuhnya bergantung pada transportasi air karena belum tersedia akses jalan darat menuju dan dari kecamatan. Transportasi udara memang tersedia, namun frekuensinya hanya sekitar satu kali per minggu dengan tingkat akses menuju bandara yang tergolong sangat sulit. Kondisi ini menyebabkan distribusi barang mahal, tidak pasti, serta membatasi jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.7.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2025

No	Moda	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Jalur darat antar kecamatan	Tidak ada
2	Jalur udara	Tidak
3	Jalur air	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Kondisi konektivitas tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas logistik dan energi. Dalam satu tahun terakhir, kelangkaan BBM tercatat masih terjadi dalam periode 1–3 bulan. Untuk jalur air, bahkan sebagian besar pasokan BBM dinilai kurang dari separuhnya berasal dari dalam negeri. Ketidakpastian distribusi ini memicu kerentanan harga, meningkatkan biaya transportasi, dan memperlemah kegiatan ekonomi produktif.



Tabel 3.7. 3 Kondisi BBM di Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Kelangkaan BBM	Pernah 1-3 bulan terakhir
2	Pasokan dari Indonesia	< 50% (jalur air)
3	Akses ke negara lain melalui moda air	Ada jalur tidak resmi

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Dari sisi elektrifikasi, situasi yang dihadapi menunjukkan kesenjangan layanan dasar yang nyata. Hanya sebagian kecil desa yang menikmati listrik PLN, sementara desa lainnya mengandalkan genset dengan jam nyala terbatas, bahkan masih terdapat desa yang belum teraliri listrik sama sekali. Ketiadaan penerangan jalan umum serta lemahnya jaringan internet termasuk di pusat kecamatan semakin memperkuat hambatan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pemerintahan modern.

Tabel 3.7.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama

No	Sumber Listrik Utama	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)
1	PLN	3
2	Non PLN	4



3	Genset	14
4	Tidak ada listrik	5

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Ketersediaan infrastruktur di Lumbis Ogong menunjukkan tingkat isolasi wilayah yang berat, ditandai tidak adanya akses jalan darat, terbatasnya transportasi udara, dominannya penggunaan transportasi sungai, masih banyak desa bergantung pada genset, serta pasokan BBM yang kerap mengalami kelangkaan. Situasi ini menjadi akar dari mahalunya logistik, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga intervensi konektivitas dan elektrifikasi menjadi kebutuhan paling mendesak dan menentukan keberhasilan pembangunan sektor lainnya.

## **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Dalam sektor perdagangan, struktur pasokan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat lebih banyak dipenuhi dari luar wilayah. Separuh barang berasal dari kecamatan lain, sementara kontribusi produksi lokal masih relatif kecil. Ketergantungan terhadap negara tetangga masih terlihat terutama pada komoditas strategis seperti sembako dan LPG, dan masyarakat menilai tingkat ketergantungan tersebut sudah berada pada kategori tinggi. Walaupun demikian, penggunaan rupiah dalam transaksi telah dominan. Ini merupakan fondasi penting bagi penguatan integrasi ekonomi nasional apabila didukung dengan perbaikan distribusi dari dalam negeri.



Tabel 3.7.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain

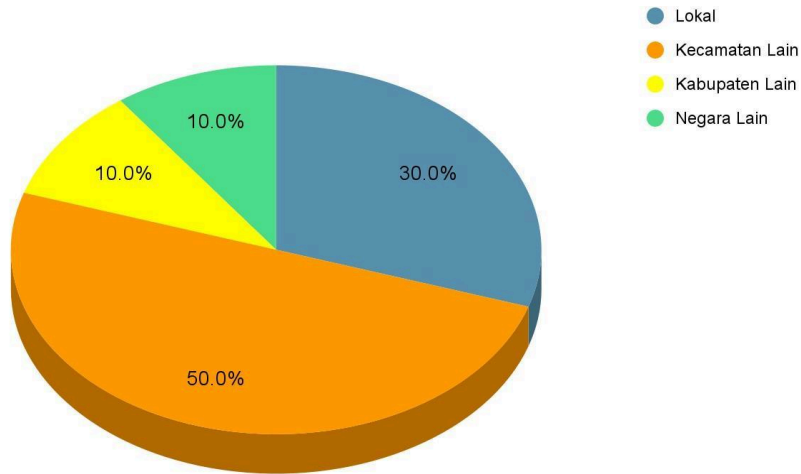
No	Komoditas	Keberadaan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sembako	Ada	30%
2	LPG	Ada	40%
3	Pakaian	Ada	10%

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Struktur pasokan barang di Kecamatan Lumbis Ogong masih didominasi oleh suplai dari kecamatan lain sebesar 50 persen, menunjukkan kuatnya ketergantungan terhadap wilayah di luar kecamatan akibat keterbatasan produksi dan distribusi lokal. Kontribusi pasokan dari dalam kecamatan sendiri baru mencapai 30 persen, sementara dari kabupaten lain dan negara lain masing-masing sebesar 10 persen. Komposisi ini mengindikasikan bahwa penguatan konektivitas dan peningkatan kapasitas produksi lokal menjadi faktor penting untuk mengurangi ketergantungan eksternal serta meningkatkan kemandirian ekonomi wilayah.



Gambar 3.8 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang



Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Disisi lain, Lumbis Ogong memiliki modal ekonomi primer yang menjanjikan. Komoditas seperti ubi/singkong, padi ladang, buah-buahan terutama durian, kelapa sawit, hasil hutan seperti rotan, serta perikanan sungai berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal. Namun tanpa akses transportasi memadai, komoditas tersebut sulit dipasarkan secara kompetitif. Akibatnya, kegiatan ekonomi berhenti pada tahap produksi primer dengan nilai tambah minimal, sementara peluang pengolahan dan hilirisasi belum tumbuh.

Aktivitas perdagangan di kecamatan ini memperlihatkan penggunaan rupiah yang dominan, namun secara struktural masyarakat masih sangat tergantung pada pasokan barang dari luar wilayah bahkan dari negara tetangga, khususnya untuk sembako dan LPG. Lemahnya rantai distribusi domestik akibat kendala transportasi membuat produk lokal belum mampu menjadi penopang utama kebutuhan masyarakat, sehingga wilayah ini rentan terhadap gangguan suplai, fluktuasi harga, serta potensi berkembangnya jalur perdagangan informal lintas batas.



## PARIWISATA

Di bidang pariwisata, potensi berbasis alam sungai telah teridentifikasi dan bahkan terdapat kegiatan yang melibatkan pihak lintas negara. Namun minimnya infrastruktur membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih sangat rendah. Aspirasi masyarakat pun jelas: kebutuhan utama yang diharapkan dari pemerintah adalah pembangunan jalan darat sebagai pintu masuk perkembangan ekonomi.

Tabel 3.7.6 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Objek wisata	Ada (sungai)
2	Event tahunan	Ada
3	Melibatkan negara lain	Ada
4	Kunjungan Warga Negara Asing (WNA)	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Walaupun memiliki potensi wisata berbasis alam seperti sungai serta adanya penyelenggaraan event termasuk yang melibatkan negara lain, perkembangan pariwisata belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena rendahnya aksesibilitas, minimnya sarana pendukung, dan terbatasnya promosi. Tanpa pembenahan konektivitas dan infrastruktur dasar, potensi wisata akan tetap menjadi aset laten yang belum mampu dikapitalisasi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi masyarakat.



## PENDIDIKAN

Sektor pendidikan menghadapi tantangan serius dalam peningkatan kualitas SDM jangka panjang. Walaupun beberapa jenjang pendidikan tersedia, fasilitas pendukung seperti listrik dan internet belum memadai. Selain itu, adanya peluang kerja lintas negara menyebabkan sebagian generasi muda cenderung memilih bekerja dibanding melanjutkan pendidikan. Jika tren ini berlanjut, maka kecamatan berisiko mengalami stagnasi kapasitas SDM, ketergantungan tenaga kerja kasar, serta lambatnya transformasi ekonomi.

Tabel 3.7.7 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taman Kanak-Kanak	-	-
2	Raudatul Athfal (RA)	-	-
3	Sekolah Dasar (SD)	7	7
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	2
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	-
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	1
9	Madrasah Aliyah (MA)	-	-

Sumber: Kecamatan Lumbis Ogong dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Lumbis Ogong relatif terbatas dan tidak mengalami perubahan antara tahun ajaran 2023/2024 dan 2024/2025. Fasilitas yang tersedia didominasi oleh Sekolah Dasar sebanyak 7 unit, diikuti SMP 2 unit dan SMK 1 unit, sementara jenjang lain seperti TK, RA, MI, MTs, SMA, dan MA belum tersedia. Komposisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar relatif terpenuhi, namun pilihan pendidikan lanjutan terutama tingkat menengah atas masih sangat terbatas sehingga berpotensi mendorong peserta didik melanjutkan sekolah ke luar kecamatan atau bahkan tidak melanjutkan pendidikan.



Tabel 3.7.8 Jumlah Siswa dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Tingkat Pendidikan	Siswa	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah Dasar (SD)	322	57
2	Sekolah Mengengah Pertama (SMP)	127	18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Jumlah peserta didik di Kecamatan Lumbis Ogong pada Semester 1 Tahun Ajaran 2025/2026 terkonsentrasi pada jenjang Sekolah Dasar dengan 322 siswa dan 57 guru, sedangkan pada jenjang SMP terdapat 127 siswa dengan 18 guru. Rasio siswa terhadap guru relatif masih dalam batas yang cukup memadai, namun terlihat adanya penurunan jumlah murid yang cukup signifikan dari SD ke SMP. Pola ini dapat mengindikasikan adanya keterbatasan akses atau keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik karena faktor jarak, fasilitas, maupun pilihan masyarakat setelah lulus dari pendidikan dasar.

Tabel 3.7.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Tidak ada
2	Air	Ada
3	Internet	Tidak ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025



Fasilitas pendidikan pada beberapa jenjang telah tersedia, namun kualitas layanan masih menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan listrik dan ketiadaan internet, yang menghambat proses belajar mengajar serta akses terhadap informasi dan teknologi. Di sisi lain, kemudahan peluang kerja di luar negeri mulai memengaruhi pilihan sebagian masyarakat untuk bekerja dibanding melanjutkan pendidikan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan dasar dan insentif agar pendidikan tetap menjadi prioritas.

## KESEHATAN

Pada layanan kesehatan, keberadaan puskesmas dan pustu belum diimbangi kecukupan tenaga dan fasilitas. Sebagian masyarakat masih memilih berobat ke luar negeri. Fenomena ini bukan hanya isu pelayanan, tetapi juga mencerminkan tantangan aksesibilitas, kepercayaan terhadap mutu layanan, dan efektivitas sistem rujukan.

Tabel 3.7.10 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana Kesehatan	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas ramat inap	-
3	Puskesmas tanpa rawat inap	1
4	Puskesmas pembantu	4
5	Apotek	-

Sumber : Statistik Potensi Desa 2025, BPS Kabupaten Nunukan



Ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Lumbis Ogong masih sangat terbatas. Hingga tahun 2025 tercatat belum terdapat rumah sakit, puskesmas rawat inap, maupun apotek, sementara fasilitas yang tersedia hanya satu puskesmas tanpa rawat inap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan lanjutan dan pemenuhan kebutuhan obat-obatan belum dapat dipenuhi di dalam kecamatan, sehingga masyarakat berpotensi harus menempuh perjalanan ke wilayah lain untuk memperoleh layanan medis yang lebih lengkap. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur kesehatan dan sistem rujukan guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi penduduk di wilayah perbatasan.

Tabel 3.7.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Tidak ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Fasilitas pendukung layanan kesehatan di Kecamatan Lumbis Ogong menunjukkan bahwa ketersediaan listrik dan air sudah terpenuhi, namun dukungan konektivitas digital masih menjadi kendala karena belum tersedia akses internet. Ketiadaan internet berimplikasi pada terbatasnya pelaporan kesehatan, koordinasi rujukan, akses informasi medis, hingga peluang penerapan layanan telemedicine. Dengan kondisi geografis yang relatif terisolasi, keberadaan jaringan internet seharusnya menjadi kebutuhan krusial untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.



Keberadaan puskesmas dan fasilitas kesehatan pembantu menunjukkan layanan dasar telah tersedia, tetapi jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang serta belum meratanya dukungan infrastruktur seperti internet membatasi mutu pelayanan dan sistem rujukan. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat mencari pengobatan ke luar negeri, sehingga penguatan SDM kesehatan, ketersediaan obat, dan pemanfaatan layanan kesehatan berbasis teknologi menjadi agenda penting.

## INDUSTRI PENGOLAHAN

Tabel 3.7.12 Potensi Komoditas Unggulan Menurut Sektor Ekonomi

No	Sektor	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman pangan	Ubi, padi ladang
2	Hortikultura	Durian
3	Perkebunan	Kelapa sawit
4	Perikanan darat	Ikan sungai
5	Hasil kehutanan kayu	Kayu ulin
6	Hasil kehutanan non kayu	Rotan, madu dan hasil buruan

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Struktur ekonomi Kecamatan Lumbis Ogong masih didominasi oleh sektor primer dengan komoditas utama meliputi ubi dan padi ladang pada tanaman pangan, durian pada hortikultura, kelapa sawit pada perkebunan, ikan sungai pada perikanan darat, serta hasil kehutanan seperti kayu ulin, rotan, madu, dan hasil



buruan. Keragaman sumber daya ini menunjukkan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan di tingkat lokal. Namun tanpa dukungan konektivitas, teknologi, dan akses pasar, komoditas tersebut cenderung dipasarkan dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi yang dinikmati masyarakat masih terbatas.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dimulai dari kondisi isolasi wilayah yang berdampak pada mahalnya logistik, tingginya ketergantungan pasokan luar, terbatasnya layanan publik, dan lambatnya transformasi ekonomi, maka arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada intervensi yang bersifat *unlocking system* atau membuka keterisolasian wilayah.

- a. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Transportasi, Khususnya dalam pembangunan jembatan dari Mansalong ke Tau Lumbis untuk peningkatan infrastruktur antar Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu
- b. Prioritas Utama: Membuka Konektivitas Darat  
Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik harus ditempatkan sebagai program strategis lintas pemerintahan. Jalan darat akan menurunkan biaya angkut, memperlancar distribusi barang, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta menarik investasi masuk. Tanpa kehadiran jalan, program sektoral lain berisiko tidak efektif.
- c. Percepatan Elektrifikasi dan Energi  
Ketergantungan pada genset dan listrik terbatas pada malam hari menghambat kegiatan ekonomi, pendidikan, serta layanan kesehatan. Penyediaan listrik yang andal akan memperpanjang jam produktif masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
- d. Penyediaan Infrastruktur Digital & Telekomunikasi



Internet bukan lagi fasilitas tambahan, tetapi infrastruktur dasar untuk pendidikan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi. Tanpa konektivitas digital, wilayah akan semakin tertinggal.

- e. Penguatan Rantai Pasok Domestik  
Karena ketergantungan barang dari luar masih tinggi, perlu strategi agar suplai dari dalam negeri lebih kompetitif.
- f. Hilirisasi Komoditas Lokal  
Komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan tersedia, namun belum memberi nilai tambah maksimal.
- g. Penguatan Layanan Dasar  
Perbaikan akses harus diikuti peningkatan kualitas SDM.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa isu sentral pembangunan Lumbis Ogong adalah isolasi wilayah. Selama hambatan konektivitas belum teratasi, maka perbaikan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan lambat. Prioritas kebijakan dengan daya ungkit terbesar adalah pembukaan akses jalan darat strategis, perluasan layanan listrik dan telekomunikasi, penguatan transportasi perintis, serta hilirisasi komoditas unggulan lokal. Intervensi pada sektor-sektor ini diyakini mampu menurunkan biaya logistik, mengurangi ketergantungan lintas negara, serta mempercepat transformasi ekonomi kawasan perbatasan.



### **3.8. Kecamatan Lumbis Pansiangan**

Kecamatan Lumbis Pansiangan merupakan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Kabupaten Nunukan dengan jumlah penduduk 1.697 jiwa yang tersebar di 13 desa. Wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai beranda depan negara, namun masih menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta pelayanan dasar. Konektivitas antar desa masih belum optimal, di mana sebagian wilayah masih bergantung pada transportasi sungai dan kondisi jalan darat yang terbatas. Pemerataan listrik dan telekomunikasi juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Dari sisi ekonomi, masyarakat bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat dengan aktivitas perdagangan yang masih berskala kecil. Potensi perdagangan lintas batas dan pengembangan industri kecil berbasis komoditas lokal menjadi peluang yang perlu dioptimalkan.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, fasilitas serta tenaga layanan masih terbatas dan memerlukan penguatan, terutama dalam pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan serta peningkatan sarana prasarana pendukung. Sementara itu, potensi pariwisata alam dan budaya lokal cukup menjanjikan, namun belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan akses dan fasilitas. Ke depan, arah pembangunan Kecamatan Lumbis Pansiangan difokuskan pada penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

#### **GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Lumbis Pansiangan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berada di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Letaknya yang strategis menjadikan kecamatan ini memiliki peran penting dalam konteks pertahanan, keamanan, serta interaksi sosial ekonomi lintas batas. Secara geografis, wilayahnya didominasi oleh perbukitan dan



aliran sungai, dengan akses transportasi yang masih terbatas dan sebagian besar bergantung pada jalur sungai serta jalan darat dengan kondisi tertentu.

Jumlah penduduk di Lumbis Pansiangan relatif lebih sedikit dibandingkan kecamatan pesisir di Kabupaten Nunukan. Kepadatan penduduk tergolong rendah dengan persebaran desa yang berjauhan. Komposisi masyarakat didominasi oleh penduduk lokal dan masyarakat adat, dengan kehidupan sosial yang masih kuat menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal.

Tabel 3.8.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Lumbis Pansiangan Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sumentobol	62	61	123
2	Nantukidan	63	54	116
3	Labang	49	50	99
4	Sumantipal	120	104	224
5	Ngawol	130	117	247
6	Bululaun Hilir	42	45	87
7	Lagas	46	46	92
8	Tantalujuk	65	55	120



No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Panas	67	67	134
10	Kuyo	45	45	90
11	Bokok	33	26	59
12	Tambalang Hulu	91	81	172
13	Langgason	63	71	134
<b>Lumbis Pansiangan</b>		<b>875</b>	<b>822</b>	<b>1.697</b>

Sumber : Kecamatan Lumbis Pansiangan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Dari sisi perekonomian, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian ladang, perkebunan rakyat, serta pemanfaatan sumber daya alam setempat. Komoditas seperti padi ladang, sayuran, dan tanaman perkebunan menjadi sumber penghasilan utama. Aktivitas perdagangan masih berskala kecil dan dipengaruhi oleh kondisi distribusi barang yang bergantung pada akses transportasi. Kedekatan dengan wilayah perbatasan juga memengaruhi dinamika harga dan arus barang kebutuhan pokok.

Dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta jaringan listrik dan telekomunikasi sudah tersedia namun belum sepenuhnya merata di seluruh desa. Peningkatan konektivitas jalan dan transportasi menjadi salah satu kebutuhan utama guna mendukung percepatan pembangunan wilayah. Dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategisnya,



Lumbis Pansiangan memiliki peluang untuk berkembang lebih maju apabila didukung oleh penguatan infrastruktur dan peningkatan akses layanan dasar masyarakat.

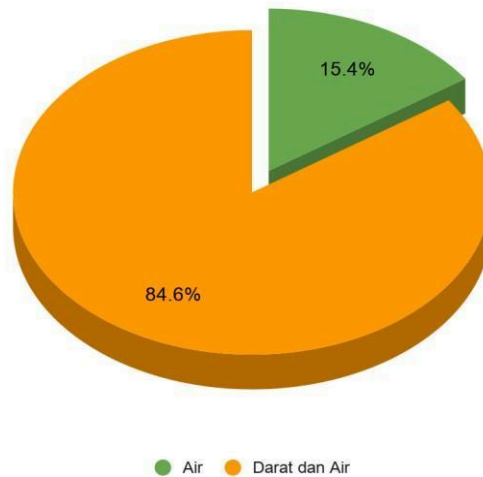
## **TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR**

Di Lumbis Pansiangan, infrastruktur transportasi masih menjadi tantangan utama pembangunan wilayah. Akses jalan darat yang ada belum terhubung secara menyeluruh ke semua desa dan sering kali tergantung pada kondisi cuaca serta kondisi fisik jalan itu sendiri. Banyak desa terutama di bagian interior masih sangat mengandalkan transportasi sungai menggunakan perahu karena jalan darat belum memadai atau tidak tersedia. Transportasi sungai melalui Sungai Pansiangan menjadi urat nadi pergerakan barang dan orang antar desa. Namun sarana ini memerlukan biaya yang cukup tinggi dan butuh waktu lama, sehingga membebani kebutuhan logistik dan mobilitas masyarakat.

Beberapa ruas jalan utama masih mengalami masalah kerusakan atau bahkan terputus akibat longsor dan hujan deras, yang membuat akses antar desa menjadi terganggu. Situasi ini sering kali mempengaruhi kegiatan sosial ekonomi warga, terutama ketika distribusi barang kebutuhan pokok terhambat. Menurut pendataan pembangunan wilayah perbatasan, Lumbis Pansiangan termasuk kecamatan yang belum memiliki fasilitas transportasi darat umum yang lengkap seperti terminal penumpang atau fasilitas barang yang terorganisir. Hanya beberapa kecamatan di kawasan perbatasan yang memiliki infrastruktur tersebut, sementara Lumbis Pansiangan belum termasuk di antaranya.



Gambar 3.9 Persentase Desa/Keluarahan Berdasarkan Jenis Sarana Transportasi di Kecamatan Lumbis Pansiangan Tahun 2025

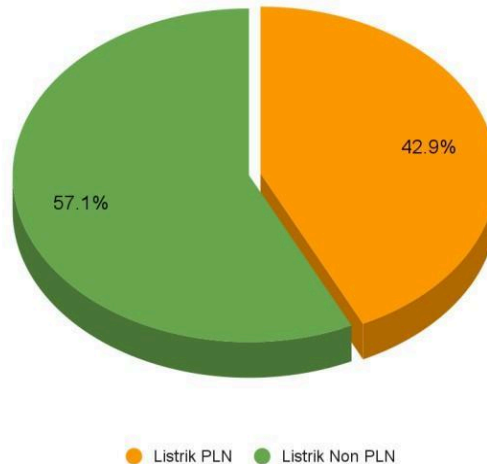


Sumber : Statistik Potensi Desa 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi biaya angkut barang melalui jalur sungai (SOA) guna membantu distribusi barang ke wilayah Lumbis Pansiangan. Program ini bertujuan untuk meringankan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah perbatasan yang sulit dijangkau. Selain transportasi fisik, infrastruktur dasar seperti listrik, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas pelayanan publik masih dalam tahap pengembangan dan belum merata di seluruh desa. Hal ini turut mempengaruhi mobilitas informasi dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat di kecamatan ini.



Gambar 3.10 Persentase Desa Berdasarkan Sumber Penggunaan Listrik di Kecamatan Lumbis Pansiangan Tahun 2025



Sumber : Statistik Potensi Desa 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa 57,1 persen desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan pada tahun 2025 menggunakan listrik Non-PLN, sedangkan 42,9 persen desa telah menggunakan listrik PLN. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih bergantung pada sumber listrik non-PLN, seperti genset, panel surya, atau pembangkit mandiri lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jaringan listrik PLN belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan secara merata. Ketergantungan pada listrik non-PLN umumnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang berada di daerah perbatasan dan relatif terpencil. Secara umum, data ini menggambarkan bahwa pemerataan layanan kelistrikan masih menjadi tantangan di Kecamatan Lumbis Pansiangan dan memerlukan penguatan pembangunan jaringan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.



## **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Kondisi pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Lumbis Pansiangan masih berskala kecil dan tersebar di beberapa desa yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kegiatan perdagangan umumnya terpusat di sekitar kantor desa, pasar sederhana, atau titik persimpangan jalan utama. Bentuk usahanya didominasi oleh warung kelontong, kios kebutuhan pokok, serta pedagang kecil yang melayani kebutuhan harian masyarakat seperti sembako, bahan makanan, dan perlengkapan rumah tangga.

Skala aktivitas perdagangan relatif terbatas karena jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dan daya beli masyarakat yang masih berkembang. Distribusi barang sangat dipengaruhi oleh kondisi transportasi yang sebagian masih mengandalkan jalur sungai maupun jalan darat dengan akses terbatas. Hal ini menyebabkan biaya angkut cukup tinggi sehingga berdampak pada harga barang yang cenderung lebih mahal dibandingkan wilayah yang aksesnya lebih mudah.

Sektor jasa di Kecamatan Lumbis Pansiangan juga masih bersifat dasar dan sederhana. Jenis jasa yang berkembang antara lain jasa transportasi lokal (perahu dan kendaraan roda dua), bengkel kecil, warung makan, serta jasa pengisian pulsa dan kebutuhan komunikasi. Layanan jasa keuangan formal maupun jasa profesional masih terbatas, sehingga masyarakat sering harus mengakses layanan tersebut ke pusat kecamatan atau ke ibu kota kabupaten.

Secara umum, kondisi pusat perdagangan dan jasa di Lumbis Pansiangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lokal masih bertumpu pada usaha mikro dan kebutuhan dasar masyarakat. Pengembangan sektor ini sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur transportasi, konektivitas antar desa, serta dukungan distribusi logistik guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis di wilayah perbatasan tersebut.



## PARIWISATA

Kondisi pariwisata di Kecamatan Lumbis Pansiangan masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi sektor unggulan perekonomian daerah. Wilayah ini memiliki karakter alam yang masih asri, didominasi oleh hutan, perbukitan, dan aliran sungai yang berpotensi dikembangkan sebagai wisata alam. Keindahan lanskap pedalaman dan suasana perbatasan memberikan daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan yang menyukai konsep ekowisata dan petualangan alam. Selain potensi alam, Lumbis Pansiangan juga memiliki kekayaan budaya lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata. Tradisi adat, kearifan lokal, serta kehidupan masyarakat yang masih kuat dengan nilai-nilai budaya menjadi potensi untuk pengembangan wisata berbasis budaya dan komunitas. Pengalaman tinggal di desa (live in), pengenalan adat istiadat, serta produk kerajinan lokal dapat menjadi bagian dari paket wisata yang menarik apabila dikelola dengan baik.

Namun demikian, pengembangan pariwisata di kecamatan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Akses transportasi yang terbatas, minimnya fasilitas pendukung seperti penginapan dan sarana informasi wisata, serta kurangnya promosi menjadi kendala utama. Hingga saat ini, kunjungan wisata masih bersifat lokal dan belum terorganisir secara optimal. Secara umum, pariwisata di Kecamatan Lumbis Pansiangan memiliki potensi yang cukup besar namun belum tergarap secara maksimal. Dengan peningkatan infrastruktur, promosi yang lebih luas, serta pengembangan wisata berbasis masyarakat, sektor pariwisata berpeluang menjadi salah satu alternatif sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan tersebut. Secara umum, pariwisata di Kecamatan Lumbis Pansiangan memiliki potensi yang cukup besar namun belum tergarap secara maksimal. Dengan peningkatan infrastruktur, promosi yang lebih luas, serta pengembangan wisata berbasis masyarakat, sektor pariwisata berpeluang menjadi salah satu alternatif sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan tersebut.



Disamping itu, kondisi pariwisata di Kecamatan Lumbis Pansiangan memiliki keterkaitan strategis dengan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang sebagai pintu gerbang perbatasan Indonesia–Malaysia. PLBN Labang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pemeriksaan lintas batas, tetapi juga berpotensi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi dan pariwisata wilayah. Keberadaan infrastruktur ini membuka peluang meningkatnya mobilitas orang, termasuk wisatawan lintas batas, yang dapat mendorong berkembangnya sektor jasa dan perdagangan lokal.

Dari sisi potensi, kawasan sekitar PLBN Labang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata perbatasan yang unik, dengan mengangkat tema wisata perbatasan, wisata alam pedalaman, dan wisata budaya lokal. Wisatawan yang melintas dapat diarahkan untuk menikmati keindahan alam sungai dan perbukitan di Lumbis Pansiangan, serta mengenal tradisi dan kehidupan masyarakat setempat. Dengan pengemasan yang baik, kawasan ini berpotensi menjadi destinasi wisata tematik berbasis perbatasan. Namun demikian, optimalisasi pariwisata yang terhubung dengan PLBN Labang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur pendukung seperti akses jalan yang memadai, fasilitas penginapan, rumah makan, pusat oleh-oleh, serta sarana informasi wisata. Tanpa dukungan fasilitas tersebut, potensi pergerakan orang melalui PLBN belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kunjungan wisata.

## **PENDIDIKAN**

Kondisi pendidikan di Kecamatan Lumbis Pansiangan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh wilayah pedalaman dan perbatasan. Sebagian besar fasilitas pendidikan dasar seperti sekolah taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan beberapa sekolah menengah pertama (SMP) telah tersedia di beberapa desa sebagai bentuk upaya pemerataan layanan pendidikan. Namun, jumlah dan jangkauan sekolah masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan wilayah yang luas dan tersebar. Hal ini membuat



beberapa anak harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengakses layanan pendidikan formal.

Tabel 3.8.2 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lumbis Pansiangan, 2023/2024 dan 2024/2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taman Kanak-Kanak	-	-
2	Raudatul Athfal (RA)	-	-
3	Sekolah Dasar (SD)	2	2
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	1
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	-
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	-
9	Madrasah Aliyah (MA)	-	-

Sumber: Kecamatan Lumbis Pansiangan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga pendidik yang masih terbatas. Sekolah-sekolah di daerah terluar sering kali hanya memiliki guru dalam jumlah sedikit dan kadang harus merangkap mengajar di beberapa kelas sekaligus. Keterbatasan tenaga guru ini juga berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang kurang optimal, terutama untuk mata pelajaran yang membutuhkan pendalaman lebih seperti matematika dan



bahasa. Selain itu, fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga masih sangat sederhana atau belum tersedia secara memadai di banyak sekolah. Dukungan infrastruktur seperti listrik dan konektivitas internet yang belum merata turut membatasi akses siswa terhadap sumber belajar digital dan informasi pendidikan yang lebih luas. Keadaan ini menjadi tantangan dalam mendorong proses belajar mengajar yang lebih dinamis dan inovatif.

Tabel 3.8.3 Jumlah Siswa dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Semester 1 2025/2026

No	Tingkat Pendidikan	Siswa	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah Dasar (SD)	73	17
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	38	6

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Meski demikian, masyarakat Lumbis Pansiangan memiliki kesadaran pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat terus mendorong peningkatan akses layanan pendidikan melalui pembangunan fasilitas fisik dan program-program peningkatan kualitas guru. Dengan dukungan peningkatan infrastruktur serta program pendidikan yang tepat sasaran, pendidikan di Lumbis Pansiangan memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan tersebut.

## KESEHATAN

Kondisi pelayanan kesehatan di Kecamatan Lumbis Pansiangan masih menghadapi berbagai keterbatasan sebagai daerah perbatasan dengan akses yang belum optimal. Fasilitas kesehatan yang tersedia sebagian besar berupa posyandu, puskesmas pembantu, dan satu atau beberapa Puskesmas di pusat



kecamatan. Namun, jumlah fasilitas tersebut belum merata di seluruh desa, sehingga sebagian warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, atau pengobatan umum.

Tenaga kesehatan di wilayah ini juga cenderung terbatas, terutama untuk tenaga spesialis dan tenaga kesehatan berpengalaman. Banyak fasilitas kesehatan hanya memiliki petugas kesehatan umum atau bidan desa, sementara dokter dan tenaga ahli lain harus datang secara berkala atau berasal dari pusat kecamatan/kabupaten. Hal ini berdampak pada kemampuan fasilitas setempat dalam menangani kasus kesehatan yang lebih kompleks atau darurat.

Kondisi infrastruktur di fasilitas kesehatan juga masih sangat sederhana. Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan sarana penunjang seperti ruang perawatan, laboratorium sederhana, atau layanan rujukan terbatas. Di samping itu, faktor geografis dan akses transportasi yang kurang memadai seringkali memperlambat upaya rujukan pasien ke rumah sakit di pusat kabupaten. Dalam situasi darurat, keterbatasan transportasi bisa menjadi hambatan serius bagi keselamatan pasien.

Meski demikian, terdapat upaya dari pemerintah daerah bersama komunitas setempat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, melalui program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan layanan kesehatan bergerak ke desa-desa terpencil. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan seperti posyandu juga relatif baik, yang membantu dalam deteksi dini masalah kesehatan anak dan ibu. Dengan peningkatan fasilitas, tenaga kesehatan, serta perbaikan akses transportasi, layanan kesehatan di Lumbis Pansiangan memiliki peluang untuk terus meningkat dan mendukung kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.



## INDUSTRI PENGOLAHAN

Industri pengolahan di Kecamatan Lumbis Pansiangan saat ini masih sangat terbatas dan belum berkembang secara signifikan. Wilayah ini lebih didominasi oleh kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat lokal, bukan industri pengolahan berskala besar. Hal ini terutama disebabkan oleh karakter wilayah yang masih pedalaman, keterbatasan akses transportasi, dan kurangnya infrastruktur pendukung industri. Jenis industri pengolahan yang ada umumnya berskala rumahan dan mikro, seperti pengolahan hasil pertanian dan perkebunan sederhana (misalnya pengeringan atau pengemasan hasil panen rumah tangga), serta pengolahan makanan tradisional untuk konsumsi lokal. Beberapa warga juga melakukan usaha kecil pengolahan ikan sungai atau produk olahan dari hasil kebun sendiri. Namun, aktivitas ini masih terbatas pada skala rumah tangga dan tidak terorganisir dalam bentuk unit industri formal dengan mesin dan fasilitas yang memadai.

Selain itu, belum adanya unit industri pengolahan yang berbasis komoditas unggulan di kecamatan ini membuat peluang untuk memperluas jaringan industri masih sangat terbuka. Ketiadaan industri besar juga berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap modal investasi, teknologi, serta jaringan pemasaran yang kuat. Sebagian besar hasil produksi masih dijual dalam bentuk mentah atau diproses secara minimal, karena fasilitas pengolahan dan akses pemasaran yang belum mendukung untuk produksi massal.

Meski demikian, terdapat potensi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal seperti hasil pertanian dan perkebunan yang jika didukung dengan pembinaan teknis, peningkatan keterampilan, serta akses modal dan pasar, dapat mendorong tumbuhnya industri kecil menengah (IKM) di wilayah ini. Program pemerintah daerah atau kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi langkah awal untuk memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan usaha pengolahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.



## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kecamatan Lumbis Pansiangan sebagai wilayah perbatasan memiliki posisi strategis namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, layanan dasar, dan pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Integrasi pembangunan dengan kawasan perbatasan, khususnya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, menjadi peluang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam aspek infrastruktur, prioritas kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan dasar agar mampu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Sementara itu, penguatan sektor ekonomi perlu difokuskan pada pengembangan potensi lokal berbasis pertanian, perkebunan, dan usaha mikro. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di wilayah perbatasan. Adapun rekomendasi kebijakan strategis yang dapat dilakukan meliputi:

### 1. Infrastruktur dan Konektivitas

Peningkatan dan pembangunan jalan penghubung antar desa serta akses menuju pusat kecamatan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang perlu menjadi prioritas untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Di samping itu, transportasi sungai sebagai jalur utama di beberapa wilayah harus dipelihara dan dioptimalkan agar tetap menjadi sarana distribusi yang efektif dan terjangkau. Selain konektivitas fisik, perluasan jaringan listrik dan telekomunikasi hingga desa terpencil juga sangat penting guna mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lumbis Pansiangan. Khususnya dalam pembangunan jembatan dari Mansalong ke Tau Lumbis untuk



peningkatan infrastruktur antar Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu

## 2. Penguatan Ekonomi Lokal

Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan perlu didorong melalui penyediaan sarana produksi serta pendampingan teknis kepada petani agar produktivitas dan kualitas hasil meningkat. Selain itu, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis komoditas lokal perlu diperkuat guna menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja. Dukungan akses pembiayaan serta perluasan jaringan pemasaran bagi UMKM juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing usaha masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi peluang perdagangan lintas batas, khususnya dengan memanfaatkan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, dapat menjadi strategi untuk memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

## 3. Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan

Pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian insentif khusus bagi yang bertugas di daerah terpencil agar pelayanan pendidikan dan kesehatan berjalan optimal. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas guna menunjang kualitas layanan. Penyediaan transportasi rujukan kesehatan serta dukungan layanan pendidikan berbasis digital juga penting untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

## 4. Pengembangan Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan wisata alam dan budaya berbasis masyarakat perlu didorong agar potensi lokal dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga. Penyediaan fasilitas dasar wisata, seperti akses menuju lokasi, homestay sederhana, serta promosi kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, dapat meningkatkan daya tarik



kunjungan. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan penting untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta kearifan lokal.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan Kecamatan Lumbis Pansiangan perlu diarahkan pada pendekatan terpadu yang mengedepankan pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi berbasis lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan kolaboratif, wilayah ini berpotensi berkembang menjadi kawasan perbatasan yang maju, mandiri, dan berdaya saing.



### 3.9. Kecamatan Lumbis Hulu

Kecamatan Lumbis Hulu merupakan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Kabupaten Nunukan dengan karakter geografis perbukitan dan hutan tropis, jumlah penduduk relatif kecil dan tersebar, serta tingkat keterisolasian yang masih cukup tinggi. Kondisi geografis tersebut memengaruhi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur, sehingga aktivitas sosial ekonomi masyarakat masih didominasi oleh pertanian tradisional dan pemanfaatan sumber daya alam secara sederhana dengan produktivitas dan nilai tambah yang rendah.

Konektivitas wilayah masih mengandalkan transportasi sungai, sementara akses jalan darat dan transportasi udara belum optimal. Ketersediaan BBM sering mengalami gangguan dengan ketergantungan tinggi pada pasokan dari luar negeri, terutama LPG. Infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan internet telah tersedia namun belum merata, sehingga berdampak pada tingginya biaya logistik, terbatasnya pusat perdagangan dan jasa, serta lambatnya pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan yang masih berskala rumah tangga.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, layanan dasar telah tersedia namun sangat terbatas baik dari sisi jumlah fasilitas maupun dukungan infrastruktur, khususnya ketiadaan listrik yang memengaruhi kualitas layanan. Secara keseluruhan, tantangan utama pembangunan Kecamatan Lumbis Hulu terletak pada keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar, sehingga arah kebijakan perlu difokuskan pada penguatan akses transportasi, pemerataan infrastruktur dasar, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fungsi strategis kawasan perbatasan.

#### **GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Lumbis Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berada di



wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia dan terbentuk sebagai hasil pemekaran kecamatan pada tahun 2019 dengan luas wilayah

763,93 km<sup>2</sup>. Wilayahnya didominasi oleh kondisi geografis perbukitan dan hutan tropis dengan jaringan sungai sebagai sarana utama mobilitas masyarakat di beberapa desa, sehingga akses transportasi dan infrastruktur masih relatif terbatas. Kecamatan ini terdiri dari sejumlah desa dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan tersebar, dengan karakter masyarakat yang masih kuat menjaga adat dan budaya lokal, khususnya budaya masyarakat Dayak. Mata pencaharian penduduk umumnya bertumpu pada sektor pertanian tradisional, perkebunan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara sederhana. Sebagai wilayah perbatasan, Lumbis Hulu memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus menyimpan potensi pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan wisata alam berbasis budaya yang dapat mendukung pembangunan wilayah ke depan.

Tabel 3.9.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sibalu	44	42	86
2	Mamasin	44	37	81
3	Duyan	41	36	77
4	Tau Lumbis	71	83	154
5	Kabungolor	23	43	66
6	Tetagas	39	33	72



Pemerintahan Kabupaten  
Nunukan  
Badan Pengelola Perbatasan  
Daerah



No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Bululaun Hulu	45	37	82
8	Tantulibing	50	49	99
9	Kalisun	27	29	56
10	Lipaga	48	49	97
<b>Lumbis Hulu</b>		<b>432</b>	<b>438</b>	<b>870</b>

Sumber : Kecamatan Lumbis Hulu dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Kondisi transportasi dan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu hingga saat ini masih tergolong terbatas dan menantang, seiring dengan letaknya yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan Kabupaten Nunukan. Aksesibilitas antarwilayah sebagian besar masih mengandalkan transportasi sungai sebagai sarana utama pergerakan orang dan distribusi barang, sementara jaringan jalan darat belum terhubung secara optimal dan kualitasnya masih terbatas pada beberapa ruas tertentu. Ketersediaan sarana transportasi udara bersifat sederhana dan berfungsi sebagai pendukung konektivitas, terutama dalam kondisi darurat atau saat akses sungai tidak memungkinkan.



Tabel 3.9.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2025

No	Moda	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Jalur darat antar kecamatan	Ada
2	Jalur udara	Ada
3	Jalur air	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Kemudian ketersediaan dan kondisi BBM di Kecamatan Lumbis Hulu masih mencerminkan tantangan yang sering terjadi di wilayah perbatasan pedalaman Kabupaten Nunukan. Karena suplai BBM dari depo pemerintah seringkali tidak mencukupi kebutuhan lokal, masyarakat di beberapa wilayah perbatasan termasuk Nunukan dan sekitarnya sudah terbiasa mengalami pasokan terbatas atau bahkan kelangkaan BBM bersubsidi, sehingga harga dan ketersediaannya tidak stabil dan sering kali menjadi kendala dalam aktivitas harian serta mobilitas masyarakat. Warga bukan hanya menghadapi keterbatasan pasokan, tetapi dalam beberapa situasi masyarakat juga mencari BBM dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan mereka karena lebih mudah diperoleh di sana, sementara di wilayah perbatasan pasokan BBM dari Indonesia belum optimal. Pemerintah telah mencoba menjangkau wilayah terluar dengan program BBM Satu Harga untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) agar masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di daerah lain di Indonesia, tetapi tantangan pendistribusian masih signifikan akibat kondisi geografis dan logistik wilayah perbatasan yang sulit.



Tabel 3.9.3 Kondisi BBM di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Kelangkaan BBM	Pernah, satu bulan terakhir
2	Pasokan dari Indonesia	< 50% (jalur air)
3	Akses ke negara lain melalui moda air	Ada jalur resmi

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Infrastruktur dasar seperti listrik, telekomunikasi, dan jaringan internet telah mulai tersedia, namun cakupan dan kualitas layanannya belum merata di seluruh desa. Kondisi ini menyebabkan biaya logistik relatif tinggi dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta pelayanan sosial masyarakat, sehingga pengembangan transportasi dan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kecamatan Lumbis Hulu.

Tabel 3.9.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025

No	Sumber Listrik Utama	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)
1	PLN	10
2	Non PLN	-
3	PLTD	10
4	Tidak ada listrik	5

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Secara keseluruhan, kondisi transportasi dan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu masih menunjukkan tingkat keterbatasan yang tinggi akibat faktor geografis, keterisolasian wilayah, serta belum optimalnya konektivitas darat. Ketergantungan pada transportasi sungai dan sarana pendukung yang masih sederhana



menyebabkan mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pelayanan publik berjalan dengan biaya tinggi dan efisiensi rendah. Meskipun infrastruktur dasar seperti listrik dan telekomunikasi telah mulai berkembang, pemerataannya belum menyeluruh, sehingga penguatan jaringan transportasi dan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lumbis Hulu.

## PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

Kondisi pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Lumbis Hulu masih sangat minim dan belum berkembang layaknya pusat ekonomi di wilayah lain; menurut pendataan wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, di kecamatan ini tidak terdapat unit pusat perdagangan dan jasa yang signifikan seperti pasar besar atau pusat layanan komersial formal karena akses yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, sehingga masyarakat lebih banyak bergantung pada dagangan kecil skala lokal, pasar tradisional informal, dan distribusi barang melalui jalur sungai dari luar kecamatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tabel 3.9.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025

No	Komoditas	Keberadaan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sembako	Ada	10%
2	LPG	Ada	90%
3	Alat transportasi	Ada	10%

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan Kecamatan Lumbis Hulu terhadap komoditas perdagangan dari negara lain masih cukup signifikan, terutama pada komoditas LPG yang mencapai 90%, mengindikasikan tingginya ketergantungan



energi rumah tangga terhadap pasokan lintas negara. Sementara itu, komoditas sembako dan alat transportasi dari negara lain masing-masing hanya sebesar 10%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi dari dalam negeri meskipun dalam jumlah terbatas. Kondisi ini mencerminkan karakter wilayah perbatasan yang akses logistik domestiknya belum optimal, sehingga pasokan tertentu khususnya energi lebih mudah diperoleh dari negara tetangga dibandingkan dari pusat distribusi nasional.

Komoditas yang ada di Kecamatan Lumbis Hulu didominasi oleh komoditas pertanian, perkebunan, dan hasil hutan yang diusahakan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Komoditas pertanian utama meliputi padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sayur-sayuran yang terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pada sektor perkebunan rakyat, komoditas yang berkembang antara lain karet, kakao, kopi, dan lada dalam skala kecil. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, kayu bakar, dan hasil hutan lainnya sebagai sumber tambahan pendapatan. Untuk komoditas perdagangan, barang yang beredar di wilayah ini terutama berupa sembako, LPG, dan kebutuhan rumah tangga, dengan sebagian pasokan masih berasal dari luar wilayah, termasuk dari negara tetangga, akibat keterbatasan akses dan distribusi. Secara umum, struktur komoditas di Lumbis Hulu masih bersifat subsisten dan belum dikelola secara optimal sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi.

## **PARIWISATA**

Kondisi pariwisata di Kecamatan Lumbis Hulu masih berada pada tahap awal pengembangan dan didominasi oleh potensi wisata alam dan budaya yang belum dikelola secara optimal. Wilayah ini memiliki daya tarik berupa bentang alam hutan tropis, sungai, air terjun, serta kekayaan budaya masyarakat Dayak yang masih kuat dan autentik, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai wisata alam, ekowisata, dan wisata budaya. Namun demikian, keterbatasan akses transportasi, minimnya infrastruktur pendukung pariwisata,



serta belum tersedianya fasilitas akomodasi dan layanan wisata yang memadai menjadi kendala utama dalam pengembangannya. Aktivitas pariwisata yang ada masih bersifat lokal dan insidental, dengan kunjungan wisatawan yang relatif rendah, sehingga pengembangan pariwisata di Lumbis Hulu memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur, promosi, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi sektor pendukung ekonomi wilayah di masa mendatang.

Tabel 3.9.6 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Objek wisata	Ada (air terjun)
2	Event tahunan	Tidak ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak ada
4	Kunjungan Warga Negara Asing (WNA)	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi pariwisata di Kecamatan Lumbis Hulu pada tahun 2025 masih berada pada tahap sangat awal dan belum berkembang secara optimal. Meskipun telah terdapat objek wisata berupa air terjun, potensi tersebut belum didukung oleh aktivitas pariwisata yang terstruktur, yang tercermin dari tidak adanya event tahunan, tidak adanya keterlibatan negara lain, serta belum terdapat kunjungan wisatawan mancanegara (WNA). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Lumbis Hulu masih bersifat lokal dan pasif, dengan pemanfaatan potensi alam yang belum diiringi promosi, pengelolaan, maupun pengembangan kegiatan pendukung pariwisata secara berkelanjutan.



## PENDIDIKAN

Kondisi pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berkaitan dengan karakter wilayah pedalaman dan perbatasan. Layanan pendidikan formal umumnya tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, dengan sekolah-sekolah yang tersebar di beberapa desa untuk melayani kebutuhan belajar masyarakat setempat. Namun demikian, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah dan distribusi tenaga pendidik, serta aksesibilitas antar desa menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi geografis yang sulit dan jarak tempuh yang jauh turut memengaruhi tingkat partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas. Meskipun demikian, pendidikan tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat, sehingga peningkatan kualitas fasilitas, pemerataan tenaga pendidik, serta dukungan infrastruktur penunjang menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Lumbis Hulu.

Tabel 3.9.7 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu, 2023/2024 dan 2024/2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taman Kanak-Kanak	-	-
2	Raudatul Athfal (RA)	-	-
3	Sekolah Dasar (SD)	1	1
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	1



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	-
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	-
9	Madrasah Aliyah (MA)	-	-

Sumber: Kecamatan Lumbis Hulu dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu masih sangat terbatas dan tidak mengalami perubahan antara tahun ajaran 2023/2024 dan 2024/2025. Layanan pendidikan formal hanya tersedia pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), masing-masing sebanyak satu sekolah, sementara jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah atas, serta pendidikan kejuruan dan madrasah belum tersedia. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya akses pendidikan lanjutan bagi masyarakat setempat, sehingga peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi harus keluar dari kecamatan, yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi sekolah dan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Lumbis Hulu.



Tabel 3.9.8 . Jumlah Siswa dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di Kecamatan Lumbis Hulu, Semester 1 2025/2026

No	Tingkat Pendidikan	Siswa	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekolah Dasar (SD)	73	10
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	46	8

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta didik di Kecamatan Lumbis Hulu pada Semester I Tahun Ajaran 2025/2026 relatif kecil dan terkonsentrasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 73 siswa yang dilayani oleh 10 guru, sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 46 siswa dengan 8 guru. Rasio siswa terhadap guru tergolong cukup rendah, yang mengindikasikan potensi intensitas layanan pembelajaran yang lebih baik, namun juga mencerminkan keterbatasan jumlah penduduk usia sekolah. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama pendidikan di Lumbis Hulu bukan pada beban tenaga pendidik, melainkan pada keterbatasan jumlah satuan pendidikan dan kesinambungan layanan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3.9.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Tidak ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025



Ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu pada tahun 2025 masih belum sepenuhnya memadai. Akses air dan internet sudah tersedia sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dan akses informasi, namun listrik belum tersedia, yang menjadi kendala utama dalam pemanfaatan sarana pendidikan secara optimal. Ketiadaan listrik berpotensi membatasi penggunaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi serta mengurangi efektivitas proses belajar, sehingga pemenuhan fasilitas listrik menjadi kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kecamatan Lumbis Hulu.

## **KESEHATAN**

Kondisi kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu masih menghadapi keterbatasan yang dipengaruhi oleh letak wilayah yang terpencil dan aksesibilitas yang sulit. Pelayanan kesehatan dasar tersedia dalam bentuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas pembantu atau pos pelayanan kesehatan, yang melayani kebutuhan dasar masyarakat di beberapa desa. Namun, keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, ketersediaan obat-obatan, serta jauhnya jarak tempuh antarpermukiman menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk layanan kesehatan lanjutan, masyarakat umumnya harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di kecamatan atau wilayah lain yang memerlukan waktu dan biaya transportasi cukup besar. Kondisi ini menyebabkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan belum merata, sehingga peningkatan fasilitas, tenaga medis, serta dukungan infrastruktur menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Lumbis Hulu.



Tabel 3.9.10 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu, Tahun 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas rawat inap	-
3	Puskesmas tanpa rawat inap	-
4	Puskesmas pembantu	1
5	Apotek	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu pada tahun 2025 masih sangat terbatas. Tidak terdapat rumah sakit, puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, maupun apotek, sehingga layanan kesehatan formal hanya ditopang oleh satu puskesmas pembantu. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, terutama untuk penanganan penyakit yang memerlukan layanan lanjutan atau ketersediaan obat secara cepat. Keterbatasan sarana kesehatan ini berpotensi meningkatkan ketergantungan masyarakat pada rujukan ke wilayah lain, dengan konsekuensi waktu tempuh dan biaya yang lebih besar, sehingga penguatan fasilitas dan layanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak di Kecamatan Lumbis Hulu.



Tabel 3.9.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu Tahun 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Tidak ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025

Fasilitas pendukung kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu pada tahun 2025 masih belum sepenuhnya memadai. Ketersediaan air dan internet sudah ada sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan dasar dan komunikasi, namun listrik belum tersedia, yang menjadi kendala utama dalam operasional sarana kesehatan. Ketiadaan listrik berpotensi menghambat pelayanan medis, penyimpanan obat dan vaksin, serta penggunaan peralatan kesehatan, sehingga pemenuhan fasilitas listrik menjadi prioritas penting untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan di Kecamatan Lumbis Hulu.

## INDUSTRI PENGOLAHAN

Industri pengolahan di Kecamatan Lumbis Hulu masih sangat terbatas dan berskala kecil, dengan kegiatan yang umumnya bersifat rumah tangga dan tradisional. Industri pengolahan yang ada lebih banyak berupa pengolahan sederhana hasil pertanian dan hasil hutan, seperti pengolahan bahan pangan untuk konsumsi lokal, kayu olahan sederhana, serta kerajinan tradisional masyarakat setempat. Belum terdapat industri pengolahan formal atau menengah yang berorientasi pasar luas, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, akses energi dan listrik, transportasi, serta minimnya modal dan teknologi. Akibatnya, sebagian besar hasil produksi masyarakat dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah yang optimal, sehingga pengembangan industri pengolahan di Kecamatan Lumbis Hulu masih memerlukan dukungan peningkatan



infrastruktur dasar, pendampingan usaha, dan akses pasar agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Potensi komoditas unggulan di Kecamatan Lumbis Hulu pada tahun 2025 masih sangat terbatas dan belum terdiversifikasi. Dari berbagai sektor ekonomi yang dicatat, hanya sektor tanaman pangan yang memiliki komoditas unggulan, yaitu padi, yang mencerminkan peran utama pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat. Sementara itu, sektor hortikultura, perkebunan, perikanan darat, serta hasil kehutanan kayu dan nonkayu belum tercatat memiliki komoditas unggulan, yang mengindikasikan bahwa potensi sektor-sektor tersebut belum tergarap atau belum dikembangkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pengembangan dan pendampingan sektor ekonomi lokal agar potensi sumber daya alam di Kecamatan Lumbis Hulu dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan berkelanjutan.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Rekomendasi kebijakan pembangunan Kecamatan Lumbis Hulu yang disusun berdasarkan kondisi eksisting wilayah perbatasan, keterbatasan infrastruktur, serta potensi lokal yang tersedia, dengan pendekatan realistis dan bertahap:

- a. Penguatan Akses Transportasi dan Konektivitas Wilayah  
Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan dan peningkatan akses transportasi dasar, khususnya pembukaan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antardesa serta optimalisasi transportasi sungai sebagai moda utama. Dukungan subsidi angkutan barang dan orang perlu dilanjutkan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan mobilitas masyarakat serta pelayanan publik. Selain itu, khususnya dalam pembangunan jembatan dari Mansalong ke Tau Lumbis untuk peningkatan infrastruktur antar Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu
- b. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Prioritas Ketersediaan listrik harus menjadi prioritas utama melalui



- pengembangan energi terbarukan skala kecil (PLTS, mikrohidro) yang sesuai dengan kondisi geografis setempat. Selain itu, perlu peningkatan kualitas jaringan air bersih dan internet untuk mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
- c. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan  
Perlu penguatan sarana pendidikan dasar dan menengah pertama yang sudah ada, disertai penambahan fasilitas pendukung dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Untuk sektor kesehatan, peningkatan fungsi puskesmas pembantu serta penempatan tenaga kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak, termasuk pengadaan sarana medis dasar dan sistem rujukan yang efektif.
  - d. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Wilayah  
Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, khususnya padi, perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan lokal. Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi komoditas melalui hortikultura, hasil hutan nonkayu, dan perikanan darat secara berkelanjutan, disertai pendampingan teknis dan akses permodalan bagi masyarakat.
  - e. Penguatan Industri Pengolahan Skala Kecil  
Untuk meningkatkan nilai tambah, diperlukan pengembangan industri pengolahan rumah tangga berbasis komoditas lokal, seperti pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan. Dukungan dapat diberikan melalui pelatihan keterampilan, bantuan alat sederhana, serta fasilitasi pemasaran produk.
  - f. Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya  
Potensi wisata alam seperti air terjun dan kekayaan budaya lokal perlu dikembangkan secara bertahap melalui penataan objek wisata, peningkatan akses, serta pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Promosi wisata berbasis komunitas dapat menjadi alternatif sumber pendapatan baru tanpa merusak lingkungan.
  - g. Penguatan Perdagangan dan Pengendalian Ketergantungan Lintas Batas  
Perlu penguatan sistem distribusi barang dalam negeri, khususnya untuk komoditas strategis seperti BBM dan LPG,



agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri dapat dikurangi. Pendirian titik distribusi resmi dan pengawasan perdagangan lintas batas menjadi langkah penting.

- h. Penguatan Tata Kelola Wilayah Perbatasan  
Sebagai wilayah perbatasan, Lumbis Hulu memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, serta perlindungan masyarakat dan wilayah kedaulatan.

Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan Kecamatan Lumbis Hulu yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan wilayah, dan penguatan fungsi strategis kawasan perbatasan.



### 3.10. Kecamatan Tulin Onsoi

Tulin Onsoi merupakan kecamatan dengan luas wilayah  $\pm 1.513,44$  km<sup>2</sup> dan berperan sebagai wilayah penyangga kawasan perbatasan. Meskipun tidak berada tepat di garis batas negara, kemajuan infrastruktur dan ekonominya sangat memengaruhi kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk di wilayah tapal batas.

Dari sisi infrastruktur dasar, seluruh desa telah menikmati listrik PLN. Transportasi bertumpu pada jalur darat, dengan dukungan PJU di dalam desa, meskipun konektivitas antardesa masih perlu ditingkatkan. Struktur perdagangan lebih banyak ditopang pasokan domestik.

Aktivitas ekonomi menunjukkan dinamika yang cukup baik, ditandai dengan keberadaan berbagai jenis pasar, toko kelontong, serta jasa penginapan. Selain itu, terdapat industri pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan CPO sebagai komoditas unggulan dengan pasar utama kabupaten/kota lain.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, fasilitas relatif lebih lengkap dibanding wilayah pedalaman lain, didukung listrik, air, dan internet. Namun, keterbatasan tenaga kesehatan serta belum tersedianya beberapa layanan lanjutan masih menjadi tantangan.

Dengan fondasi tersebut, Tulin Onsoi memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat kawasan perbatasan.

#### **GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Tulin Onsoi memiliki luas wilayah sekitar 1.513,44 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam desa-desa dengan cakupan area yang beragam. Variasi luas ini memberikan gambaran mengenai tantangan penyediaan pelayanan publik serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berbeda antarwilayah.



Desa Balatikon merupakan desa terluas dengan luas 346,97 km<sup>2</sup> atau sekitar 22,93 persen dari total luas kecamatan. Selanjutnya diikuti oleh Naputi seluas 248,16 km<sup>2</sup> (16,40 persen) dan Tinampak I seluas 176,98 km<sup>2</sup> (11,69 persen). Desa dengan luas cukup besar lainnya meliputi Tau Baru, Kalunsayan, serta Tinampak II.

Sebaliknya, terdapat desa dengan wilayah relatif kecil seperti Sanur dan Makmur yang masing-masing memiliki luas sekitar 11 km<sup>2</sup>, serta Semunad dengan luas 28,99 km<sup>2</sup>. Perbedaan ukuran wilayah tersebut berimplikasi pada variasi kebutuhan aksesibilitas, jangkauan pelayanan pemerintahan, dan pemerataan pembangunan.

Tabel 3.10.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Tulin Onsoi, 2024

<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)</b>
(1)	(2)	(3)
Balatikon	346,97	22,93
Naputi	248,16	16,40
Tau Baru	155,38	10,27
Tinampak II	114,16	7,54
Tinampak I	176,98	11,69
Salang	104,36	6,90
Tembalang	53,04	3,50



Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)
Kalunsayan	150,55	9,95
Sekikilan	112,61	7,44
Semunad	28,99	1,92
Sanur	11,08	0,73
Makmur	11,16	0,74
<b>Tulin Onsoi</b>	<b>1.513,44</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Tulin Onsoi dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

Meskipun Tulin Onsoi tidak berbatasan langsung dengan ibu kota kabupaten, kecamatan ini tetap memiliki peran penting dalam kerangka pembangunan kawasan perbatasan. Letaknya yang berada pada penyangga wilayah tapal batas menjadikan penguatan infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan sosial ekonomi di Tulin Onsoi sebagai bagian dari upaya memperkuat daya dukung kawasan perbatasan secara keseluruhan. Kemajuan wilayah ini akan turut memengaruhi kelancaran distribusi barang, mobilitas penduduk, serta stabilitas aktivitas ekonomi di daerah perbatasan.

## **TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR**

Ketersediaan listrik di Kecamatan Tulin Onsoi menunjukkan kondisi yang relatif baik dan merata. Seluruh desa yang ada telah



menikmati aliran listrik, dengan 12 desa tercatat mayoritas menggunakan sumber listrik dari PLN.

Tidak terdapat desa yang memanfaatkan listrik non-PLN maupun sumber listrik lainnya, dan tidak ada desa yang berada dalam kondisi tanpa aliran listrik. Keadaan ini menggambarkan bahwa infrastruktur ketenagalistrikan telah menjangkau seluruh wilayah desa sehingga mampu mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 3.10.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	12
Mayoritas listrik non-PLN	0
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan kondisi akses transportasi, mobilitas masyarakat di Kecamatan Tulin Onsoi terutama dilayani melalui jalur darat yang menjadi penghubung utama antarpermukiman dan pusat aktivitas. Keberadaan jalur ini mendukung pergerakan penduduk serta distribusi barang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam menunjang kegiatan tersebut, pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada umumnya berasal dari dalam negeri sehingga relatif lebih terjangkau. Untuk penerangan, penerangan jalan umum (PJU) telah tersedia, namun masih terbatas di dalam wilayah desa



dan belum menjangkau ruas antardesa. Kondisi ini menyebabkan aktivitas perjalanan di luar kawasan permukiman pada malam hari masih memerlukan kehati-hatian.

Tabel 3.10.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak ada
Udara	Tidak ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Adapun sarana angkutan umum yang dimanfaatkan masyarakat sebagian besar berupa taksi tidak resmi yang beroperasi secara swadaya. Moda ini menjadi alternatif penting bagi warga dalam mengakses layanan maupun kegiatan ekonomi.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun dukungan transportasi sudah tersedia, peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur masih diperlukan untuk memperlancar konektivitas antardesa di Tulin Onsoi.

Berdasarkan data fasilitas perhubungan darat, di Kecamatan Tulin Onsoi **tidak terdapat terminal**, baik terminal barang maupun terminal penumpang. Ketiadaan simpul transportasi ini menunjukkan bahwa aktivitas angkutan darat masih berlangsung secara sederhana dan belum didukung oleh fasilitas resmi untuk pengaturan arus penumpang maupun distribusi logistik.



Tabel 3.10.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Dalam praktiknya, mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan memanfaatkan sarana transportasi yang tersedia secara swadaya. Namun demikian, keberadaan terminal di masa mendatang dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keteraturan, efisiensi, serta kapasitas pelayanan transportasi di wilayah ini.

### **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Pola pasokan komoditas perdagangan di Kecamatan Tulin Onsoi menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat pada umumnya masih bertumpu pada sumber dari dalam negeri. Meskipun terdapat beberapa komoditas yang tercatat memiliki pasokan dari negara lain, proporsinya bukan merupakan sumber utama.

Komoditas sembako dan elpiji tersedia, dengan mayoritas pasokan berasal dari dalam negeri. Hal yang sama juga berlaku untuk pakaian serta bahan bangunan, di mana suplai domestik tetap mendominasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.



Tabel 3.10.5 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

<b>Komoditas</b>	<b>Keadaan Pasokan Komoditas dari Negara Lain</b>	<b>Sumber Pasokan Komoditas</b>
(1)	(2)	(3)
Sembako	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Elpiji	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Bahan Bakar Minyak	Tidak ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Alat Transportasi	Tidak ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Hasil Pertanian	Tidak ada	Seluruhnya dari dalam negeri
Pakaian	Ada	Mayoritas dari dalam negeri
Bahan Bangunan	Ada	Mayoritas dari dalam negeri

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sementara itu, untuk bahan bakar minyak, alat transportasi, dan hasil pertanian, tidak terdapat pasokan dari negara lain karena seluruhnya dipenuhi dari dalam negeri. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun berada dalam konteks kawasan perbatasan, struktur perdagangan di Tulin Onsoi relatif lebih mengandalkan jaringan distribusi nasional dibandingkan interaksi lintas negara.



Ketersediaan fasilitas ekonomi di Kecamatan Tulin Onsoi menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan jasa telah berkembang meskipun belum sepenuhnya lengkap. Berbagai bentuk sarana jual beli dapat dijumpai, mulai dari kelompok pertokoan, pasar dengan bangunan permanen, pasar semi permanen, hingga pasar tanpa bangunan yang menjadi ruang interaksi ekonomi masyarakat.

Selain itu, kebutuhan harian warga juga didukung oleh keberadaan kedai makan, penginapan, serta toko kelontong yang tersebar di wilayah kecamatan. Fasilitas-fasilitas tersebut berperan penting dalam menopang perputaran ekonomi lokal sekaligus melayani mobilitas penduduk.

Tabel 3.10.6 Keberadaan Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

<b>Fasilitas Ekonomi</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Kelompok Pertokoan	Ada
Pasar dengan Bangunan Permanen	Ada
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	Ada
Pasar Tanpa Bangunan	Ada
Minimarket	Tidak ada
Rumah Makan	Tidak ada
Kedai Makan	Ada



<b>Fasilitas Ekonomi</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Hotel	Tidak ada
Penginapan	Ada
Toko Kelontong	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025) dan Kecamatan Tulin Onsoi dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

Namun demikian, beberapa jenis sarana belum tersedia, seperti minimarket, rumah makan, dan hotel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian aktivitas ekonomi modern maupun layanan berskala lebih besar masih memiliki ruang untuk berkembang di masa mendatang.

## **PARIWISATA**

Potensi pariwisata di Kecamatan Tulin Onsoi salah satunya ditunjukkan oleh keberadaan kolam pemandian yang menjadi objek daya tarik wisata bagi masyarakat setempat. Keberadaan destinasi ini dimanfaatkan sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat berkumpulnya warga dalam berbagai kesempatan.

Dalam kurun waktu terakhir juga terdapat penyelenggaraan event wisata, yang berfungsi mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kegiatan tersebut belum melibatkan partisipasi dari negara lain, dan kunjungan wisatawan mancanegara belum tercatat.



Gambaran ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Tulin Onsoi masih berorientasi pada wisatawan domestik dan lokal, sehingga peluang peningkatan promosi serta penguatan daya tarik wilayah masih terbuka luas di masa mendatang.

## PENDIDIKAN

Ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Tulin Onsoi pada tahun 2025 mencakup beberapa jenjang mulai dari pendidikan usia dini hingga menengah. Tercatat terdapat 11 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 4 unit Taman Kanak-Kanak. Pada jenjang dasar tersedia 8 unit Sekolah Dasar serta 1 unit Madrasah Ibtidaiyah.

Untuk pendidikan menengah, terdapat 3 unit Sekolah Menengah Pertama dan 1 unit Madrasah Tsanawiyah. Selain itu, tersedia pula 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan sebagai alternatif pendidikan berbasis keterampilan.

Tabel 3.10.7 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Pendidikan Anak Usia Dini	11
Taman Kanak-Kanak	4
<i>Raudhatul Athfall Bustanul Athfal</i>	0
Sekolah Dasar	8



Sarana Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Madrasah <i>Ibtidaiyah</i>	1
Sekolah Menengah Pertama	3
Madrasah <i>Tsanawiyah</i>	1
Sekolah Menengah Atas	0
Madrasah <i>Aliyah</i>	0
Sekolah Menengah Kejuruan	1
Perguruan Tinggi	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Namun demikian, Sekolah Menengah Atas, Madrasah *Aliyah*, dan perguruan tinggi belum tersedia di wilayah Tulin Onsoi. Untuk mengakses fasilitas tersebut, masyarakat umumnya harus menuju ke Kecamatan Nunukan atau Nunukan Selatan yang dapat dijangkau melalui transportasi darat dan jalur air.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar layanan pendidikan telah hadir di dalam kecamatan, kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang tertentu masih memerlukan mobilitas keluar wilayah.

Ketersediaan fasilitas penunjang sarana pendidikan di Kecamatan Tulin Onsoi tergolong memadai. Seluruh satuan pendidikan telah didukung oleh listrik, air, serta akses internet yang



dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar mengajar maupun kegiatan administrasi sekolah.

Tabel 3.10.8 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Dengan adanya dukungan utilitas tersebut, pelaksanaan pendidikan memiliki peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan peralatan pembelajaran modern dan sumber informasi digital. Kondisi ini menjadi modal penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Tulin Onsoi.

## **KESEHATAN**

Pada tahun 2025, ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Tulin Onsoi menunjukkan kombinasi antara fasilitas pelayanan dasar pemerintah dan layanan kesehatan mandiri masyarakat. Untuk layanan tingkat pertama, terdapat 1 puskesmas tanpa fasilitas rawat inap serta 6 puskesmas pembantu yang berperan mendekatkan akses pelayanan kepada penduduk.

Selain itu, masyarakat juga didukung oleh keberadaan 3 tempat praktik dokter, 2 tempat praktik bidan, dan 2 poskesdes.



Ketersediaan sarana penunjang obat-obatan tergolong cukup, dengan 3 apotek dan 12 toko obat yang membantu pemenuhan kebutuhan kesehatan sehari-hari.

Tabel 3.10.9 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Rumah Sakit	0
Rumah Sakit Bersalin	0
Puskemas dengan Fasilitas Rawat Inap	0
Puskesmas Tanpa Fasilitas Rawat Inap	1
Puskesmas Pembantu	6
Poliklinik	0
Tempat Praktik Dokter	3
Rumah Bersalin	0
Tempat Praktik Bidan	2
Poskesdes	2
Polindes	0
Apotek	3
Toko Obat	12

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Namun demikian, beberapa fasilitas kesehatan lanjutan belum tersedia di wilayah ini. Tidak terdapat rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan rawat inap, poliklinik, rumah bersalin,



maupun polindes. Oleh karena itu, untuk pelayanan medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, masyarakat masih memerlukan rujukan ke wilayah lain.

Fasilitas penunjang pada sarana kesehatan di Kecamatan Tulin Onsoi tergolong memadai. Layanan kesehatan yang ada telah didukung oleh ketersediaan listrik, air, serta akses internet yang membantu kelancaran pelayanan medis maupun administrasi.

Tabel 3.10.10 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan di Kecamatan Tulin Onsoi, 2025

<b>Fasilitas Penunjang Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)
Listrik	Ada
Air	Ada
Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Namun demikian, dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga kesehatan masih dirasakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap kapasitas penanganan kasus tertentu, terutama yang memerlukan layanan lebih intensif atau spesifik.

Dalam situasi tersebut, pada kondisi tertentu terdapat sebagian kecil warga yang memilih mencari pengobatan ke luar negeri sebagai alternatif. Meskipun demikian, fasilitas kesehatan di dalam wilayah tetap menjadi tumpuan utama pelayanan bagi mayoritas masyarakat.



## INDUSTRI PENGOLAHAN

Kegiatan industri pengolahan di Kecamatan Tulin Onsoi menunjukkan perkembangan pada sektor berbasis perkebunan. Produk yang menonjol adalah *crude palm oil* (CPO) yang dihasilkan melalui proses pengolahan kelapa sawit dan menjadi komoditas unggulan wilayah.

Keberadaan industri ini memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun perputaran usaha pendukung lainnya. Dalam pemasarannya, CPO dari Tulin Onsoi umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di kabupaten/kota lain, sehingga memperkuat keterhubungan ekonomi kecamatan dengan wilayah yang lebih luas.

Gambaran ini menunjukkan bahwa Tulin Onsoi tidak hanya berperan sebagai daerah produksi bahan mentah, tetapi telah terlibat dalam rantai nilai industri yang memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah pembangunan Tulin Onsoi perlu difokuskan pada percepatan transformasi dari wilayah penyangga menjadi simpul pertumbuhan ekonomi regional. Ketersediaan listrik PLN, jaringan perdagangan domestik, serta aktivitas industri pengolahan CPO merupakan modal kuat yang tidak dimiliki banyak kecamatan perbatasan lain.

Penguatan konektivitas darat tetap menjadi agenda penting. Meskipun jalur transportasi sudah tersedia, peningkatan kualitas jalan antardesa, perluasan penerangan jalan umum, dan pembentukan simpul logistik akan menurunkan biaya distribusi serta mempercepat arus barang dan orang. Dalam jangka panjang, langkah ini akan memperbesar daya tarik investasi.



Pada sektor industri, keberadaan pabrik pengolahan sawit perlu diikuti kebijakan hilirisasi lanjutan. Pemerintah dapat mendorong tumbuhnya usaha turunan, penguatan kemitraan dengan petani, serta peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi menyebar ke berbagai lapangan usaha.

Di bidang perdagangan dan jasa, masih terbuka ruang untuk pengembangan ritel modern, rumah makan, dan akomodasi. Fasilitasi permodalan UMKM, pelatihan manajemen usaha, dan penataan kawasan pasar akan memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

Pada pelayanan dasar, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan sekadar ketersediaan. Di pendidikan, pemanfaatan internet dapat diperluas untuk pembelajaran digital dan pelatihan vokasi. Di kesehatan, pemenuhan tenaga medis serta penguatan layanan rujukan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas dalam negeri.

Sektor pariwisata juga dapat diperkuat melalui penataan destinasi yang sudah ada, promosi regional, dan integrasi dengan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.

Secara umum, pembangunan Tulin Onsoi harus diarahkan untuk menjadikannya motor penggerak ekonomi kawasan penyangga perbatasan. Ketika pusat pertumbuhan baru terbentuk, maka wilayah perbatasan di sekitarnya akan ikut terdorong maju melalui efek pengganda ekonomi.



### 3.11. Kecamatan Sei Menggaris

Kecamatan Sei Menggaris merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah daratan Pulau Kalimantan dan termasuk dalam kawasan perbatasan negara dengan Malaysia. Secara geografis, Kecamatan Sei Menggaris memiliki luas wilayah sekitar 850.480 km<sup>2</sup>, sehingga menjadikannya salah satu kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Nunukan. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari 4 desa yaitu Desa Tabur Lestari, Semaenre Semaja, Srinanti dan Sekaduyan Taka yang tersebar dengan jarak antara pemukiman relatif berjauhan.

Batas wilayah Kecamatan Sei Menggaris di sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sebuku, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nunukan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tulin Onsoi. Kondisi wilayah didominasi oleh kawasan hutan, sungai, serta lahan perkebunan, dengan aksesibilitas antarwilayah yang bisa dilalui melalui jalur darat dan air. Struktur perekonomian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit, serta kegiatan ekonomi skala rumah tangga.



Tabel 3.11.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sei Menggaris, 2024

Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)
Tabur Lestari	206,89	24,33
Semaenre Semaja	167,18	19,66
Srinanti	154,09	18,12
Sekaduyan Taka	322,36	37,90
<b>Sei Menggaris</b>	<b>850,52</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Sei Menggaris dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Ketersediaan infrastruktur dasar di Kecamatan Sei Menggaris, khususnya pada sektor ketenagalistrikan, menunjukkan kondisi yang relatif baik. Berdasarkan Tabel 2, seluruh desa di Kecamatan Sei Menggaris telah teraliri listrik, dengan mayoritas desa menggunakan sumber listrik dari PLN. Tidak terdapat desa yang bergantung pada listrik non-PLN, sumber listrik lainnya, maupun desa yang belum teraliri listrik. Kondisi ini mencerminkan adanya pemerataan akses listrik di wilayah kecamatan, yang merupakan prasyarat penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas hidup penduduk.



Tabel 3.11.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Sei Menggaris,  
2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	4
Mayoritas listrik non-PLN	0
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Dari sisi akses transportasi, Kecamatan Sei Menggaris memiliki keterhubungan antardesa maupun ke kecamatan lain melalui jalur darat dan jalur air, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

3. Keberadaan dua moda transportasi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas penduduk dan distribusi barang dapat dilakukan melalui lebih dari satu jalur. Namun demikian, akses transportasi udara belum tersedia di wilayah Kecamatan Sei Menggaris.

Tabel 3.11.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain  
di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Ada
Udara	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Sarana transportasi darat di Kecamatan Sei Menggaris masih tergolong terbatas. Hal ini terlihat dari belum tersedianya terminal transportasi darat, baik terminal barang maupun terminal penumpang, sebagaimana tercantum pada Tabel 4. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas transportasi darat masih bersifat informal atau belum terpusat pada fasilitas terminal yang memadai. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi efisiensi pergerakan barang dan penumpang, khususnya untuk kegiatan ekonomi skala besar.

Tabel 3.11.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 5, Kecamatan Sei Menggaris belum memiliki bandar udara, baik kategori perintis, domestik, maupun internasional. Tidak adanya fasilitas bandar udara menunjukkan bahwa seluruh pergerakan udara masyarakat masih bergantung pada kecamatan atau wilayah lain di Kabupaten Nunukan. Kondisi ini menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi, terutama sarana pendukung mobilitas dan distribusi logistik, masih menjadi tantangan dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah Kecamatan Sei Menggaris.



Tabel 3.11.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Perintis	0	0
Bandar Udara Domestik	0	0
Bandar Udara Internasional	0	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas III Nunukan, 2025)

## PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

Sebagai salah satu kecamatan yang berada di wilayah perbatasan, Sei Menggaris memiliki dinamika perdagangan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, aksesibilitas, serta interaksi ekonomi lintas negara. Aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah ini tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh arus barang dari luar negeri. Kondisi tersebut membentuk pola distribusi komoditas yang khas, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok dan energi rumah tangga.

Tabel 3.11.6 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sembako	Ada	70%
2	LPG	Ada	70%
3	BBM	Ada	20%



No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Alat Transportasi	Tidak Ada	-
5	Hasil Pertanian	Tidak Ada	-
6	Pakaian	Tidak Ada	-
7	Bahan Bangunan	Ada	30%

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan hasil pendataan, sebagian komoditas perdagangan di Kecamatan Sei Menggaris masih berasal dari negara lain, khususnya untuk sembako dan LPG yang masing-masing mencapai 70 persen. Persentase ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan luar negeri untuk kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, bahan bangunan tercatat sebesar 30 persen dan BBM sebesar 20 persen berasal dari luar negeri, yang mengindikasikan adanya pengaruh pasar lintas batas dalam mendukung aktivitas pembangunan dan mobilitas. Sementara itu, komoditas seperti hasil pertanian, pakaian, dan alat transportasi tidak tercatat berasal dari negara lain, sehingga menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut masih didominasi oleh pasokan dalam negeri.

Kondisi ini mencerminkan karakteristik wilayah perbatasan yang memiliki kedekatan geografis dan hubungan ekonomi dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Kedekatan tersebut memungkinkan arus barang lintas batas berlangsung relatif intensif, baik karena faktor harga, ketersediaan, maupun kemudahan distribusi. Oleh karena itu, penguatan sistem distribusi domestik dan peningkatan kapasitas produksi lokal menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan ekonomi wilayah Kecamatan Sei Menggaris.



Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat aktivitas perdagangan dan jasa di suatu wilayah. Di Kecamatan Sei Menggaris, keberadaan fasilitas perdagangan masih didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah yang melayani kebutuhan harian masyarakat. Kondisi ini mencerminkan karakteristik wilayah perbatasan yang pertumbuhan ekonominya bertumpu pada perdagangan lokal dan aktivitas distribusi kebutuhan pokok.

Tabel 3.11.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok Pertokoan	4
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	2
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	0
4	Pasar tanpa Bangunan	0
5	Minimarket/Swalayan/Supermarket	0
6	Restoran/Rumah Makan	0
7	Hotel	0
8	Penginapan: Hostel/Motel/Losmen/Wisma	3
9	Toko/Warung Kelontong	20

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, terdapat 4 kelompok pertokoan dan 2 pasar dengan bangunan permanen di Kecamatan Sei Menggaris. Sementara itu, tidak terdapat pasar dengan bangunan semi permanen maupun pasar tanpa bangunan, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan pasar rakyat relatif terpusat pada fasilitas permanen yang tersedia. Di sisi lain, belum



terdapat minimarket, swalayan, supermarket, restoran, rumah makan, maupun hotel. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan modern dan jasa akomodasi formal masih belum berkembang secara signifikan.

Adapun usaha perdagangan eceran tradisional menjadi tulang punggung perekonomian lokal, tercermin dari keberadaan 20 toko atau warung kelontong. Selain itu, terdapat 3 penginapan berupa hostel, motel, losmen, atau wisma yang mendukung kebutuhan akomodasi, terutama bagi pelintas batas atau pendatang. Secara umum, struktur sarana ekonomi di Kecamatan Sei Menggaris menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan masih berskala lokal dan tradisional, dengan potensi pengembangan lebih lanjut seiring meningkatnya konektivitas dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

## **PARIWISATA**

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki keunikan geografis dan budaya. Keberadaan objek wisata dapat menjadi daya tarik tersendiri apabila didukung oleh pengelolaan yang berkelanjutan dan promosi yang memadai. Di Kecamatan Sei Menggaris, potensi tersebut mulai terlihat meskipun aktivitasnya masih terbatas.

Tabel 3.11.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sei Menggaris, Tahun 2025

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hasil</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Ada
2	Event tahunan	Tidak Ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Berdasarkan data tahun 2025, Kecamatan Sei Menggaris tercatat memiliki Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Hal ini menunjukkan adanya potensi pengembangan sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, baik melalui jasa transportasi, perdagangan, maupun akomodasi. Namun demikian, belum terdapat event tahunan yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung promosi pariwisata di wilayah ini. Selain itu, aktivitas pariwisata juga belum melibatkan negara lain, meskipun secara geografis wilayah ini berada di kawasan perbatasan yang berdekatan dengan Malaysia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kecamatan Sei Menggaris masih berada pada tahap awal pengembangan. Dengan adanya objek wisata yang telah teridentifikasi, diperlukan upaya penguatan promosi, penyelenggaraan kegiatan pendukung, serta peningkatan sarana dan prasarana agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

## **PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan wilayah. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai di setiap jenjang menjadi indikator penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan seperti Kecamatan Sei Menggaris.



Tabel 3.11.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12
2	Taman Kanak-Kanak	1
3	Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)	-
4	Sekolah Dasar (SD)	10
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
9	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
10	Madrasah Aliyah (MA)	-
11	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, sarana pendidikan di Kecamatan Sei Menggaris telah tersedia mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas dan kejuruan. Pada jenjang dasar, terdapat 12 PAUD dan 1 Taman Kanak-Kanak, yang menunjukkan perhatian terhadap pendidikan usia dini. Pada tingkat pendidikan dasar, tersedia 10 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sementara itu, pada jenjang



menengah pertama terdapat 4 SMP dan 1 MTs, serta pada jenjang menengah atas tersedia masing-masing 1 SMA dan 1 SMK.

Namun demikian, belum terdapat Madrasah Aliyah (MA) maupun perguruan tinggi di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi masih mengharuskan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke luar kecamatan, bahkan ke wilayah lain di Kabupaten Nunukan. Secara umum, ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Sei Menggaris telah mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi pengembangan pada jenjang pendidikan lanjutan masih menjadi tantangan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan.

Tabel 3.11.10 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, sarana pendidikan di Kecamatan Sei Menggaris telah tersedia mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas dan kejuruan. Pada jenjang pendidikan usia dini terdapat 12 PAUD dan 1 Taman Kanak-Kanak, yang mencerminkan adanya akses awal bagi pembentukan dasar pendidikan anak. Pada jenjang pendidikan dasar tersedia 10 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), sedangkan pada jenjang menengah pertama terdapat 4 SMP dan 1 MTs. Untuk jenjang menengah atas, masing-masing tersedia



1 SMA dan 1 SMK yang memberikan pilihan pendidikan umum maupun kejuruan bagi lulusan tingkat sebelumnya.

Meskipun demikian, belum terdapat Madrasah Aliyah (MA) maupun perguruan tinggi di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah atas yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi harus menempuh pendidikan di luar Kecamatan Sei Menggaris, bahkan ke kecamatan lain di Kabupaten Nunukan. Secara keseluruhan, ketersediaan sarana pendidikan di wilayah ini telah mendukung layanan pendidikan dasar dan menengah, namun penguatan akses pendidikan lanjutan masih menjadi kebutuhan strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan.

## KESEHATAN

Ketersediaan sarana kesehatan merupakan faktor penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai akan sangat menentukan kualitas layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif bagi penduduk di Kecamatan Sei Menggaris.

Tabel 3.11.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas rawat inap	1
3	Puskesmas tanpa rawat inap	-
4	Puskesmas pembantu	3
5	Tempat Praktik Dokter	1



No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
6	Tempat Praktik Bidan	-
7	Apotek	1

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, di Kecamatan Sei Menggaris belum terdapat rumah sakit. Pelayanan kesehatan utama ditopang oleh 1 puskesmas rawat inap yang berperan sebagai fasilitas rujukan tingkat pertama di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat 3 puskesmas pembantu yang mendukung jangkauan pelayanan kesehatan dasar di beberapa desa. Ketersediaan tenaga kesehatan mandiri tercermin dari adanya 1 tempat praktik dokter, sementara tempat praktik bidan tidak tercatat pada tahun ini. Untuk mendukung distribusi obat dan pelayanan farmasi, tersedia 1 apotek di wilayah kecamatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kecamatan Sei Menggaris masih berfokus pada layanan kesehatan dasar. Ketiadaan rumah sakit mengindikasikan bahwa kasus-kasus yang memerlukan penanganan lanjutan atau spesialis harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar kecamatan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas puskesmas serta peningkatan akses terhadap tenaga kesehatan menjadi aspek penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan.

Selain ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, dukungan infrastruktur penunjang juga menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet sangat berperan dalam menunjang operasional pelayanan kesehatan, terutama dalam mendukung pelayanan rawat inap, administrasi, hingga pelaporan data kesehatan.



Tabel 3.11.12 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, fasilitas pendukung kesehatan di Kecamatan Sei Menggaris tercatat telah tersedia, meliputi listrik, air, dan akses internet. Ketersediaan listrik dan air menjadi kebutuhan dasar dalam operasional fasilitas kesehatan, termasuk untuk pelayanan medis, sanitasi, dan kenyamanan pasien. Sementara itu, akses internet mendukung sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital serta mempermudah koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan di luar wilayah.

Dengan tersedianya fasilitas pendukung tersebut, pelayanan kesehatan di Kecamatan Sei Menggaris memiliki fondasi infrastruktur yang cukup memadai. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut tetap perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sarana dan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **INDUSTRI PENGOLAHAN**

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta memperkuat struktur perekonomian wilayah. Di kawasan perbatasan seperti Kecamatan Sei Menggaris, keberadaan industri pengolahan umumnya masih berbasis pada potensi sumber daya alam yang tersedia di sekitar wilayah tersebut.



Tabel 3.11.13 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sei Menggaris, 2025

No	Jenis Industri	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman Pangan	-
2	Hortikultura	-
3	Perkebunan	Sawit
4	Hasil Kehutanan Kayu	-
5	Hasil Kehutanan Non Kayu	-
6	Perikanan Tangkap Laut	-
7	Perikanan Budidaya Laut	-
8	Jasa Kelautan	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya konsentrasi ekonomi yang cukup kuat pada sektor perkebunan sawit. Ketergantungan pada satu komoditas dapat meningkatkan risiko ekonomi daerah, terutama jika terjadi fluktuasi harga pasar, perubahan kebijakan perdagangan, atau isu lingkungan yang memengaruhi produksi dan distribusi sawit. Oleh karena itu, diversifikasi komoditas menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, sektor-sektor yang belum memiliki komoditas teridentifikasi justru menyimpan potensi besar untuk dikembangkan. Tanaman pangan, hortikultura, serta sektor perikanan dan kelautan berpeluang menjadi alternatif sumber pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara optimal. Dengan pemetaan dan penguatan komoditas unggulan di setiap sektor, struktur ekonomi daerah dapat menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.



## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pertama, dalam sektor perdagangan dan distribusi, diperlukan penguatan sistem logistik domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri, khususnya untuk komoditas sembako dan LPG. Optimalisasi jalur distribusi darat dan air yang telah tersedia perlu didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur serta koordinasi antarwilayah agar stabilitas harga dan ketersediaan barang tetap terjaga.

Kedua, pada sektor pendidikan, meskipun sarana pendidikan dasar dan menengah telah tersedia, pengembangan akses pendidikan lanjutan perlu menjadi perhatian. Fasilitasi akses ke perguruan tinggi melalui kerja sama antarwilayah, pemberian beasiswa, atau penyediaan pendidikan jarak jauh dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan.

Ketiga, dalam sektor kesehatan, penguatan kapasitas puskesmas rawat inap serta peningkatan jumlah tenaga kesehatan menjadi prioritas, mengingat belum tersedianya rumah sakit di kecamatan ini. Dukungan fasilitas listrik, air, dan internet yang telah tersedia perlu dioptimalkan untuk mendukung sistem layanan kesehatan berbasis digital dan rujukan yang lebih efektif.

Keempat, pada sektor industri pengolahan, diperlukan dorongan terhadap hilirisasi komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, dan hortikultura agar tercipta nilai tambah ekonomi lokal. Pembinaan pelaku usaha kecil serta akses terhadap permodalan dan pemasaran dapat memperkuat struktur ekonomi masyarakat.

Kelima, dalam sektor pariwisata, pengembangan objek daya tarik wisata yang telah ada perlu diikuti dengan penyelenggaraan event tahunan serta promosi yang lebih luas guna meningkatkan kunjungan dan mendorong pertumbuhan usaha jasa pendukung.



### 3.12. Kecamatan Nunukan

Kecamatan Nunukan merupakan salah satu kecamatan strategis di Kabupaten Nunukan yang berperan penting sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik, khususnya sebagai wilayah perbatasan negara. Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran kondisi sosial dan ekonomi Kecamatan Nunukan dengan mengacu langsung pada tabel-tabel data yang tersedia dari instansi terkait.

#### SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR DASAR

Tabel 3.12.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan berdasarkan Pendidikan Terakhir yang ditamatkan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Tidak Tamat/Belum Sekolah	32,819
SD/Sederajat	13,772
SMP/Sederajat	8,916
SMA/Sederajat	14,514
Perguruan Tinggi	7,804
Total	77,825

\*Sumber Data: Disdukcapil , Kondisi Semester 1 2025

Berdasarkan Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, terlihat bahwa struktur pendidikan penduduk masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Dari total 77.825 penduduk, sebanyak 32.819 orang merupakan penduduk yang tidak



tamat atau belum sekolah. Penduduk dengan pendidikan SD/ sederajat berjumlah 13.772 orang, sementara yang menamatkan SMP/ sederajat sebanyak 8.916 orang.

Penduduk dengan pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) tercatat sebanyak 14.514 orang, sedangkan penduduk yang telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi berjumlah 7.804 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Nunukan masih berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah dan tinggi masih menjadi tantangan pembangunan sumber daya manusia di wilayah ini.

Tabel 3.12.2 Jumlah Sarana Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
PAUD	-
TK	-
RA/BA	-
SD	17
MI	-
SMP	7
MTs	-
SMA	-
MA	-
SMK	-
Perguruan Tinggi	-



Jumlah Sarana Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Nunukan. Berdasarkan tabel tersebut, fasilitas pendidikan yang tercatat masih terbatas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Terdapat 17 unit Sekolah Dasar (SD) dan 7 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sementara itu, untuk jenjang PAUD, TK, RA/BA, MI, MTs, SMA/MA, SMK, dan perguruan tinggi belum tercatat dalam data yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan lanjutan dan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Nunukan masih memerlukan perhatian dan penguatan, baik melalui pembangunan sarana baru maupun optimalisasi fasilitas yang ada.

## **EKONOMI DAN POTENSI UNGGULAN**

Aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Nunukan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan kecil yang berkembang seiring dengan dinamika wilayah perbatasan. UMKM berperan penting sebagai penyedia lapangan kerja dan penggerak ekonomi lokal.

Tabel 3.12.3 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>2025</b>	<b>4495</b>
<b>2024</b>	<b>4495</b>

Sumber: DKUKMPP Kabupaten Nunukan (kondisi hingga September 2025)

Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Kecamatan Nunukan tercermin pada Tabel 3. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nunukan. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah UMKM pada tahun 2024 dan 2025 tercatat sama, yaitu sebanyak 4.495 unit usaha.



Stabilnya jumlah UMKM dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor usaha mikro dan kecil tetap menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Kecamatan Nunukan. UMKM berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja serta mendukung aktivitas perdagangan dan jasa, khususnya dalam konteks wilayah perbatasan.

Tabel 3.12.4 Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro/kecil yang didirikan/difasilitasi di Kecamatan Nunukan

Tahun	Jumlah
(1)	(2)
2025	5
2024	1

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan (kondisi hingga September 2025)

Informasi mengenai pengembangan sektor hilir perikanan disajikan pada Tabel 4. Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro/Kecil yang Didirikan/Difasilitasi di Kecamatan Nunukan. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1 unit UPI skala mikro/kecil. Jumlah ini meningkat menjadi 5 unit pada tahun 2025.

Peningkatan jumlah UPI tersebut mengindikasikan adanya penguatan kegiatan pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Nunukan, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan pendapatan masyarakat.



Tabel 3.12.5 Volume Total Perikanan Budidaya sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan

Jenis	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Budidaya Laut	198708.82	155104.72
Tambak	7.08	37.81
Kolam	1.15	5.39
Keramba	-	-
Sawah	-	-

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Ketersediaan bahan baku perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 7. Volume Total Perikanan Budidaya sebagai Dasar Ketersediaan Bahan Baku untuk Pengolahan di Kecamatan Nunukan. Berdasarkan tabel tersebut, produksi perikanan budidaya laut merupakan kontributor terbesar. Pada tahun 2023, volume budidaya laut mencapai 198.708,82 ton, kemudian menurun menjadi 155.104,72 ton pada tahun 2024.

Produksi perikanan budidaya dari tambak mengalami peningkatan dari 7,08 ton pada tahun 2023 menjadi 37,81 ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi dari kolam meningkat dari 1,15 ton menjadi 5,39 ton pada periode yang sama. Jenis budidaya lainnya seperti keramba dan sawah belum tercatat dalam data yang tersedia.



Tabel 3.12.6 Volume Total Perikanan Tangkapan sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan

Jenis	Tahun		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan Laut	553.61	861.18	667.85
Perairan Umum	-	-	-

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, kondisi hingga September 2025

Produksi perikanan tangkapan di Kecamatan Nunukan disajikan pada Tabel 6. Volume Total Perikanan Tangkapan sebagai Dasar Ketersediaan Bahan Baku untuk Pengolahan di Kecamatan Nunukan. Berdasarkan tabel tersebut, volume perikanan tangkapan laut pada tahun 2023 tercatat sebesar 553,61 ton, meningkat menjadi 861,18 ton pada tahun 2024.

Pada tahun 2025, volume perikanan tangkapan laut tercatat sebesar 667,85 ton hingga September 2025. Sementara itu, produksi perikanan tangkapan dari perairan umum belum tercatat dalam data. Data ini menunjukkan bahwa perikanan tangkap laut masih menjadi sumber utama bahan baku perikanan di Kecamatan Nunukan.

Berdasarkan pembahasan tabel-tabel yang tersedia, Kecamatan Nunukan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya pada sektor UMKM dan perikanan. Namun demikian, dari sisi sosial, khususnya pendidikan dan sarana pendukungnya, masih diperlukan upaya peningkatan dan pemerataan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dasar dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Nunukan.



### 3.13. Kecamatan Nunukan Selatan

Kecamatan Nunukan Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Nunukan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan. Dengan luas 181,75 km<sup>2</sup>, kecamatan ini terbagi menjadi empat wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Selisun dan Tanjung Harapan.

Dari aspek sosial, layanan pendidikan dan kesehatan dasar telah tersedia dan menjangkau masyarakat diseluruh wilayah kecamatan. Namun demikian, kualitas sarana dan prasarana serta ketersediaan Sumber Daya Manusia masih memerlukan Penguatan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan dasar menjadi faktor kunci dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.

Pada sektor ekonomi, aktivitas masyarakat didominasi oleh perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan kecil yang berkembang seiring dengan mobilitas penduduk dan aktivitas lintas wilayah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai tulang punggung perekonomian lokal, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan permodalan, akses pasar, serta layanan jasa keuangan formal.

Potensi utama Kecamatan Nunukan Selatan terletak pada sektor perikanan dan kelautan. Perikanan tangkap dan budidaya menjadi sumber penghidupan penting masyarakat, didukung oleh keberadaan jasa kelautan. Penguatan sarana produksi, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta pengembangan sistem pemasaran terintegrasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengembangan Kecamatan Nunukan Selatan sebagai wilayah perbatasan memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta optimalisasi potensi kelautan dan perikanan. Ringkasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan



strategis bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis data dan karakteristik wilayah.

Kecamatan Nunukan Selatan merupakan salah satu kecamatan strategis di Kabupaten Nunukan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letaknya yang berdekatan dengan kawasan perbatasan menjadikan kecamatan ini sebagai simpul aktivitas sosial ekonomi, mobilitas penduduk, serta layanan dasar bagi masyarakat perbatasan.

Data yang disajikan merupakan hasil kompilasi dari Pengambilan data dilapangan secara langsung, Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga data pendukung dari berbagai kementerian, lembaga, dan perangkat daerah terkait. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta menjadi dasar analisis dan perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan wilayah perbatasan.

## GAMBARAN UMUM

Secara administratif, Kecamatan Nunukan Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan dengan Luas Kecamatan adalah sebesar 181.75 km<sup>2</sup>. Kondisi geografis ini memengaruhi pola permukiman penduduk, mata pencaharian, serta potensi ekonomi lokal.

Tabel 3.13.1 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Nunukan Selatan, 2024

Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)
Tanjung Harapan	133,99	62,72
Mansapa	33,52	18,44



Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
(1)	(2)	(3)
Nunukan Selatan	12,28	6,76
Selisun	21,96	12,08
<b>Total</b>	<b>181,75</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

Kelurahan Tanjung Harapan merupakan wilayah terluas dengan 133,99 km<sup>2</sup> (62,72 persen). Mansapa memiliki luas 33,52 km<sup>2</sup> (18,44 persen), Selisun 21,96 km<sup>2</sup> (12,08 persen), dan Nunukan Selatan 12,28 km<sup>2</sup> (6,76 persen). Dominasi luas wilayah Tanjung Harapan menunjukkan potensi pengembangan lahan terbesar berada di wilayah tersebut, baik untuk perikanan, perkebunan, maupun permukiman.

## KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan wilayah perbatasan. Struktur dan dinamika kependudukan di Kecamatan Nunukan Selatan mencerminkan kebutuhan terhadap layanan dasar sekaligus potensi tenaga kerja dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Tabel 3.13.2 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan diKecamatan Nunukan Selatan, 2024

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanjung Harapan	4.025	3.645	7.670
Mansapa	1.891	1.629	3.520
Nunukan Selatan	4.331	3.968	8.299



Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Selisun	4.384	3.908	8.292
Total	14.631	13.150	27.781

Sumber: Kecamatan Nunukan Selatan dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)

Jumlah penduduk Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2024 sebanyak 27.781 jiwa, terdiri dari 14.631 laki-laki dan 13.150 perempuan. Penduduk terbesar berada di Kelurahan Nunukan Selatan (8.299 jiwa) dan Selisun (8.292 jiwa), diikuti Tanjung Harapan (7.670 jiwa) dan Mansapa (3.520 jiwa). Struktur ini menunjukkan konsentrasi aktivitas sosial ekonomi berada pada tiga kelurahan utama, sehingga distribusi layanan publik perlu memperhatikan kepadatan penduduk tersebut.

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Tabel 3.13.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Nunukan Selatan, 2025

Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Ada
Udara	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Tabel 3.13.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Tabel 3.13.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Nunukan Selatan, 2025

Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Perintis	0	0
Bandar Udara Domestik	0	0
Bandar Udara Internasional	0	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas III Nunukan, 2025)

Akses transportasi darat dan air tersedia di wilayah ini, sedangkan akses udara tidak tersedia. Tidak terdapat terminal barang maupun terminal penumpang, serta tidak terdapat bandar udara. Kondisi ini menunjukkan bahwa konektivitas wilayah masih bergantung pada kecamatan lain sebagai simpul transportasi utama. Penguatan infrastruktur logistik menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung aktivitas perdagangan dan perikanan.



## PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

Tabel 3.13.6 Komoditas Perdagangan yang Dipasok dari Negara Lain di Kecamatan Nunukan, 2025

Komoditas	Keadaan Pasokan Komoditas dari Negara Lain	Sumber Pasokan Komoditas
(1)	(2)	(3)
Sembako	Ada	Tidak ada Data
Elpiji	Ada	Tidak ada Data
Bahan Bakar Minyak	Tidak Ada	Tidak ada Data
Alat Transportasi	Tidak Ada	Tidak ada Data
Hasil Pertanian	Tidak Ada	Tidak ada Data
Pakaian	Ada	Tidak ada Data
Bahan Bangunan	Tidak Ada	Tidak ada Data

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Beberapa komoditas seperti sembako, elpiji, dan pakaian diketahui berasal dari negara lain. Hal ini menunjukkan adanya interaksi ekonomi lintas batas yang cukup aktif. Fasilitas ekonomi yang tersedia meliputi 1 pasar permanen, 1 pasar semi permanen, 1 minimarket, dan 3 rumah makan. Tidak terdapat hotel maupun penginapan. Keterbatasan fasilitas jasa akomodasi menunjukkan peluang pengembangan sektor jasa seiring potensi kunjungan wisatawan.



Tabel 3.13.7 Jumlah Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Nunukan Selatan, 2025

No	Fasilitas Ekonomi	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok Pertokoan	-
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	1
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	1
4	Pasar tanpa Bangunan	-
5	Minimarket	1
6	Rumah Makan	3
7	Kedai Makan	-
8	Hotel	0
9	Penginapan	0
10	Toko Kelontong	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

## PARIWISATA

Tabel 3.13.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)
1	Objek wisata	Ada



No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
2	Event tahunan	Tidak Ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak Ada
4	Kunjungan Warga Negara Asing (WNA)	Ada

## PENDIDIKAN

Ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Infrastruktur dasar yang memadai akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan sosial masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan.

Tabel 3.13.9 Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan Selatan berdasarkan Pendidikan Terakhir yang ditamatkan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Tidak Tamat/Belum Sekolah	13.449
2	SD/Sederajat	6.188
3	SMP/Sederajat	2.983
4	SMA/Sederajat	4.334
5	Perguruan Tinggi	2.725
6	Total	29.679

Sumber Data: Disdukcapil , Kondisi Semester 1 2025



Tabel 3.13.10 Jumlah Sarana Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan diKecamatan Nunukan Selatan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	PAUD	11
2	TK	2
3	RA/BA	-
4	SD	6
5	MI	3
6	SMP	4
7	MTs	4
8	SMA	2
9	MA	2
10	SMK	-
11	Perguruan Tinggi	2

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sebanyak 13.449 penduduk tercatat tidak tamat/belum sekolah. Lulusan SD sebanyak 6.188 jiwa, SMP 2.983 jiwa, SMA 4.334 jiwa, dan Perguruan Tinggi 2.725 jiwa. Sarana pendidikan meliputi 11 PAUD, 6 SD, 4 SMP, 2 SMA, 2 MA, dan 2 Perguruan Tinggi. Tidak terdapat SMK. Tingginya proporsi pendidikan rendah menjadi tantangan dalam peningkatan daya saing tenaga kerja. Ketiadaan SMK menjadi celah dalam penyediaan pendidikan vokasi berbasis potensi kelautan.



## KESEHATAN

Tabel 3.13.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Nunukan Selatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Rumah Sakit	-
2	Rumah Sakit Bersalin	-
3	Puskesmas dengan Rawat Inap	1
4	Puskesmas tanpa Rawat Inap	-
5	Puskesmas Pembantu	1
6	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
7	Tempat Praktik Dokter	1
8	Rumah Bersalin	-
9	Tempat Praktik Bidan	5
10	Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)	-
11	Polinedes (Pondok Bersalin Desa)	1
12	Apotek	2
13	Toko Khusus Obat/Jamu	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Akses terhadap sarana kesehatan yang belum tersedia di wilayah kecamatan relatif mudah, didukung oleh infrastruktur transportasi dan layanan dasar. Fasilitas kesehatan yang ada telah dilengkapi dengan listrik, air bersih, dan jaringan internet. Jumlah



tenaga kesehatan dinilai cukup, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri. Fasilitas kesehatan terdiri dari 1 Puskesmas Rawat Inap, 1 Puskesmas Pembantu, 1

Poliklinik, 1 praktik dokter, 5 praktik bidan, 1 Polindes, dan 2 apotek. Tidak terdapat rumah sakit. Meskipun layanan dasar tersedia, masyarakat masih bergantung pada fasilitas kesehatan di luar kecamatan untuk layanan rujukan lanjutan.

## EKONOMI

Aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan kecil yang berkembang seiring dengan dinamika wilayah perbatasan. UMKM berperan penting sebagai penyedia lapangan kerja dan penggerak ekonomi lokal.

Tabel 3.13.12 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Nunukan Selatan

No	Tahun	Jumlah UMKM
(1)	(2)	(3)
1	2025	475
2	2024	475

Sumber: DKUKMPP Kabupaten Nunukan (kondisi hingga September 2025)



Tabel 3.13.13 Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro/kecil yang didirikan/difasilitasi di Kecamatan Nunukan Selatan

No	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	2025	2
2	2024	-

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan (kondisi hingga September 2025)

Tabel 3.13.14 Volume Total Perikanan Budidaya sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan Selatan

Jenis	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Budidaya Laut	427988.21	334071.7
Tambak	3.67	5.21
Kolam	0.61	4.61
Keramba	-	-
Sawah	-	-

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan



Tabel 3.13.15 Volume Total Perikanan Tangkapan sebagai dasar Ketersediaan bahan baku untuk Pengolahan (Ton) di Kecamatan Nunukan Selatan

Jenis	Tahun		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan Laut	275.88	592.94	459.83
Perairan Umum	-	-	-

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, kondisi hingga September 2025

Tabel 3.13.16 Potensi Komoditas Unggulan Menurut Sektor Ekonomi di Kecamatan Nunukan Selatan, Tahun 2025

No	Sektor	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman pangan	Tomat, Jagung, Cabai
2	Hortikultura	Kangkung, Sawi
3	Perkebunan	Kelapa sawit
4	Perikanan darat	-
5	Hasil kehutanan kayu	-
6	Hasil kehutanan non kayu	-
7	Perikanan Tangkap Laut	Udang, Ikan
8	Perikanan Budidaya Laut	Rumput Laut
9	Perikanan Tangkap Darat	Nila, Lele, Patn, Ikan Mas
10	Perikanan Budidaya Darat	Kolam dan Tambak



No	Sektor	Komoditas
(1)	(2)	(3)
11	Jasa Kelautan	Perahu

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Jumlah UMKM tahun 2024 dan 2025 tercatat sebanyak 475 unit, menunjukkan belum adanya pertumbuhan signifikan. Tahun 2025 terdapat 2 Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro/kecil. Volume budidaya laut tahun 2024 mencapai 334.071,7 ton, meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Perikanan tangkap laut menunjukkan fluktuasi, dengan capaian 459,83 ton pada 2025. Komoditas unggulan meliputi tomat, jagung, cabai, kangkung, sawi, kelapa sawit, udang, ikan, rumput laut, serta jasa kelautan (perahu). Hal ini menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi kecamatan.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 1. Penanganan Pendidikan Rendah Usia Produktif (Isu Paling Mendesak)

Data menunjukkan jumlah penduduk tidak tamat/belum sekolah masih sangat tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

Langkah kecamatan:

- Mengidentifikasi warga usia produktif yang belum menyelesaikan pendidikan dasar melalui kelurahan.
- Berkoordinasi dengan UPT pendidikan untuk membuka atau mengaktifkan kembali program kejar paket.
- Mengintegrasikan edukasi kewirausahaan sederhana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.



## 2. Penguatan Nilai Tambah Sektor Perikanan

Produksi budidaya laut sangat besar, namun unit pengolahan ikan masih sangat terbatas.

Langkah kecamatan:

- Memfasilitasi pembentukan minimal satu kelompok pengolahan hasil perikanan di setiap kelurahan pesisir.
- Mengusulkan bantuan alat pengolahan melalui Musrenbang berbasis data produksi.
- Menghubungkan nelayan dengan UMKM pengolah untuk memperkuat rantai nilai lokal.

## 3. Aktivasi dan Pembinaan UMKM (Mengatasi Stagnasi)

Jumlah UMKM tidak mengalami pertumbuhan dalam dua tahun terakhir.

Langkah kecamatan:

- Melakukan pendataan ulang UMKM aktif dan tidak aktif.
- Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha dan pencatatan keuangan sederhana.
- Memberikan ruang promosi produk lokal pada setiap kegiatan kecamatan.

## 4. Penataan dan Penguatan Pasar Lokal

Ketersediaan pasar sudah ada, namun perlu optimalisasi sebagai pusat distribusi ekonomi kecamatan.

Langkah kecamatan:

- Penataan kebersihan dan zonasi sederhana pasar.
- Monitoring harga komoditas utama secara berkala.
- Mendorong hari pasar tematik (misalnya hari produk lokal/perikanan).



## 5. Penguatan Basis Data Kecamatan

Beberapa data strategis seperti sumber listrik dan pasokan komoditas belum lengkap.

Langkah kecamatan:

- Membentuk tim kecil pemutakhiran data berbasis kelurahan.
- Menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan prioritas Musrenbang.



### 3.14. Kecamatan Sebatik Barat

Kecamatan Sebatik Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Pulau Sebatik dan termasuk wilayah perbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 93,27 km<sup>2</sup> dan secara administratif terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Bambang, Liang Bunyu, Binalawan, dan Setabu. Letaknya yang berada di bagian barat Pulau Sebatik memberikan peran strategis dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.

Batas wilayah Kecamatan Sebatik Barat di sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sebatik, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sebatik. Wilayah kecamatan ini didominasi oleh dataran rendah dengan penggunaan lahan berupa permukiman, pertanian, dan perkebunan. Mata pencaharian utama penduduk berasal dari sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan. Aktivitas perdagangan juga berkembang, seiring dengan tingginya mobilitas penduduk dan interaksi lintas wilayah di kawasan perbatasan.

Tabel 3.14.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sebatik Barat, 2024

<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)</b>
(1)	(2)	(3)
Bambang	21,88	23,46
Liang Bunyu	17,84	19,13
Binalawan	18,99	20,36
Setabu	34,56	37,05
<b>Sebatik Barat</b>	<b>93,27</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Sebatik Barat dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)



## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Kondisi infrastruktur ketenagalistrikan di Kecamatan Sebatik Barat menunjukkan capaian yang relatif baik. Berdasarkan Tabel 2, seluruh desa di Kecamatan Sebatik Barat telah teraliri listrik, dengan mayoritas desa menggunakan sumber listrik dari PLN. Tidak terdapat desa yang menggunakan sumber listrik non-PLN maupun sumber listrik lainnya, serta tidak ditemukan desa yang belum teraliri listrik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses listrik di wilayah Kecamatan Sebatik Barat telah menjangkau seluruh desa, sehingga dapat mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat

Tabel 3.14.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	4
Mayoritas listrik non-PLN	0
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Dari aspek transportasi, akses antardesa maupun ke kecamatan lain di Kecamatan Sebatik Barat hanya tersedia melalui jalur darat, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Tidak tersedianya akses transportasi melalui jalur air dan udara menunjukkan bahwa mobilitas penduduk serta distribusi barang sangat bergantung pada kondisi dan kualitas jaringan jalan. Ketergantungan pada satu moda transportasi ini berpotensi menjadi kendala apabila terjadi gangguan pada jaringan darat, terutama



dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Tabel 3.14.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak Ada
Udara	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sarana pendukung transportasi darat di Kecamatan Sebatik Barat masih terbatas. Berdasarkan Tabel 4, belum terdapat terminal transportasi darat, baik terminal barang maupun terminal penumpang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan transportasi darat masih berlangsung tanpa dukungan fasilitas terminal yang terpusat, sehingga pengelolaan arus barang dan penumpang belum optimal. Keterbatasan sarana tersebut dapat memengaruhi efisiensi dan kenyamanan transportasi di wilayah kecamatan.



Tabel 3.14.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 5, Kecamatan Sebatik Barat belum memiliki bandar udara, baik kategori perintis, domestik, maupun internasional. Tidak adanya fasilitas transportasi udara menunjukkan bahwa mobilitas melalui jalur udara sepenuhnya bergantung pada wilayah lain di Kabupaten Nunukan. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya infrastruktur transportasi strategis di Kecamatan Sebatik Barat dan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan konektivitas wilayah perbatasan.

Tabel 3.14.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Perintis	0	0
Bandar Udara Domestik	0	0
Bandar Udara Internasional	0	0



Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas III Nunukan, 2025)

## PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Sebatik Barat memiliki dinamika perdagangan yang dipengaruhi oleh interaksi ekonomi lintas negara. Kedekatan geografis dengan Malaysia turut memengaruhi pola distribusi barang, terutama untuk komoditas tertentu yang lebih mudah atau lebih kompetitif diperoleh dari luar negeri.

Tabel 3.14.6 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sembako	Ada	50%
2	LPG	Ada	20%
3	BBM	Ada	20%
4	Alat Transportasi	Tidak Ada	-
5	Hasil Pertanian	Tidak Ada	-
6	Pakaian	Tidak Ada	-
7	Bahan Bangunan	Tidak Ada	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, komoditas sembako di Kecamatan Sebatik Barat tercatat sebesar 50 persen berasal dari negara lain. Selain itu, LPG dan BBM masing-masing sebesar 20 persen juga berasal dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pokok dan sebagian energi masih memiliki



ketergantungan terhadap pasokan lintas batas, meskipun dalam proporsi yang tidak dominan.

Sementara itu, komoditas seperti alat transportasi, hasil pertanian, pakaian, dan bahan bangunan tidak tercatat berasal dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan non-pokok dan sektor pendukung lainnya masih dipasok dari dalam negeri. Secara umum, struktur perdagangan di Kecamatan Sebatik Barat menunjukkan ketergantungan terbatas pada komoditas tertentu, dengan potensi penguatan distribusi domestik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi wilayah.

Tabel 3.14.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok Pertokoan	1
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	0
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	1
4	Pasar tanpa Bangunan	0
5	Minimarket/Swalayan/Supermarket	0
6	Restoran/Rumah Makan	0
7	Hotel	0
8	Penginapan: Hostel/Motel/Losmen/Wisma	0
9	Toko/Warung Kelontong	25

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Sebatik Barat tahun 2025 menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan masih didominasi oleh usaha skala kecil dan



tradisional. Tercatat terdapat 1 kelompok pertokoan dan 1 pasar dengan bangunan semi permanen, sementara pasar dengan bangunan permanen maupun pasar tanpa bangunan tidak tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pasar rakyat masih terbatas dan belum berkembang secara optimal.

Selain itu, tidak terdapat minimarket, swalayan, supermarket, restoran, rumah makan, hotel, maupun penginapan di wilayah ini. Struktur perdagangan lebih banyak ditopang oleh 25 toko atau warung kelontong yang tersebar di wilayah kecamatan. Keberadaan warung kelontong yang cukup banyak menunjukkan peran penting usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Secara umum, sarana ekonomi di Kecamatan Sebatik Barat masih berskala lokal dan berorientasi pada perdagangan kebutuhan dasar.

## PARIWISATA

Sektor pariwisata di Kecamatan Sebatik Barat pada tahun 2025 menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan data yang tersedia, kecamatan ini memiliki Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang menjadi salah satu aset dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan objek wisata tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan usaha pendukung seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

Tabel 3.14.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik Barat, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Ada
2	Event tahunan	Ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Selain itu, Kecamatan Sebatik Barat juga tercatat menyelenggarakan event tahunan. Kegiatan ini dapat menjadi sarana promosi daerah sekaligus memperkuat identitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Namun demikian, aktivitas pariwisata yang ada belum melibatkan negara lain, meskipun wilayah ini berada di kawasan perbatasan yang berdekatan dengan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata masih berorientasi pada lingkup domestik.

Secara umum, sektor pariwisata di Kecamatan Sebatik Barat memiliki fondasi yang cukup baik dengan adanya objek wisata dan event tahunan, sehingga berpotensi untuk terus dikembangkan melalui peningkatan promosi dan penguatan sarana pendukung.

## PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Sebatik Barat. Berdasarkan data tahun 2025, sarana pendidikan di wilayah ini telah tersedia mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas.

Tabel 3.14.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)	0



No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9
4	Sekolah Dasar (SD)	9
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	0
9	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
10	Madrasah Aliyah (MA)	1
11	Perguruan Tinggi	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada jenjang pendidikan usia dini terdapat 9 PAUD dan 2 Taman Kanak-Kanak, yang menunjukkan tersedianya akses pendidikan awal bagi anak-anak. Pada jenjang pendidikan dasar tersedia 9 Sekolah Dasar (SD), sementara Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak tercatat pada tahun ini. Untuk jenjang menengah pertama, terdapat 2 SMP dan tidak terdapat MTs. Pada jenjang menengah atas tersedia 1 SMK dan 1 MA, sedangkan SMA tidak tersedia.

Namun demikian, belum terdapat perguruan tinggi di Kecamatan Sebatik Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi harus menempuh pendidikan di luar kecamatan.



Secara umum, sarana pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat telah



mencakup jenjang dasar hingga menengah, meskipun ketersediaannya masih terbatas dan belum sepenuhnya merata pada setiap jenis satuan pendidikan.

Tabel 3.14.10 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain ketersediaan satuan pendidikan, dukungan fasilitas penunjang juga menjadi faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Berdasarkan data tahun 2025, fasilitas pendukung pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat telah tersedia, meliputi listrik, air, dan akses internet.

Ketersediaan listrik dan air menjadi kebutuhan dasar dalam operasional satuan pendidikan, termasuk untuk menunjang kenyamanan lingkungan belajar. Sementara itu, akses internet memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran berbasis digital, administrasi sekolah, serta akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Dengan tersedianya fasilitas pendukung tersebut, satuan pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat memiliki infrastruktur dasar yang cukup memadai untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.



## KESEHATAN

Tabel 3.14.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	0
2	Puskesmas rawat inap	0
3	Puskesmas tanpa rawat inap	1
4	Puskesmas pembantu	5
5	Tempat Praktik Dokter	2
6	Tempat Praktik Bidan	1
7	Apotek	2

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih didominasi oleh fasilitas tingkat pertama. Tercatat tidak terdapat rumah sakit maupun puskesmas rawat inap di wilayah ini. Pelayanan kesehatan utama ditopang oleh 1 puskesmas tanpa rawat inap dan 5 puskesmas pembantu yang tersebar untuk menjangkau masyarakat di berbagai desa.

Selain itu, terdapat 2 tempat praktik dokter dan 1 tempat praktik bidan yang turut mendukung pelayanan kesehatan dasar. Untuk pelayanan kefarmasian, tersedia 2 apotek yang melayani kebutuhan obat masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan dasar relatif tersedia, namun untuk penanganan kasus yang memerlukan perawatan intensif atau layanan lanjutan, masyarakat kemungkinan perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar kecamatan. Penguatan kapasitas layanan kesehatan dasar menjadi



penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah ini.

Tabel 3.14.12 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain jumlah sarana kesehatan, ketersediaan fasilitas pendukung menjadi faktor penting dalam menunjang kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data tahun 2025, fasilitas pendukung kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat tercatat telah tersedia, meliputi listrik, air, dan akses internet.

Ketersediaan listrik dan air menjadi kebutuhan dasar dalam operasional fasilitas kesehatan, termasuk untuk pelayanan medis, sanitasi, dan kenyamanan pasien. Sementara itu, akses internet berperan dalam mendukung sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital, koordinasi rujukan, serta komunikasi dengan fasilitas kesehatan lain. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, pelayanan kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat memiliki fondasi operasional yang cukup memadai, meskipun penguatan kapasitas layanan tetap diperlukan.



## INDUSTRI PENGOLAHAN

Tabel 3.14.13 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Barat, 2025

No	Jenis Industri	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman Pangan	Padi
2	Hortikultura	Pisang
3	Perkebunan	Kelapa Sawit, Jagung
4	Hasil Kehutanan Kayu	-
5	Hasil Kehutanan Non Kayu	-
6	Perikanan Tangkap Laut	Ikan,Udang
7	Perikanan Budidaya Laut	Rumput Laut
8	Jasa Kelautan	Angkutan penyebrangan

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sektor industri pengolahan di Kecamatan Sebatik Barat pada tahun 2025 menunjukkan keragaman komoditas yang cukup luas dan berbasis pada potensi sumber daya alam setempat. Pada sektor tanaman pangan, tercatat adanya pengolahan komoditas padi, sementara pada sektor hortikultura terdapat komoditas pisang. Selain itu, sektor perkebunan mencatat komoditas kelapa sawit dan jagung sebagai bagian dari aktivitas pengolahan.

Pada sektor kelautan dan perikanan, terdapat pengolahan hasil perikanan tangkap laut berupa ikan dan udang, serta perikanan budidaya laut berupa rumput laut. Di samping itu, jasa kelautan juga berkembang dalam bentuk angkutan penyebrangan yang mendukung mobilitas barang dan penumpang di wilayah perbatasan. Sementara itu, pada sektor hasil kehutanan kayu dan non kayu tidak tercatat adanya aktivitas industri pengolahan.



Secara umum, struktur industri pengolahan di Kecamatan Sebatik Barat cukup beragam dan didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, serta kelautan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi hilirisasi komoditas lokal yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat perekonomian masyarakat.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Pertama, penguatan sektor perdagangan tradisional melalui peningkatan kualitas pasar semi permanen serta penataan kelompok pertokoan agar lebih tertib dan representatif. Mengingat cukup besarnya peran warung kelontong, pembinaan usaha mikro dan akses permodalan menjadi penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Kedua, pada sektor industri pengolahan, perlu didorong pengembangan hilirisasi komoditas unggulan seperti padi, pisang, kelapa sawit, perikanan tangkap, dan rumput laut. Peningkatan kapasitas produksi, pengolahan pascapanen, serta akses pemasaran dapat memperkuat nilai tambah ekonomi masyarakat.

Ketiga, di bidang kesehatan, mengingat belum tersedianya rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, penguatan fasilitas puskesmas tanpa rawat inap serta peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan menjadi prioritas untuk menjamin akses layanan yang memadai.

Keempat, pada sektor pendidikan, penguatan akses pendidikan menengah serta fasilitasi kerja sama pendidikan lanjutan perlu dipertimbangkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.



### 3.15. Kecamatan Sebatik

Kecamatan Sebatik merupakan salah satu kecamatan di Pulau Sebatik yang berperan sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Secara geografis, Kecamatan Sebatik memiliki luas wilayah sekitar 51.07 km<sup>2</sup> dan secara administratif terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Balansiku, Tanjung Karang, Sei Manurung, dan Padaidi. Posisi wilayahnya yang strategis menjadikan kecamatan ini sebagai simpul utama distribusi barang dan jasa di Pulau Sebatik.

Batas wilayah Kecamatan Sebatik di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sebatik Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sebatik Timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sebatik Barat. Penggunaan lahan di Kecamatan Sebatik relatif beragam, meliputi kawasan permukiman, perdagangan, pertanian, dan fasilitas pelayanan publik. Struktur ekonomi masyarakat cukup heterogen dengan dominasi sektor perdagangan, jasa, serta pertanian dan perikanan.

Tabel 3.15.1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sebatik, 2024

<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)</b>
(1)	(2)	(3)
Balansiku	23,54	46,09
Tanjung Karang	13,98	27,37
Sei Manurung	7,82	15,31
Padaidi	5,73	11,22
<b>Sebatik</b>	<b>51,07</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kecamatan Sebatik dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, 2025)



## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan di Kecamatan Sebatik menunjukkan kondisi yang relatif baik. Berdasarkan Tabel 2, seluruh desa di Kecamatan Sebatik telah teraliri listrik dengan mayoritas sumber listrik berasal dari PLN. Tidak terdapat desa yang menggunakan sumber listrik non-PLN maupun sumber listrik lainnya, serta tidak ditemukan desa yang belum teraliri listrik. Kondisi ini mencerminkan pemerataan akses listrik di wilayah Kecamatan Sebatik, yang berperan penting dalam mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel 3.15.2 Sumber Listrik di Desa di Kecamatan Sebatik, 2025

Sumber Listrik di Desa	Jumlah Desa
(1)	(2)
Mayoritas listrik PLN	4
Mayoritas listrik non-PLN	0
Mayoritas listrik lainnya	0
Tidak teraliri listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Dari aspek transportasi, Kecamatan Sebatik memiliki akses antardesa maupun ke kecamatan lain melalui jalur darat, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Sementara itu, akses transportasi melalui jalur air dan udara belum tersedia. Ketergantungan pada moda transportasi darat menunjukkan bahwa mobilitas penduduk dan distribusi barang sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan jalan. Meskipun demikian, keberadaan akses darat yang menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Sebatik menjadi faktor pendukung utama aktivitas ekonomi dan sosial di kecamatan ini.



Tabel 3.15.3 Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain diKecamatan Sebatik, 2025

Akses Transportasi Antardesa atau ke Kecamatan Lain	Keadaan
(1)	(2)
Darat	Ada
Air	Tidak Ada
Udara	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Sarana penunjang transportasi darat di Kecamatan Sebatik masih tergolong terbatas. Berdasarkan Tabel 4, belum terdapat terminal transportasi darat, baik terminal barang maupun terminal penumpang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan transportasi masih berlangsung tanpa fasilitas terminal yang terorganisasi, sehingga pengelolaan arus barang dan penumpang belum terpusat. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi transportasi, khususnya dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa yang relatif berkembang di Kecamatan Sebatik.

Tabel 3.15.4 Jumlah Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik, 2025

Jenis Terminal	Jumlah
(1)	(2)
Terminal Barang	0
Terminal Penumpang	0



Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 5, Kecamatan Sebatik belum memiliki bandar udara, baik bandar udara perintis, domestik, maupun internasional. Tidak tersedianya fasilitas transportasi udara menunjukkan bahwa mobilitas melalui jalur udara masih sepenuhnya bergantung pada wilayah lain di Kabupaten Nunukan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi strategis masih diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 3.15.5 Jumlah Bandar Udara Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik, 2025

Kategori Bandar Udara	Jumlah	Frekuensi Penerbangan dalam Setahun
(1)	(2)	(3)
Bandar Udara Perintis	0	0
Bandar Udara Domestik	0	0
Bandar Udara Internasional	0	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan Unit Pelaksana Bandar Udara Kelas III Nunukan, 2025)

## PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA

Kecamatan Sebatik sebagai salah satu wilayah perbatasan memiliki aktivitas perdagangan yang cukup dinamis, dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan hubungan sosial ekonomi dengan Malaysia. Kondisi ini tercermin dalam komposisi asal komoditas perdagangan yang beredar di masyarakat.



Tabel 3.15.6 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik, 2025

No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sembako	Ada	70%
2	LPG	Ada	5%
3	BBM	Tidak Ada	-
4	Alat Transportasi	Tidak Ada	-
5	Hasil Pertanian	Ada	10%
6	Pakaian	Tidak Ada	-
7	Bahan Bangunan	Tidak Ada	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, komoditas sembako tercatat sebesar 70 persen berasal dari negara lain, yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan lintas batas untuk kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, LPG tercatat sebesar

5 persen berasal dari luar negeri, sementara BBM tidak tercatat berasal dari negara lain. Terdapat pula 10 persen hasil pertanian yang berasal dari luar negeri, yang mengindikasikan adanya variasi sumber pasokan pada sektor pangan segar.

Adapun komoditas alat transportasi, pakaian, dan bahan bangunan seluruhnya berasal dari dalam negeri. Secara umum, struktur perdagangan di Kecamatan Sebatik menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada komoditas sembako, sementara komoditas lainnya relatif didominasi oleh pasokan domestik. Kondisi ini menggambarkan karakteristik perdagangan



wilayah perbatasan yang masih dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan efisiensi distribusi lintas negara.



Tabel 3.15.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik, 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok Pertokoan	44
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	-
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	-
4	Pasar tanpa Bangunan	1
5	Minimarket/Swalayan/Supermarket	-
6	Restoran/Rumah Makan	3
7	Hotel	-
8	Penginapan: Hostel/Motel/Losmen/Wisma	1
9	Toko/Warung Kelontong	15

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, Kecamatan Sebatik menunjukkan struktur sarana ekonomi yang relatif lebih berkembang dibandingkan wilayah sekitarnya. Terdapat 44 kelompok pertokoan yang menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Selain itu, tersedia 1 pasar tanpa bangunan yang menjadi sarana transaksi perdagangan secara langsung di tingkat lokal.

Di sektor jasa, terdapat 3 restoran atau rumah makan serta 1 penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun demikian, tidak tercatat adanya hotel, minimarket, swalayan, supermarket, maupun pasar dengan bangunan permanen atau semi permanen pada tahun ini. Sementara itu, terdapat 15 toko atau warung kelontong yang tetap berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.



Secara umum, struktur sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Sebatik menunjukkan aktivitas perdagangan yang cukup dinamis, ditandai dengan banyaknya kelompok pertokoan serta keberadaan usaha jasa pendukung, meskipun sektor perdagangan modern masih terbatas.

## PARIWISATA

Pada tahun 2025, Kecamatan Sebatik juga tercatat memiliki Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang menjadi potensi dalam mendukung perekonomian daerah. Keberadaan objek wisata ini menunjukkan adanya daya tarik lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 3.15.8 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Ada
2	Event tahunan	Ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Selain itu, Kecamatan Sebatik menyelenggarakan event tahunan yang berperan dalam memperkuat promosi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Event tersebut dapat menjadi momentum untuk menarik kunjungan dari wilayah sekitar serta meningkatkan perputaran ekonomi di sektor jasa dan perdagangan.

Meskipun secara geografis berada di kawasan perbatasan yang berdekatan dengan Malaysia, aktivitas pariwisata di Kecamatan Sebatik belum melibatkan negara lain. Secara



keseluruhan, sektor pariwisata di kecamatan ini menunjukkan potensi yang cukup baik untuk dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan promosi, kualitas layanan, dan dukungan infrastruktur pariwisata.

## PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Sebatik Barat. Berdasarkan data tahun 2025, sarana pendidikan di wilayah ini telah tersedia mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas.

Tabel 3.15.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik, 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-
2	Taman Kanak-Kanak	-
3	Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)	-
4	Sekolah Dasar (SD)	-
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-
9	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-
10	Madrasah Aliyah (MA)	-



No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-
11	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, pada tabel sarana pendidikan Kecamatan Sebatik seluruh jenjang pendidikan tercatat dengan tanda (-). Kondisi ini menunjukkan bahwa data sarana pendidikan pada tahun tersebut tidak tersedia atau tidak tercatat dalam pendataan.

Dengan demikian, informasi mengenai jumlah dan distribusi sarana pendidikan di Kecamatan Sebatik belum dapat disajikan secara rinci. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi penting untuk mendukung perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, terutama dalam memastikan akses layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Tabel 3.15.10 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Pada tahun 2025, fasilitas pendukung pendidikan di Kecamatan Sebatik juga tercatat tersedia, meliputi listrik, air, dan akses internet. Ketersediaan fasilitas ini menjadi fondasi penting dalam mendukung operasional dan kualitas layanan pendidikan.

Listrik dan air mendukung kebutuhan dasar lingkungan sekolah, sementara internet berperan dalam menunjang kegiatan pembelajaran, pelaporan administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dengan tersedianya fasilitas pendukung tersebut, upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Sebatik memiliki dukungan infrastruktur yang memadai untuk dikembangkan lebih lanjut.

## KESEHATAN

Tabel 3.15.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	1
2	Puskesmas rawat inap	0
3	Puskesmas tanpa rawat inap	1
4	Puskesmas pembantu	1
5	Tempat Praktik Dokter	0
6	Tempat Praktik Bidan	0
7	Apotek	1

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, Kecamatan Sebatik memiliki struktur sarana kesehatan yang sedikit berbeda. Tercatat terdapat 1 rumah sakit yang menjadi fasilitas rujukan utama di wilayah ini. Selain itu,



tersedia 1 puskesmas tanpa rawat inap dan 1 puskesmas pembantu yang mendukung pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Namun demikian, tidak terdapat puskesmas rawat inap, tempat praktik dokter, maupun tempat praktik bidan yang tercatat pada tahun ini. Untuk pelayanan obat-obatan, tersedia 1 apotek. Keberadaan rumah sakit di Kecamatan Sebatik memberikan dukungan penting dalam pelayanan kesehatan lanjutan, meskipun penguatan tenaga kesehatan dan pemerataan layanan dasar tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Tabel 3.15.12 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Pada tahun 2025, fasilitas pendukung kesehatan di Kecamatan Sebatik juga tercatat tersedia secara lengkap, meliputi listrik, air, dan akses internet. Ketersediaan fasilitas ini menjadi elemen penting dalam menunjang operasional sarana kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas yang ada di wilayah tersebut.

Listrik dan air mendukung kebutuhan dasar pelayanan medis, sementara internet memungkinkan pelaksanaan sistem administrasi, pelaporan, serta koordinasi pelayanan yang lebih efektif. Dengan tersedianya fasilitas pendukung tersebut, layanan kesehatan di Kecamatan Sebatik memiliki dukungan infrastruktur yang memadai untuk terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya.



## INDUSTRI PENGOLAHAN

Tabel 3.15.13 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik, 2025

No	Jenis Industri	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman Pangan	-
2	Hortikultura	CPO
3	Perkebunan	-
4	Hasil Kehutanan Kayu	-
5	Hasil Kehutanan Non Kayu	-
6	Perikanan Tangkap Laut	-
7	Perikanan Budidaya Laut	-
8	Jasa Kelautan	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, aktivitas industri pengolahan di Kecamatan Sebatik relatif terbatas. Tercatat hanya sektor hortikultura yang memiliki komoditas pengolahan, yaitu CPO (Crude Palm Oil), yang umumnya berkaitan dengan pengolahan hasil kelapa sawit.

Sementara itu, pada sektor tanaman pangan, perkebunan, hasil kehutanan kayu dan non kayu, perikanan tangkap laut, perikanan budidaya laut, serta jasa kelautan tidak tercatat adanya aktivitas industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kecamatan Sebatik masih terfokus pada komoditas tertentu dan belum berkembang secara merata pada berbagai sektor.



Dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategis wilayah perbatasan, pengembangan industri pengolahan yang lebih beragam dapat menjadi peluang dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Kecamatan Sebatik sebagai wilayah yang memiliki rumah sakit serta aktivitas perdagangan yang cukup dinamis memerlukan kebijakan yang berfokus pada penguatan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Pertama, mengingat tingginya ketergantungan pada komoditas sembako dari luar negeri, perlu dilakukan penguatan distribusi dan pasokan domestik guna meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah. Pengembangan pasar rakyat yang lebih tertata juga dapat mendukung stabilitas perdagangan lokal.

Kedua, pada sektor industri pengolahan yang masih terbatas pada komoditas CPO, diperlukan diversifikasi industri berbasis potensi lokal agar tercipta nilai tambah yang lebih luas serta peluang kerja yang lebih besar.

Ketiga, meskipun telah tersedia rumah sakit, peningkatan tenaga kesehatan dan pemerataan layanan kesehatan dasar tetap menjadi perhatian untuk memastikan akses pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Keempat, ketersediaan data pendidikan yang belum lengkap perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, agar kebijakan di bidang pendidikan dapat disusun secara lebih tepat sasaran.



### **3.16. Kecamatan Sebatik Timur**

Kecamatan Sebatik Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang terletak di wilayah Pulau Sebatik. Kecamatan ini termasuk dalam kategori kecamatan pesisir dengan luas wilayah sebesar 39,41 km<sup>2</sup>. Kondisi geografis wilayah yang berada di kawasan pesisir menyebabkan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang berhadapan langsung dengan perairan laut, sehingga memengaruhi pemanfaatan lahan serta pola permukiman penduduk.

Secara geografis, Kecamatan Sebatik Timur berada di bagian timur Pulau Sebatik dan berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, sehingga termasuk dalam kawasan strategis perbatasan negara. Wilayah kecamatan ini terdiri atas beberapa desa dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan. Letak wilayah yang strategis tersebut memberikan potensi pengembangan wilayah yang cukup besar, sekaligus tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN**

Kondisi demografi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika pembangunan suatu wilayah; mencerminkan potensi sumber daya manusia serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Struktur penduduk menurut jenis kelamin dan sebarannya pada tingkat desa/kelurahan memberikan gambaran mengenai pola permukiman, aktivitas sosial-ekonomi, serta tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, analisis data kependudukan menjadi dasar yang penting dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sebatik Timur.



Tabel 3.16.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Nyamuk	3.259	3.066	6.325
2	Tanjung Harapan	4.025	3.645	7.670
3	Bukit Aru Indah	1.842	1.793	3.635
4	Tanjung Aru	1.437	1.336	2.773
Sebatik Timur		8.101	7.690	15.791

Sumber : Kecamatan Sebatik Timur dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Timur Tahun 2024 tercatat sebanyak 15.791 jiwa, terdiri atas 8.101 laki-laki dan 7.690 perempuan, yang menunjukkan bahwa komposisi penduduk relatif seimbang meskipun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih besar. Desa Tanjung Harapan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 7.670 jiwa, diikuti oleh Sungai Nyamuk sebanyak 6.325 jiwa, yang mengindikasikan konsentrasi penduduk pada desa-desa dengan aktivitas ekonomi dan akses layanan yang lebih berkembang. Sementara itu, Desa Tanjung Aru memiliki jumlah penduduk paling sedikit, mencerminkan kepadatan yang relatif lebih rendah. Pola sebaran ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsentrasi penduduk antardesa yang perlu menjadi perhatian dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan layanan dasar di Kecamatan Sebatik Timur.



## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Transportasi dan infrastruktur merupakan komponen penting dalam menggambarkan tingkat konektivitas dan aksesibilitas suatu kecamatan. Kondisi jaringan jalan, sarana pendukung mobilitas, serta infrastruktur dasar lainnya berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks Kecamatan Sebatik Timur, pembahasan mengenai transportasi dan infrastruktur diperlukan untuk melihat sejauh mana dukungan sarana prasarana yang tersedia mampu menunjang pergerakan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 3.16.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Moda	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Jalur darat	Ada
2	Jalur udara	Tidak
3	Jalur air	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 2, Kecamatan Sebatik Timur memiliki akses transportasi melalui jalur darat dan jalur air, sementara jalur udara tidak tersedia. Ketersediaan jalur darat menunjukkan bahwa mobilitas penduduk dan distribusi barang dapat dilakukan melalui jaringan jalan yang ada, sedangkan jalur air turut mendukung pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi, khususnya dalam konteks wilayah pesisir dan perbatasan. Kombinasi kedua moda tersebut membentuk sistem konektivitas utama di kecamatan ini.

Tidak tersedianya transportasi udara pada tingkat kecamatan bukan semata-mata karena keterbatasan, tetapi karena kebutuhan mobilitas masyarakat pada dasarnya telah dapat terjangkau melalui



jalur darat dan air. Akses menuju pusat-pusat kegiatan dan layanan masih dapat dilakukan dengan moda yang tersedia, sehingga pergerakan orang dan barang tetap berjalan melalui infrastruktur yang ada. Kondisi ini menggambarkan pola transportasi yang menyesuaikan dengan karakteristik geografis dan kebutuhan wilayah.

Berdasarkan Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025, moda transportasi yang digunakan baik antar desa/kelurahan maupun kecamatan lain adalah menggunakan Sepeda Motor dan Mobil. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses jalan di Kecamatan Sebatik Timur sudah baik karena dapat dilalui kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat.

Tabel 3.16.3 Ketersediaan Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Jenis Terminal	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Terminal Penumpang	Tidak Ada
2	Terminal Barang	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 3, di Kecamatan Sebatik Timur tidak tersedia terminal transportasi darat, baik terminal penumpang maupun terminal barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem transportasi darat di wilayah tersebut belum didukung oleh simpul angkutan resmi yang terorganisir. Ketiadaan terminal mengindikasikan bahwa aktivitas naik-turun penumpang serta distribusi barang kemungkinan masih berlangsung secara tersebar dan belum terpusat pada fasilitas khusus, sehingga pengelolaan arus mobilitas darat belum terstruktur secara optimal.

Dalam kaitannya dengan akses transportasi darat, tidak adanya terminal dapat memengaruhi efisiensi pergerakan orang dan



barang, terutama dalam hal keteraturan jadwal, keamanan, serta pengendalian arus logistik. Infrastruktur jalan yang tersedia memang memungkinkan mobilitas tetap berjalan, namun belum ditunjang oleh fasilitas pendukung yang berfungsi sebagai titik konsolidasi transportasi. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa penguatan sarana pendukung transportasi darat masih menjadi aspek penting dalam pengembangan konektivitas wilayah Kecamatan Sebatik Timur.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan Indonesia merupakan persoalan strategis yang berkaitan dengan keterbatasan akses distribusi, infrastruktur transportasi, serta jarak dari pusat pasokan energi. Kondisi geografis dan dinamika perdagangan lintas batas sering kali memengaruhi stabilitas ketersediaan BBM, sehingga pasokan menjadi rentan terhadap gangguan. Di kawasan perbatasan, BBM tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai penopang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi, sehingga setiap gangguan ketersediaan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025, dalam setahun terakhir, telah terjadi kelangkaan BBM di Kecamatan Sebatik Timur, terutama pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan terakhir. Kelangkaan BBM di Kecamatan Sebatik Timur dipengaruhi oleh ketergantungan pasokan dari luar wilayah serta kelancaran distribusi yang sangat bergantung pada akses transportasi. Ketika terjadi hambatan logistik atau keterlambatan pengiriman, pasokan BBM dapat terganggu dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tingginya konsumsi BBM untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan turut meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan pasokan di tingkat lokal.

Berbicara terkait kelangkaan BBM, hal tersebut juga berpengaruh terhadap persentase pasokan BBM di Kecamatan Sebatik Timur yang berasal dari Indonesia. Diketahui bahwa pada



Tahun 2025, persentase pasokan BBM yang berasal dari Indonesia adalah 50 sampai 75 persen, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masyarakat belum sepenuhnya ditopang oleh distribusi domestik. Adapun sisanya dipenuhi dari Malaysia, yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Sebatik, didorong oleh harga yang relatif lebih murah serta akses distribusi yang lebih mudah melalui berbagai jalur lintas batas tidak resmi. Kondisi ini mencerminkan adanya disparitas harga dan kemudahan akses antarnegara yang memengaruhi pola pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain BBM, ketersediaan listrik juga menjadi aspek penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sebatik Timur. Listrik berperan dalam menunjang kegiatan rumah tangga, layanan publik, usaha perdagangan, hingga sektor perikanan dan jasa. Stabilitas dan kecukupan pasokan listrik sangat menentukan kelancaran produktivitas serta kualitas pelayanan dasar di wilayah perbatasan, sehingga infrastruktur ketenagalistrikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan ketahanan energi daerah.

Tabel 3.16.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Sumber Listrik Utama	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)
1	PLN	4
2	Non PLN	0
3	Genset	0
4	Tidak ada listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh desa di Kecamatan Sebatik Timur pada tahun 2025 telah menggunakan listrik yang bersumber



dari PLN sebagai sumber utama, dengan jumlah sebanyak 4 desa. Tidak terdapat desa yang bergantung pada sumber listrik non-PLN, genset, maupun yang tidak memiliki akses listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan layanan listrik di wilayah tersebut telah menjangkau seluruh desa secara formal dan terintegrasi dalam sistem kelistrikan nasional.

Keberadaan pasokan listrik PLN di seluruh desa mencerminkan ketersediaan infrastruktur dasar yang relatif merata dalam mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan tidak adanya desa yang mengalami ketiadaan listrik, Kecamatan Sebatik Timur memiliki fondasi yang cukup baik dalam aspek ketenagalistrikan, yang menjadi elemen penting dalam menunjang stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

## **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kecamatan Sebatik Timur memiliki dinamika perdagangan dan jasa yang khas serta dipengaruhi oleh interaksi ekonomi lintas batas. Kedekatan geografis, perbedaan harga, dan kemudahan akses distribusi membentuk pola pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik untuk komoditas energi, kebutuhan pokok, maupun barang konsumsi lainnya. Aktivitas perdagangan dan layanan jasa berkembang seiring dengan mobilitas penduduk dan arus barang yang cukup intensif, sehingga sektor ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian lokal sekaligus mencerminkan kuatnya keterkaitan ekonomi antara wilayah perbatasan dan negara tetangga.

Tabel 3.16.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sembako	Ada	45%



No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2	LPG	Ada	60%
3	BBM	Ada	70%
4	Alat Transportasi	Ada	2%
5	Hasil Pertanian	Tidak Ada	-
6	Pakaian	Ada	25%
7	Bahan Bangunan	Tidak Ada	-
8	Industri Pengolahan	Ada	8%

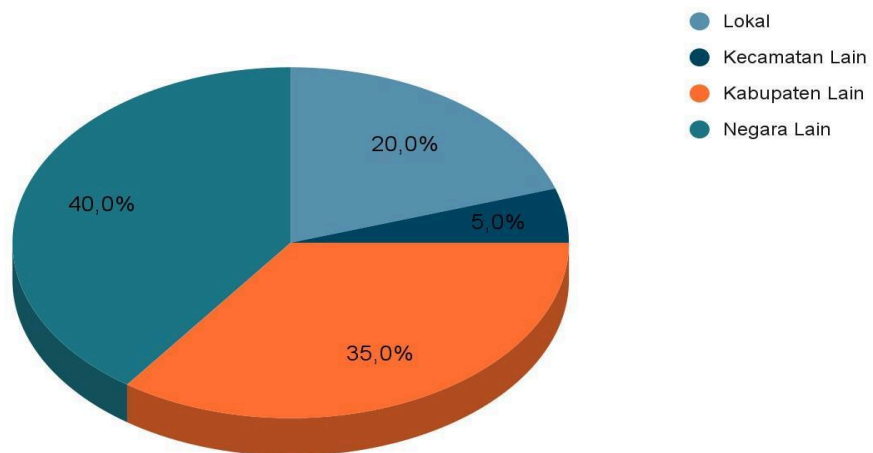
Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 5, sebagian komoditas perdagangan di Kecamatan Sebatik Timur pada tahun 2025 masih memiliki pasokan yang berasal dari negara lain, dengan tingkat ketergantungan yang berbeda-beda. Komoditas energi menempati proporsi tertinggi, yakni BBM sebesar 70 persen dan LPG 60 persen, diikuti sembako sebesar 45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi dan sebagian kebutuhan pokok masyarakat cukup dipengaruhi oleh arus barang lintas batas, yang berperan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan di pasar lokal.

Sementara itu, komoditas pakaian tercatat sebesar 25 persen, industri pengolahan 8 persen, dan alat transportasi 2 persen, yang menunjukkan kontribusi dari negara lain relatif lebih terbatas pada kelompok ini. Adapun hasil pertanian dan bahan bangunan tidak bersumber dari negara lain, mengindikasikan bahwa pemenuhannya berasal dari dalam negeri atau produksi lokal. Secara umum, struktur persentase tersebut menggambarkan bahwa ketergantungan lintas batas di Sebatik Timur lebih dominan pada komoditas energi dan konsumsi rumah tangga, sementara beberapa komoditas lainnya telah ditopang oleh sumber domestik.

Struktur sumber pasokan barang merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pola distribusi dan ketahanan ekonomi suatu wilayah. Di kawasan perbatasan seperti Kecamatan Sebatik Timur, arus barang tidak hanya dipengaruhi oleh produksi lokal, tetapi juga oleh keterhubungan dengan wilayah lain, baik dalam lingkup kabupaten maupun lintas negara. Komposisi sumber pasokan tersebut mencerminkan sejauh mana kemandirian wilayah serta tingkat ketergantungan terhadap jaringan distribusi eksternal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gambar 3.11 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang di Kecamatan Sebatik Timur, 2025



Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Gambar 1, distribusi sumber pasokan barang di Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari negara lain sebesar 40 persen, diikuti oleh kabupaten lain sebesar 35 persen, lokal sebesar 20 persen, dan kecamatan lain sebesar 5 persen. Komposisi ini menggambarkan bahwa struktur pasokan barang di wilayah tersebut cukup dipengaruhi oleh arus distribusi eksternal, baik dari luar negeri maupun dari daerah lain dalam kabupaten.



Proporsi pasokan lokal yang sebesar 20 persen menunjukkan adanya kontribusi produksi atau distribusi dari dalam wilayah sendiri, meskipun belum menjadi sumber utama. Sementara itu, porsi yang relatif kecil dari kecamatan lain (5 persen) mengindikasikan bahwa interaksi distribusi antar kecamatan dalam satu kabupaten belum dominan. Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan bahwa Kecamatan Sebatik Timur memiliki keterkaitan pasokan yang kuat dengan wilayah di luar dirinya, terutama dengan negara lain dan daerah lain dalam kabupaten, yang membentuk karakter perdagangan khas wilayah perbatasan.

Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi menjadi indikator penting dalam menggambarkan dinamika aktivitas perdagangan dan jasa di suatu wilayah. Di Kecamatan Sebatik Timur, keberadaan fasilitas seperti pasar, pertokoan, toko kelontong, hingga akomodasi tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan struktur distribusi barang dan layanan yang berkembang di kawasan perbatasan. Komposisi dan jumlah fasilitas tersebut memberikan gambaran mengenai pola konsumsi, skala usaha, serta pergerakan ekonomi lokal.

Tabel 3.16.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok Pertokoan	1
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	0
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	3
4	Pasar tanpa Bangunan	0
5	Minimarket/Swalayan/Supermarket	6
6	Restoran/Rumah Makan	8



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
7	Hotel	4
8	Penginapan: Hostel/Motel/Losmen/Wisma	1
9	Toko/Warung Kelontong	68

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 6, struktur sarana ekonomi di Kecamatan Sebatik Timur didominasi oleh toko/warung kelontong sebanyak 68 unit, yang menegaskan bahwa perdagangan ritel skala kecil menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Keberadaan 6 minimarket/swalayan/supermarket dan 1 kelompok pertokoan menunjukkan adanya variasi bentuk usaha yang melengkapi sistem distribusi lokal. Untuk fasilitas pasar, terdapat 3 pasar dengan bangunan semi permanen, sementara pasar dengan bangunan permanen maupun pasar tanpa bangunan tidak tersedia di dalam wilayah kecamatan.

Ketiadaan pasar permanen di wilayah ini membuat masyarakat harus mengakses fasilitas terdekat yang berjarak sekitar

12 km dari Kantor Kecamatan Sebatik Timur, sedangkan pasar tanpa bangunan terdekat berjarak sekitar 36 km. Jarak tersebut berimplikasi pada biaya dan waktu tempuh masyarakat dalam mengakses pusat perdagangan yang lebih besar. Di sisi lain, sektor jasa juga berkembang dengan adanya 8 restoran/rumah makan, 4 hotel, dan 1 penginapan, yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi Sebatik Timur bertumpu pada jaringan perdagangan lokal dengan dukungan fasilitas yang masih berkembang dan terhubung dengan pusat perdagangan di luar wilayah kecamatan.

Komoditas unggulan Kecamatan Sebatik Timur, yaitu kelapa sawit, kakao, dan pisang, memiliki peran strategis dalam menopang



struktur ekonomi wilayah yang berbasis agribisnis. Kelapa sawit menjadi komoditas utama dengan potensi areal yang luas di Pulau Sebatik dan dinilai memiliki prospek investasi serta pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah di tingkat lokal, sebagaimana diberitakan dalam beberapa laporan media terkait potensi sawit di Sebatik. Kakao juga menjadi komoditas penting yang mendapat dukungan program peremajaan dan bantuan bibit guna menjaga produktivitas perkebunan rakyat, menunjukkan komitmen peningkatan daya saing komoditas ini.

Sementara itu, pisang sebagai komoditas hortikultura banyak dibudidayakan masyarakat dan turut dipasarkan hingga ke wilayah Malaysia, mencerminkan keterkaitan perdagangan lintas batas yang menjadi karakter khas Sebatik. Integrasi antara produksi sawit, kakao, dan pisang dengan jaringan pasar domestik maupun lintas negara menunjukkan bahwa komoditas unggulan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan perdagangan di Kecamatan Sebatik Timur.

## **PARIWISATA**

Sektor pariwisata di Kecamatan Sebatik Timur merupakan salah satu potensi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi berbasis jasa dan meningkatkan aktivitas sosial masyarakat. Keberadaan objek daya tarik wisata, penyelenggaraan event tahunan, serta pola keterlibatan pengunjung menjadi indikator penting dalam melihat dinamika pariwisata di wilayah perbatasan. Pengelolaan potensi wisata secara terarah dapat memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas wilayah.



Tabel 3.16.7 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Lumbis Ogong, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Ada
2	Event tahunan	Ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 7, pada tahun 2025 Kecamatan Sebatik Timur memiliki Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan menyelenggarakan event tahunan. ODTW yang tercatat meliputi Pantai Indah di Desa Tanjung Aru dan Pantai Marina di Desa Bukit Aru Indah (BAI), yang menjadi pusat aktivitas wisata masyarakat. Keberadaan event tahunan menunjukkan adanya upaya institusional dalam menjaga keberlangsungan dan daya tarik kegiatan pariwisata melalui agenda yang terjadwal.

Namun demikian, kegiatan pariwisata tersebut tidak melibatkan negara lain, sehingga cakupan kunjungan masih bersifat domestik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Sebatik Timur telah memiliki dasar potensi yang jelas, meskipun skalanya masih terbatas pada lingkup lokal dan nasional.

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, Kecamatan Sebatik Timur memerlukan dukungan pemerintah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dukungan tersebut meliputi penyusunan kebijakan yang berpihak pada penguatan destinasi lokal, peningkatan promosi wisata secara lebih luas, serta pemberian bantuan permodalan bagi pelaku usaha pariwisata. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola destinasi menjadi aspek penting guna meningkatkan kualitas layanan. Penyediaan dan



peningkatan infrastruktur pendukung pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), seperti akses jalan, fasilitas umum, dan sarana penunjang lainnya, juga diperlukan agar potensi pariwisata di Sebatik Timur dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing.

## PENDIDIKAN

Ketersediaan sarana pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas pelayanan dasar suatu wilayah. Jumlah dan sebaran satuan pendidikan pada setiap jenjang mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal, sekaligus menggambarkan kesiapan daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Di Kecamatan Sebatik Timur, struktur sarana pendidikan menjadi aspek strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi wilayah perbatasan.

Tabel 3.16.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)	3
4	Sekolah Dasar (SD)	4
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	5
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	3
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-



No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
9	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
10	Madrasah Aliyah (MA)	2
11	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 8, pada jenjang pendidikan usia dini terdapat 8 PAUD, 2 Taman Kanak-Kanak (TK), dan 3 RA/BA, yang menunjukkan perhatian terhadap pendidikan pra-dasar. Pada jenjang pendidikan dasar tersedia 4 SD dan 5 MI, sehingga layanan pendidikan setara sekolah dasar relatif memadai. Untuk jenjang menengah pertama terdapat 2 SMP dan 3 MTs, yang mendukung keberlanjutan pendidikan setelah tingkat dasar.

Pada jenjang menengah atas, tidak terdapat SMA, namun tersedia 1 SMK dan 2 MA. Selain itu, tidak terdapat perguruan tinggi di Kecamatan Sebatik Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun layanan pendidikan telah tersedia hingga jenjang menengah atas, pilihan pendidikan umum tingkat atas masih terbatas, dan akses pendidikan tinggi mengharuskan masyarakat melanjutkan studi ke luar wilayah kecamatan. Jarak dari Kantor Kecamatan Sebatik Timur ke SMA terdekat adalah 8 km, sedangkan ke Perguruan Tinggi terdekat adalah 45 km.



Tabel 3.16.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan merupakan faktor strategis dalam menjamin mutu proses belajar mengajar. Selain jumlah satuan pendidikan, keberadaan sarana penunjang seperti listrik, air bersih, dan akses internet menjadi indikator penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang layak dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan kondisi tahun 2025, seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Sebatik Timur telah didukung oleh ketersediaan listrik, air bersih, dan akses internet. Keberadaan listrik memastikan kelancaran operasional kegiatan belajar mengajar, termasuk penggunaan perangkat elektronik dan media pembelajaran. Ketersediaan air bersih mendukung standar kesehatan dan sanitasi lingkungan sekolah. Sementara itu, akses internet memperluas peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, administrasi sekolah, serta akses terhadap sumber belajar digital.

Secara keseluruhan, tersedianya fasilitas pendukung tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dasar pendidikan di Kecamatan Sebatik Timur telah memadai, sehingga dapat menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penguatan daya saing sumber daya manusia.



## KESEHATAN

Ketersediaan sarana kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di suatu wilayah. Bagi Kecamatan Sebatik Timur yang berada di kawasan perbatasan, keberadaan fasilitas kesehatan memiliki peran strategis dalam menjamin akses pelayanan dasar sekaligus mendukung ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap jumlah dan jenis sarana kesehatan tahun 2025 menjadi relevan untuk menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Tabel 3.16.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas rawat inap	-
3	Puskesmas tanpa rawat inap	1
4	Puskesmas pembantu	1
5	Tempat Praktik Dokter	5
6	Tempat Praktik Bidan	1
7	Apotek	7

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan sarana kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025, fasilitas kesehatan yang tersedia masih didominasi oleh pelayanan tingkat pertama. Tercatat tidak terdapat rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, sehingga pelayanan kesehatan lanjutan dan perawatan



intensif belum dapat diakses secara langsung di wilayah kecamatan dan memerlukan rujukan ke daerah lain.

Fasilitas yang tersedia meliputi satu puskesmas tanpa rawat inap dan satu puskesmas pembantu yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan umum, pengobatan ringan, serta layanan promotif dan preventif. Selain itu, terdapat lima tempat praktik dokter, satu tempat praktik bidan, dan tujuh apotek. Jumlah apotek yang relatif lebih banyak menunjukkan ketersediaan akses obat yang cukup memadai, sementara praktik dokter turut mendukung pemenuhan kebutuhan layanan medis dasar masyarakat.

Secara keseluruhan, struktur sarana kesehatan di Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar telah tersedia, namun belum didukung oleh fasilitas rawat inap atau layanan rujukan lanjutan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan bagi masyarakat setempat.

Tabel 3.16.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan fasilitas pendukung merupakan unsur penting dalam menjamin mutu dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.



Selain keberadaan tenaga medis dan sarana pelayanan, dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan akses internet menjadi faktor strategis dalam menunjang operasional fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2025, seluruh fasilitas kesehatan di Kecamatan Sebatik Timur telah didukung oleh ketersediaan listrik, air, dan akses internet. Ketersediaan listrik memastikan kelancaran operasional peralatan medis, penerangan, serta penyimpanan obat dan vaksin yang memerlukan suhu terkontrol. Dukungan air bersih berperan penting dalam menjaga standar kebersihan, sanitasi, dan pencegahan infeksi di lingkungan pelayanan kesehatan. Sementara itu, akses internet memperkuat sistem administrasi dan pelaporan, mendukung pemanfaatan sistem informasi kesehatan, serta membuka peluang penerapan layanan telemedicine dan koordinasi rujukan secara lebih cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, tersedianya fasilitas pendukung tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dasar pelayanan kesehatan di Kecamatan Sebatik Timur telah memadai dari sisi operasional. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan.

## **INDUSTRI PENGOLAHAN**

Keberadaan industri pengolahan di suatu wilayah mencerminkan tingkat pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus menunjukkan dinamika perekonomian lokal. Bagi Kecamatan Sebatik Timur yang berada di kawasan perbatasan, pengembangan industri pengolahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, identifikasi jenis industri dan komoditas yang diolah menjadi penting untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah pada tahun 2025.



Tabel 3.16.12 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Timur, 2025

No	Jenis Industri	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman Pangan	-
2	Hortikultura	Pisang
3	Perkebunan	-
4	Hasil Kehutanan Kayu	Kayu Bulat
5	Hasil Kehutanan Non Kayu	-
6	Perikanan Tangkap Laut	Ikan Tenggiri
7	Perikanan Budidaya Laut	Rumput Laut
8	Jasa Kelautan	Perahu

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan data tahun 2025, industri pengolahan di Kecamatan Sebatik Timur masih terkonsentrasi pada beberapa sektor tertentu. Pada sektor hortikultura, komoditas yang diolah adalah pisang, yang menunjukkan adanya pemanfaatan hasil pertanian lokal untuk kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, pada sektor hasil kehutanan kayu, komoditas yang tercatat adalah kayu bulat, yang mengindikasikan aktivitas pengolahan atau pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat.

Di sektor kelautan dan perikanan, terdapat industri pengolahan yang berbasis pada perikanan tangkap laut dengan komoditas ikan tenggiri, serta perikanan budidaya laut dengan komoditas rumput laut. Selain itu, keberadaan jasa kelautan dengan komoditas perahu menunjukkan adanya aktivitas pendukung sektor maritim, baik dalam bentuk pembuatan, perawatan, maupun penyediaan sarana transportasi laut. Hal ini mencerminkan bahwa



potensi wilayah pesisir dan laut menjadi salah satu penopang utama kegiatan ekonomi di Kecamatan Sebatik Timur.

Sebaliknya, pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan hasil kehutanan non-kayu belum tercatat adanya komoditas industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian potensi sumber daya di sektor tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk kegiatan industri bernilai tambah. Secara keseluruhan, struktur industri pengolahan di Kecamatan Sebatik Timur tahun 2025 masih didominasi oleh sektor kelautan, perikanan, serta sebagian hortikultura dan kehutanan kayu. Ke depan, diperlukan upaya diversifikasi dan penguatan kapasitas industri agar potensi sumber daya lokal dapat diolah secara lebih optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembangunan fasilitas pendukung transportasi darat seperti terminal penumpang dan terminal barang agar arus mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas menjadi lebih tertata. Di samping itu, pemanfaatan jalur air sebagai ciri khas wilayah pesisir perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dermaga dan sarana penunjang lainnya sehingga konektivitas antarwilayah semakin lancar.

Kondisi kelangkaan BBM dalam periode tertentu menunjukkan perlunya perbaikan sistem distribusi dan pengawasan pasokan. Pemerintah dapat mendorong peningkatan kuota sesuai kebutuhan riil masyarakat, memperkuat koordinasi distribusi, serta menyediakan fasilitas penyimpanan yang memadai. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan lintas batas dan menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengingat belum tersedianya rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, diperlukan langkah bertahap untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap atau penyediaan layanan penunjang



medis yang lebih lengkap. Hal ini akan membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih komprehensif tanpa harus keluar dari wilayah kecamatan.

Ketersediaan satuan pendidikan hingga jenjang menengah sudah cukup memadai, namun ketiadaan SMA dan perguruan tinggi di dalam kecamatan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah dapat mendorong pendirian SMA negeri atau membuka akses pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di luar daerah, termasuk pemanfaatan sistem pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau lebih banyak peserta didik.

Potensi komoditas seperti kelapa sawit, kakao, pisang, hasil perikanan, dan rumput laut perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah di tingkat lokal. Dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta kemudahan perizinan bagi pelaku usaha kecil dan menengah akan mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Tingginya persentase pasokan barang dari negara lain, terutama untuk komoditas energi dan sembako, menunjukkan perlunya penguatan produksi dan distribusi domestik. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan sentra produksi lokal, peningkatan kerja sama antarwilayah dalam kabupaten, serta pengawasan perdagangan lintas batas agar keseimbangan pasokan tetap terjaga.

Keberadaan objek wisata seperti Pantai Indah dan Pantai Marina dapat terus dikembangkan melalui perbaikan akses jalan, penyediaan fasilitas umum, serta promosi yang lebih luas. Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pendukung, seperti kuliner dan penginapan, akan memperkuat dampak ekonomi sektor pariwisata bagi warga sekitar.



### **3.17. Kecamatan Sebatik Tengah**

Kecamatan Sebatik Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah Pulau Sebatik dengan luas wilayah sebesar 47,71 km<sup>2</sup>. Kecamatan ini tidak termasuk kecamatan pesisir, sehingga karakter wilayahnya didominasi oleh daratan. Pola permukiman masyarakat umumnya berada di atas lahan darat dan tidak terdapat permukiman di atas permukaan air laut, yang mencerminkan kondisi fisik wilayah yang relatif lebih stabil untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur.

Karakter wilayah daratan tersebut memengaruhi pola mobilitas dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Sebatik Tengah, yang lebih mengandalkan transportasi jalur darat dalam mendukung pergerakan penduduk dan distribusi barang. Dengan kondisi geografis tersebut, pengembangan jaringan jalan dan fasilitas pendukung transportasi darat menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran mobilisasi, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi pengembangan wilayah di Kecamatan Sebatik Tengah sangat terkait dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pemanfaatan ruang daratan secara optimal.

### **DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN**

Kondisi demografi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika pembangunan suatu wilayah; mencerminkan potensi sumber daya manusia serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Struktur penduduk menurut jenis kelamin dan sebarannya pada tingkat desa/kelurahan memberikan gambaran mengenai pola permukiman, aktivitas sosial-ekonomi, serta tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, analisis data kependudukan menjadi dasar yang penting dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sebatik Tengah.



Tabel 3.17.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Limau	1.749	1.623	3.372
2	Maspul	479	439	918
3	Aji Kuning	2.046	1.891	3.937
4	Bukit Harapan	696	662	1.358
Sebatik Tengah		4.970	4.615	9.585

Sumber: Kecamatan Sebatik Tengah dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Tabel 1, jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2024 tercatat sebanyak 9.585 jiwa, terdiri atas 4.970 laki-laki dan 4.615 perempuan, yang menunjukkan komposisi penduduk relatif seimbang dengan jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi. Desa Aji Kuning merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar (3.937 jiwa), disusul Sungai Limau (3.372 jiwa), sedangkan Maspul memiliki jumlah penduduk paling sedikit (918 jiwa). Perbedaan distribusi ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk pada desa-desa tertentu yang berpotensi memiliki akses dan aktivitas ekonomi lebih berkembang, sehingga memerlukan perhatian dalam pemerataan pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur di seluruh wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Transportasi dan infrastruktur merupakan komponen penting dalam menggambarkan tingkat konektivitas dan aksesibilitas suatu



kecamatan. Kondisi jaringan jalan, sarana pendukung mobilitas, serta infrastruktur dasar lainnya berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks Kecamatan Sebatik Tengah, pembahasan mengenai transportasi dan infrastruktur diperlukan untuk melihat sejauh mana dukungan sarana prasarana yang tersedia mampu menunjang pergerakan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 3.17.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Moda	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Jalur darat	Ada
2	Jalur udara	Tidak
3	Jalur air	Tidak

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 2, Kecamatan Sebatik Tengah memiliki akses transportasi melalui jalur darat saja, sementara jalur udara dan air tidak tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas mobilitas penduduk, distribusi barang, serta konektivitas antarwilayah sepenuhnya bergantung pada infrastruktur jalan. Ketergantungan pada satu moda transportasi menjadikan jalur darat sebagai infrastruktur yang sangat strategis. Jalur ini tidak hanya menopang pergerakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan administrasi, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi komoditas dan barang kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kualitas, kapasitas, dan keberlanjutan infrastruktur jalan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi wilayah. Tidak tersedianya jalur udara dan jalur air membatasi alternatif transportasi, terutama dalam mendukung efisiensi logistik atau mobilitas jarak jauh. Oleh karena itu,



penguatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat perlu menjadi prioritas kebijakan agar konektivitas tetap terjaga serta mampu mendukung perkembangan ekonomi Kecamatan Sebatik Tengah secara optimal. Berdasarkan Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025, moda transportasi yang digunakan baik antar desa/kelurahan maupun kecamatan lain adalah menggunakan Sepeda Motor dan Mobil. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses jalan di Kecamatan Sebatik Timur sudah baik karena dapat dilalui kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat.

Tabel 3.17.3 Ketersediaan Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Jenis Terminal	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Terminal Penumpang	Tidak Ada
2	Terminal Barang	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 3, di Kecamatan Sebatik Tengah tidak tersedia terminal transportasi darat, baik terminal penumpang maupun terminal barang. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem angkutan darat di wilayah tersebut belum didukung oleh fasilitas simpul transportasi yang memadai. Ketiadaan terminal menyebabkan aktivitas pemberangkatan dan kedatangan penumpang serta distribusi barang berlangsung tanpa pusat layanan yang terintegrasi, sehingga tata kelola pergerakan orang dan barang belum tertata secara efektif dan efisien.

Dalam kaitannya dengan akses transportasi darat, tidak adanya terminal dapat memengaruhi efisiensi pergerakan orang dan barang, terutama dalam hal keteraturan jadwal, keamanan, serta pengendalian arus logistik. Infrastruktur jalan yang tersedia memang memungkinkan mobilitas tetap berjalan, namun belum ditunjang oleh



fasilitas pendukung yang berfungsi sebagai titik konsolidasi transportasi. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa penguatan sarana pendukung transportasi darat masih menjadi aspek penting dalam pengembangan konektivitas wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan Indonesia merupakan persoalan strategis yang berkaitan dengan keterbatasan akses distribusi, infrastruktur transportasi, serta jarak dari pusat pasokan energi. Kondisi geografis dan dinamika perdagangan lintas batas sering kali memengaruhi stabilitas ketersediaan BBM, sehingga pasokan menjadi rentan terhadap gangguan. Di kawasan perbatasan, BBM tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai penopang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi, sehingga setiap gangguan ketersediaan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025, tidak terjadinya kelangkaan BBM di Kecamatan Sebatik Tengah dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan energi relatif stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Stabilitas ini tidak terlepas dari dinamika wilayah perbatasan yang memiliki intensitas mobilitas darat cukup tinggi, termasuk melalui jalur lintas batas yang tidak resmi. Keberadaan jalur tersebut secara faktual memperluas akses pasokan dan berperan sebagai mekanisme penyeimbang ketika distribusi dari dalam negeri mengalami keterbatasan.

Dalam perspektif ekonomi wilayah, kondisi ini mencerminkan adanya sistem pasokan yang bersifat adaptif terhadap tekanan permintaan. Namun demikian, ketergantungan pada pola distribusi semacam itu juga menunjukkan perlunya penguatan sistem distribusi energi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, agar stabilitas pasokan tetap terjaga tanpa bergantung pada mekanisme yang berada di luar pengawasan formal.



Diketahui bahwa pada Tahun 2025, persentase pasokan BBM yang berasal dari Indonesia di Kecamatan Sebatik Tengah adalah 50 sampai 75 persen, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masyarakat belum sepenuhnya ditopang oleh distribusi domestik. Adapun sisanya dipenuhi dari Malaysia, yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Sebatik, didorong oleh harga yang relatif lebih murah serta akses distribusi yang lebih mudah melalui berbagai jalur lintas batas tidak resmi. Kondisi ini mencerminkan adanya disparitas harga dan kemudahan akses antarnegara yang memengaruhi pola pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain BBM, ketersediaan listrik juga menjadi aspek penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sebatik Tengah. Listrik berperan dalam menunjang kegiatan rumah tangga, layanan publik, usaha perdagangan, hingga sektor perikanan dan jasa. Stabilitas dan kecukupan pasokan listrik sangat menentukan kelancaran produktivitas serta kualitas pelayanan dasar di wilayah perbatasan, sehingga infrastruktur ketenagalistrikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan ketahanan energi daerah.

Tabel 3.17.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Sumber Listrik Utama	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)
1	PLN	4
2	Non PLN	0
3	Genset	0
4	Tidak ada listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Berdasarkan Tabel 4, seluruh desa di Kecamatan Sebatik Tengah pada tahun 2025 telah menggunakan listrik yang bersumber dari PLN sebagai sumber utama, dengan jumlah sebanyak 4 desa. Tidak terdapat desa yang bergantung pada sumber listrik non-PLN, genset, maupun yang tidak memiliki akses listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan layanan listrik di wilayah tersebut telah menjangkau seluruh desa secara formal dan terintegrasi dalam sistem kelistrikan nasional.

Keberadaan pasokan listrik PLN di seluruh desa mencerminkan ketersediaan infrastruktur dasar yang relatif merata dalam mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan tidak adanya desa yang mengalami ketiadaan listrik, Kecamatan Sebatik Tengah memiliki fondasi yang cukup baik dalam aspek ketenagalistrikan, yang menjadi elemen penting dalam menunjang stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

## **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Sebagai wilayah yang berada di kawasan perbatasan, Kecamatan Sebatik Tengah memiliki struktur perdagangan dan jasa yang terbentuk oleh interaksi ekonomi lintas negara. Kedekatan geografis dengan wilayah tetangga, perbedaan tingkat harga komoditas, serta kemudahan akses distribusi menciptakan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan. Komoditas energi, kebutuhan pokok, dan barang konsumsi lainnya bergerak mengikuti dinamika tersebut, sehingga membentuk sistem perdagangan yang adaptif terhadap kondisi pasar perbatasan. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa juga sejalan dengan mobilitas penduduk dan intensitas arus barang yang relatif tinggi. Aktivitas ini menjadikan perdagangan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian lokal, sekaligus mencerminkan kuatnya integrasi ekonomi antara Kecamatan Sebatik Tengah dan wilayah di sekitarnya dalam konteks perbatasan.



Tabel 3.17.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sembako	Ada	40%
2	LPG	Ada	50%
3	BBM	Ada	30%
4	Alat Transportasi	Tidak Ada	-
5	Hasil Pertanian	Ada	30%
6	Pakaian	Tidak Ada	-
7	Bahan Bangunan	Ada	20%
8	Industri Pengolahan	Tidak Ada	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 5, pola pasokan komoditas di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 memperlihatkan bahwa sebagian kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui perdagangan lintas negara. LPG menempati proporsi tertinggi dengan 50 persen berasal dari negara lain, diikuti sembako sebesar 40 persen. Sementara itu, BBM dan hasil pertanian masing-masing tercatat sebesar 30 persen, serta bahan bangunan sebesar 20 persen. Komposisi ini menggambarkan adanya peran interaksi ekonomi perbatasan dalam mendukung ketersediaan komoditas tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi harian.

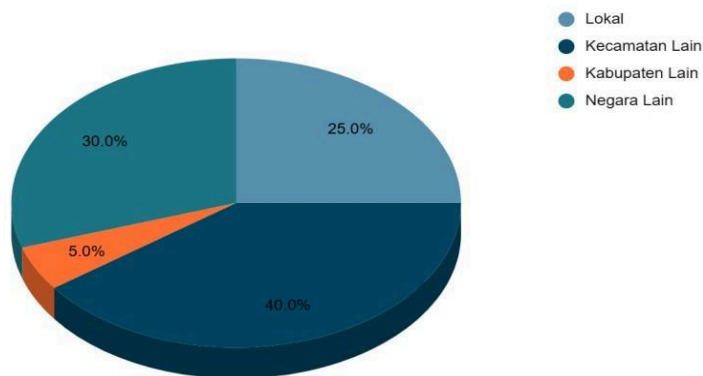
Di sisi lain, komoditas seperti alat transportasi, pakaian, dan industri pengolahan tidak tercatat berasal dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan komoditas tersebut masih berlangsung melalui jalur distribusi domestik. Secara umum, struktur pasokan di Kecamatan Sebatik Tengah mencerminkan dinamika



perdagangan perbatasan yang berjalan berdampingan dengan sistem distribusi dalam negeri, membentuk pola pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing komoditas.

Struktur sumber pasokan barang merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pola distribusi dan ketahanan ekonomi suatu wilayah. Di kawasan perbatasan seperti Kecamatan Sebatik Tengah, arus barang tidak hanya dipengaruhi oleh produksi lokal, tetapi juga oleh keterhubungan dengan wilayah lain, baik dalam lingkup kabupaten maupun lintas negara. Komposisi sumber pasokan tersebut mencerminkan sejauh mana kemandirian wilayah serta tingkat ketergantungan terhadap jaringan distribusi eksternal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gambar 3.12 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025



Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Gambar 1, struktur sumber pasokan barang di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 memperlihatkan bahwa distribusi terbesar berasal dari kecamatan lain sebesar 40 persen. Hal ini menunjukkan kuatnya peran konektivitas antarwilayah dalam satu pulau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan dari negara lain menempati porsi 30 persen, mencerminkan adanya



interaksi perdagangan lintas batas yang turut mewarnai dinamika ekonomi setempat. Sementara itu, pasokan lokal berkontribusi sebesar 25 persen dan dari kabupaten lain sebesar 5 persen, sehingga secara keseluruhan terbentuk komposisi distribusi yang berlapis dan beragam.

Pola tersebut menggambarkan bahwa sistem logistik di Sebatik Tengah tidak bertumpu pada satu sumber tunggal, melainkan tersebar pada beberapa simpul distribusi. Dominasi pasokan dari kecamatan lain menunjukkan intensitas hubungan ekonomi intra-pulau yang cukup kuat, sedangkan kontribusi pasokan lintas negara memperlihatkan posisi strategis wilayah perbatasan dalam arus perdagangan. Keberadaan pasokan lokal yang signifikan juga menandakan adanya aktivitas produksi dan perdagangan internal yang mendukung sirkulasi barang. Secara umum, struktur ini mencerminkan sistem distribusi yang dinamis, adaptif, dan terintegrasi dalam konteks wilayah perbatasan.

Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi menjadi indikator penting dalam menggambarkan dinamika aktivitas perdagangan dan jasa di suatu wilayah. Di Kecamatan Sebatik Tengah, keberadaan fasilitas seperti pasar, pertokoan, toko kelontong, hingga akomodasi tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan struktur distribusi barang dan layanan yang berkembang di kawasan perbatasan. Komposisi dan jumlah fasilitas tersebut memberikan gambaran mengenai pola konsumsi, skala usaha, serta pergerakan ekonomi lokal.



Tabel 3.17.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok Pertokoan	1
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	2
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	2
4	Pasar tanpa Bangunan	0
5	Minimarket/Swalayan/Supermarket	2
6	Restoran/Rumah Makan	0
7	Hotel	0
8	Penginapan: Hostel/Motel/Losmen/Wisma	1
9	Toko/Warung Kelontong	30

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 6, sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 didominasi oleh toko/warung kelontong sebanyak 30 unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan skala kecil menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Selain itu, terdapat 2 pasar dengan bangunan permanen dan 2 pasar dengan bangunan semi permanen yang berperan sebagai pusat transaksi komoditas dalam skala lebih besar. Keberadaan 2 minimarket/swalayan/supermarket juga menandakan adanya variasi pola konsumsi masyarakat, meskipun jumlahnya masih terbatas.

Di sisi lain, beberapa fasilitas ekonomi belum tersedia, seperti pasar tanpa bangunan, restoran/rumah makan, dan hotel. Ketiadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih berfokus pada perdagangan kebutuhan pokok dan belum



berkembang pada sektor jasa komersial yang lebih luas. Tersedianya 1 kelompok pertokoan dan 1 penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) mengindikasikan adanya dukungan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi, meskipun skalanya relatif kecil. Secara umum, struktur sarana ekonomi di Sebatik Tengah mencerminkan karakter wilayah yang bertumpu pada perdagangan lokal dan layanan dasar masyarakat.

Komoditas unggulan Kecamatan Sebatik Tengah, yaitu durian, kelapa sawit, kakao, dan pisang, memiliki peran strategis dalam menopang struktur ekonomi wilayah yang berbasis agribisnis. Keempat komoditas tersebut tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas turunan seperti perdagangan hasil panen hingga distribusi antarwilayah. Kelapa sawit menjadi komoditas utama dengan potensi areal yang luas di Pulau Sebatik dan dinilai memiliki prospek investasi serta pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah di tingkat lokal, sebagaimana diberitakan dalam beberapa laporan media terkait potensi sawit di Sebatik. Kakao juga menjadi komoditas penting yang mendapat dukungan program peremajaan dan bantuan bibit guna menjaga produktivitas perkebunan rakyat, menunjukkan komitmen peningkatan daya saing komoditas ini.

Sementara itu, pisang sebagai komoditas hortikultura banyak dibudidayakan masyarakat dan turut dipasarkan hingga ke wilayah Malaysia, mencerminkan keterkaitan perdagangan lintas batas yang menjadi karakter khas Sebatik. Integrasi antara produksi durian, sawit, kakao, dan pisang dengan jaringan pasar domestik maupun lintas negara menunjukkan bahwa komoditas unggulan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan perdagangan di Kecamatan Sebatik Tengah.

## **PARIWISATA**

Sektor pariwisata di Kecamatan Sebatik Tengah merupakan salah satu potensi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi



berbasis jasa dan meningkatkan aktivitas sosial masyarakat. Keberadaan objek daya tarik wisata, penyelenggaraan event tahunan, serta pola keterlibatan pengunjung menjadi indikator penting dalam melihat dinamika pariwisata di wilayah perbatasan. Pengelolaan potensi wisata secara terarah dapat memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas wilayah.

Tabel 3.17.7 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik Tengah, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Ada
2	Event tahunan	Tidak Ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 7, pada tahun 2025 Kecamatan Sebatik Tengah memiliki Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) namun menyelenggarakan event tahunan. ODTW yang tercatat meliputi Rumah Dua Negara, Patok 2, dan Tugu Rupiah Berdaulat yang menjadi pusat aktivitas wisata masyarakat. Namun demikian, kegiatan pariwisata tersebut tidak menyelenggarakan event tahunan maupun event yang melibatkan negara lain, sehingga cakupan kunjungan masih bersifat domestik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Sebatik Tengah telah memiliki dasar potensi yang jelas, meskipun skalanya masih terbatas pada lingkup lokal.

Perbaikan pariwisata di Kecamatan Sebatik Tengah perlu dilakukan melalui penataan dan peningkatan kualitas ODTW yang ada, penguatan promosi secara digital dan terintegrasi dengan agenda wisata daerah, serta penyelenggaraan event tematik untuk menarik kunjungan yang lebih luas. Selain itu, dukungan terhadap



pelaku usaha lokal melalui pelatihan SDM, bantuan permodalan, dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, fasilitas umum, dan papan informasi menjadi langkah penting agar potensi wisata dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat.

## PENDIDIKAN

Ketersediaan sarana pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas pelayanan dasar suatu wilayah. Jumlah dan sebaran satuan pendidikan pada setiap jenjang mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal, sekaligus menggambarkan kesiapan daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Di Kecamatan Sebatik Tengah, struktur sarana pendidikan menjadi aspek strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi wilayah perbatasan.

Tabel 3.17. 8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6
2	Taman Kanak-Kanak	1
3	Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)	-
4	Sekolah Dasar (SD)	6
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2



No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
9	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-
10	Madrasah Aliyah (MA)	-
11	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 8, struktur sarana pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa layanan pendidikan pada jenjang dasar telah tersedia dengan cukup baik. Terdapat 6 PAUD dan 1 Taman Kanak-Kanak sebagai fondasi pendidikan usia dini, serta 6 Sekolah Dasar (SD) dan 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menopang pendidikan dasar. Pada jenjang menengah pertama tersedia 2 SMP, dan pada jenjang menengah atas terdapat 1 SMA. Komposisi ini menggambarkan bahwa akses pendidikan formal dari usia dini hingga tingkat menengah atas telah terlayani di dalam wilayah kecamatan, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya harus keluar wilayah untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang tersebut.

Di sisi lain, belum tersedianya RA/BA, MTs, SMK, MA, dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa variasi pilihan pendidikan, khususnya berbasis keagamaan pada jenjang lanjutan dan pendidikan vokasi, masih terbatas. Ketiadaan pendidikan tinggi juga mengindikasikan bahwa lulusan SMA perlu melanjutkan studi ke luar kecamatan. Secara keseluruhan, sarana pendidikan di Sebatik Tengah telah membentuk struktur layanan dasar yang cukup, namun pengembangan pada jenjang kejuruan dan pendidikan lanjutan



menjadi ruang strategis untuk memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia di wilayah tersebut. Jarak dari Kantor Kecamatan Sebatik Timur ke SMK terdekat adalah 15 km.

Tabel 3.17.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada, namun hanya 30%
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 9, fasilitas pendukung pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 pada dasarnya telah tersedia, khususnya untuk listrik dan internet yang tercatat tersedia. Ketersediaan listrik menjadi unsur fundamental dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, termasuk penggunaan perangkat pembelajaran dan operasional sekolah. Demikian pula dengan akses internet yang berperan penting dalam mendukung pembelajaran berbasis digital, akses informasi, serta administrasi pendidikan.

Namun demikian, ketersediaan air tercatat ada tetapi hanya mencakup sekitar 30 persen, yang menunjukkan bahwa akses air bersih di lingkungan pendidikan belum merata. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kenyamanan dan standar sanitasi sekolah. Secara keseluruhan, meskipun infrastruktur dasar pendidikan telah tersedia, peningkatan akses air bersih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian agar kualitas layanan pendidikan dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.



## KESEHATAN

Ketersediaan sarana kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di suatu wilayah. Bagi Kecamatan Sebatik Tengah yang berada di kawasan perbatasan, keberadaan fasilitas kesehatan memiliki peran strategis dalam menjamin akses pelayanan dasar sekaligus mendukung ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap jumlah dan jenis sarana kesehatan tahun 2025 menjadi relevan untuk menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Tabel 3.17.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas rawat inap	-
3	Puskesmas tanpa rawat inap	1
4	Puskesmas pembantu	3
5	Tempat Praktik Dokter	1
6	Tempat Praktik Bidan	-
7	Apotek	1

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 10, ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 masih tergolong terbatas dan belum sepenuhnya lengkap. Tidak terdapat rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, sehingga pelayanan kesehatan rujukan dan perawatan intensif belum tersedia di wilayah ini. Fasilitas yang ada didominasi oleh puskesmas tanpa rawat inap sebanyak 1 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 3 unit, yang berperan dalam



memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain itu, terdapat masing-masing 1 unit tempat praktik dokter dan apotek, sementara tempat praktik bidan tidak tercatat tersedia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lanjutan kemungkinan masih bergantung pada wilayah lain di luar kecamatan. Keberadaan puskesmas pembantu yang lebih banyak dibanding fasilitas lainnya mengindikasikan upaya pemerataan layanan kesehatan dasar, namun keterbatasan fasilitas rawat inap dapat menjadi tantangan dalam penanganan kasus darurat atau penyakit yang memerlukan observasi lebih lanjut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sarana kesehatan, terutama penyediaan layanan rawat inap dan tenaga kesehatan tambahan, menjadi hal yang penting untuk mendukung kualitas pelayanan dan menjamin akses kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah.

Secara keseluruhan, struktur sarana kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar telah tersedia, namun belum didukung oleh fasilitas rawat inap atau layanan rujukan lanjutan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan bagi masyarakat setempat.

Tabel 3.17.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada, namun hanya di Puskesmas saja
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Berdasarkan Tabel 11, fasilitas pendukung kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 pada dasarnya sudah tersedia, namun belum sepenuhnya merata. Listrik dan internet tercatat tersedia, yang menunjukkan bahwa sarana pelayanan kesehatan telah didukung oleh infrastruktur dasar untuk operasional dan komunikasi. Ketersediaan listrik sangat penting dalam menunjang pelayanan medis, termasuk penggunaan alat kesehatan, penerangan, dan penyimpanan obat. Sementara itu, akses internet berperan dalam mendukung administrasi, pelaporan, serta koordinasi layanan kesehatan.

Namun, ketersediaan air bersih masih terbatas karena hanya tersedia di puskesmas saja. Kondisi ini dapat menjadi kendala, terutama bagi fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas pembantu atau tempat praktik, yang juga membutuhkan air untuk menjaga standar kebersihan dan sanitasi. Keterbatasan akses air berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerataan fasilitas air bersih menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan mutu layanan kesehatan secara menyeluruh di Kecamatan Sebatik Tengah.

## **INDUSTRI PENGOLAHAN**

Keberadaan industri pengolahan di suatu wilayah mencerminkan tingkat pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus menunjukkan dinamika perekonomian lokal. Bagi Kecamatan Sebatik Tengah yang berada di kawasan perbatasan, pengembangan industri pengolahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, identifikasi jenis industri dan komoditas yang diolah menjadi penting untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah pada tahun 2025.



Tabel 3.17.12 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Tengah, 2025

No	Jenis Industri	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman Pangan	-
2	Hortikultura	Jahe
3	Perkebunan	-
4	Hasil Kehutanan Kayu	-
5	Hasil Kehutanan Non Kayu	-
6	Perikanan Tangkap Laut	-
7	Perikanan Budidaya Laut	-
8	Jasa Kelautan	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 12, industri pengolahan di Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025 masih sangat terbatas dan hanya tercatat pada sektor hortikultura dengan komoditas jahe. Sementara itu, sektor lain seperti tanaman pangan, perkebunan, hasil kehutanan kayu dan non-kayu, perikanan tangkap laut, perikanan budidaya laut, serta jasa kelautan belum menunjukkan adanya kegiatan industri pengolahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi sumber daya di berbagai sektor tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan hilirisasi. Terbatasnya jenis industri pengolahan dapat berdampak pada rendahnya nilai tambah produk lokal dan peluang kerja, sehingga diperlukan upaya pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah guna memperkuat struktur ekonomi Kecamatan Sebatik Tengah.



## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peningkatan infrastruktur transportasi perlu diarahkan pada penguatan jalan antar-desa yang menjadi satu-satunya jalur mobilitas masyarakat. Perlu prioritas pada peningkatan kualitas permukaan jalan, pelebaran ruas yang padat, serta penanganan titik rawan kerusakan agar konektivitas tetap terjaga sepanjang tahun. Selain itu, pembangunan terminal mini atau titik simpul transportasi akan memberikan struktur yang lebih tertata bagi pergerakan penumpang dan distribusi barang sehingga mobilitas masyarakat dapat lebih efisien dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Sebatik Tengah menghadapi struktur pasokan energi yang sebagian masih bergantung pada negara lain, khususnya untuk LPG dan BBM. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan jalur distribusi energi resmi melalui penambahan titik pengisian dan peningkatan kapasitas stok BBM di area yang dekat permukiman padat seperti Aji Kuning. Untuk komoditas yang dominan berasal dari luar, seperti sembako dan hasil pertanian tertentu, perlu disiapkan mekanisme stabilisasi pasokan domestik dengan memperkuat kerja sama antar-kecamatan di Pulau Sebatik agar fluktuasi harga di pasar Sebatik Tengah dapat ditekan.

Mengingat belum tersedianya rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, diperlukan langkah bertahap untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap atau penyediaan layanan penunjang. Tetapi perlu dipertimbangkan dalam pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Sebatik Tengah yang nantinya dapat dipergunakan juga oleh Sebatik Timur dan Sebatik Utara sebagai kecamatan tetangga.

Aktivitas ekonomi Sebatik Tengah yang didominasi warung kelontong dan pasar semi permanen membutuhkan penataan pasar yang lebih terstandar, terutama di kawasan perdagangan desa Sungai Limau dan Aji Kuning yang memiliki arus transaksi tertinggi.



Pemberdayaan UMKM dapat diarahkan pada pembinaan manajemen usaha, penguatan rantai pasok lokal, serta dukungan pemasaran digital agar pelaku usaha mampu bersaing dengan masuknya komoditas dari luar negeri yang masih cukup signifikan di wilayah Sebatik.

Komoditas unggulan seperti durian dari Sungai Limau, kakao dan sawit dari area perkebunan, serta pisang yang banyak dipasarkan lintas batas perlu mendapatkan dukungan hilirisasi. Pembangunan unit pengolahan sederhana di desa sentra produksi akan meningkatkan nilai jual komoditas sebelum dipasarkan ke kecamatan lain maupun ke wilayah Malaysia. Pendekatan ini juga dapat menguatkan posisi petani Sebatik Tengah dalam rantai nilai perdagangan yang selama ini masih didominasi jual beli bahan mentah.

Objek wisata utama seperti Rumah Dua Negara, Patok 2, dan Tugu Rupiah Berdaulat berada dalam radius desa Aji Kuning yang menjadi pusat mobilitas wisatawan. Penataan kawasan wisata ini dapat difokuskan pada pengembangan fasilitas informasi, jalur pedestrian, ruang UMKM, serta akses jalan yang lebih nyaman agar wisatawan dapat berkunjung dengan aman. Penyelenggaraan event tematik lokal, misalnya festival budaya atau kuliner khas Sebatik, dapat menjadi penggerak ekonomi baru tanpa harus menuntut pembangunan berskala besar.



### **3.18. Kecamatan Sebatik Utara**

Kecamatan Sebatik Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berada di Pulau Sebatik dengan luas wilayah sekitar 15,53 km<sup>2</sup>. Kecamatan ini termasuk kecamatan pesisir, sehingga kondisi geografisnya memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah perairan. Karakter pesisir tersebut memengaruhi kondisi fisik wilayah, di mana sebagian kawasan berada di dataran rendah dan berorientasi ke laut.

Kondisi geografis pesisir di Kecamatan Sebatik Utara turut membentuk pola permukiman dan mobilitas penduduk. Di wilayah ini terdapat permukiman yang berada di atas permukaan air laut, yang mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan pesisir. Aktivitas masyarakat banyak bergantung pada akses perairan, baik untuk mobilitas maupun kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir, peningkatan kualitas permukiman, serta penyediaan infrastruktur pendukung menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Sebatik Utara.

### **DEMOGRAFI DAN KEPENDUDUKAN**

Kondisi demografi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika pembangunan suatu wilayah; mencerminkan potensi sumber daya manusia serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Struktur penduduk menurut jenis kelamin dan sebarannya pada tingkat desa/kelurahan memberikan gambaran mengenai pola permukiman, aktivitas sosial-ekonomi, serta tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, analisis data kependudukan menjadi dasar yang penting dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sebatik Utara.



Tabel 3.18.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lapri	746	712	1.458
2	Sungai Pancang	2.886	2.766	5.652
3	Seberang	779	738	1.517
Sebatik Utara		4.411	4.216	8.627

Sumber : Kecamatan Sebatik Utara dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Nunukan

Berdasarkan tabel 1, total penduduk di Kecamatan Sebatik Utara tercatat sebanyak 8.627 jiwa dengan komposisi 4.411 laki-laki dan 4.216 perempuan, menunjukkan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang. Desa Sungai Pancang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar (5.652 jiwa), jauh lebih tinggi dibandingkan Desa Lapri (1.458 jiwa) dan Seberang (1.517 jiwa). Konsentrasi penduduk yang sangat besar di Sungai Pancang mencerminkan peran desa tersebut sebagai pusat aktivitas sosial-ekonomi dan potensi beban layanan publik yang lebih tinggi dibandingkan desa lainnya, sehingga kebutuhan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan administrasi kemungkinan lebih tinggi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, distribusi penduduk yang tidak merata antar desa ini penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan agar pelayanan dapat teralokasi secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing desa.

## TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR

Transportasi dan infrastruktur merupakan komponen penting dalam menggambarkan tingkat konektivitas dan aksesibilitas suatu



kecamatan. Kondisi jaringan jalan, sarana pendukung mobilitas, serta infrastruktur dasar lainnya berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks Kecamatan Sebatik Utara, pembahasan mengenai transportasi dan infrastruktur diperlukan untuk melihat sejauh mana dukungan sarana prasarana yang tersedia mampu menunjang pergerakan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 3.18.2 Ketersediaan Akses Transportasi di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Moda	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Jalur darat	Ada
2	Jalur udara	Tidak
3	Jalur air	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 2, Kecamatan Sebatik Utara memiliki akses transportasi melalui jalur darat dan jalur air, sementara jalur udara tidak tersedia. Ketersediaan jalur darat menunjukkan bahwa mobilitas penduduk dan distribusi barang dapat dilakukan melalui jaringan jalan yang ada, sedangkan jalur air turut mendukung pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi, khususnya dalam konteks wilayah pesisir dan perbatasan. Kombinasi kedua moda tersebut membentuk sistem konektivitas utama di kecamatan ini.

Tidak tersedianya transportasi udara pada tingkat kecamatan bukan semata-mata karena keterbatasan, tetapi karena kebutuhan mobilitas masyarakat pada dasarnya telah dapat terjangkau melalui jalur darat dan air. Akses menuju pusat-pusat kegiatan dan layanan masih dapat dilakukan dengan moda yang tersedia, sehingga pergerakan orang dan barang tetap berjalan melalui infrastruktur yang ada. Kondisi ini menggambarkan pola transportasi yang



menyesuaikan dengan karakteristik geografis dan kebutuhan wilayah.

Berdasarkan Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025, moda transportasi yang digunakan baik antar desa/kelurahan maupun kecamatan lain adalah menggunakan Sepeda Motor dan Mobil. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses jalan di Kecamatan Sebatik Timur sudah baik karena dapat dilalui kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat.

Tabel 3.18.3 Ketersediaan Terminal Transportasi Darat Menurut Jenisnya di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Jenis Terminal	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Terminal Penumpang	Tidak Ada
2	Terminal Barang	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 3, di Kecamatan Sebatik Utara tidak tersedia terminal transportasi darat, baik terminal penumpang maupun terminal barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem transportasi darat di wilayah tersebut belum didukung oleh simpul angkutan resmi yang terorganisir. Ketiadaan terminal mengindikasikan bahwa aktivitas naik-turun penumpang serta distribusi barang kemungkinan masih berlangsung secara tersebar dan belum terpusat pada fasilitas khusus, sehingga pengelolaan arus mobilitas darat belum terstruktur secara optimal.

Dalam kaitannya dengan akses transportasi darat, tidak adanya terminal dapat memengaruhi efisiensi pergerakan orang dan barang, terutama dalam hal keteraturan jadwal, keamanan, serta pengendalian arus logistik. Infrastruktur jalan yang tersedia memang memungkinkan mobilitas tetap berjalan, namun belum ditunjang oleh fasilitas pendukung yang berfungsi sebagai titik konsolidasi



transportasi. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa penguatan sarana pendukung transportasi darat masih menjadi aspek penting dalam pengembangan konektivitas wilayah Kecamatan Sebatik Utara.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan Indonesia merupakan persoalan strategis yang berkaitan dengan keterbatasan akses distribusi, infrastruktur transportasi, serta jarak dari pusat pasokan energi. Kondisi geografis dan dinamika perdagangan lintas batas sering kali memengaruhi stabilitas ketersediaan BBM, sehingga pasokan menjadi rentan terhadap gangguan. Di kawasan perbatasan, BBM tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai penopang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi, sehingga setiap gangguan ketersediaan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan Tahun 2025, dalam setahun terakhir, telah terjadi kelangkaan BBM di Kecamatan Sebatik Utara, terutama pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan terakhir. Kelangkaan BBM di Kecamatan Sebatik Utara dipengaruhi oleh ketergantungan pasokan dari luar wilayah serta kelancaran distribusi yang sangat bergantung pada akses transportasi. Ketika terjadi hambatan logistik atau keterlambatan pengiriman, pasokan BBM dapat terganggu dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tingginya konsumsi BBM untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan turut meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan pasokan di tingkat lokal.

Berbicara terkait kelangkaan BBM, hal tersebut juga berpengaruh terhadap persentase pasokan BBM di Kecamatan Sebatik Utara yang berasal dari Indonesia. Diketahui bahwa pada Tahun 2025, persentase pasokan BBM yang berasal dari Indonesia adalah 50 sampai 75 persen, yang menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masyarakat belum sepenuhnya ditopang oleh distribusi domestik. Adapun sisanya dipenuhi dari Malaysia, yang



secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Sebatik, didorong oleh harga yang relatif lebih murah serta akses distribusi yang lebih mudah melalui berbagai jalur lintas batas tidak resmi. Kondisi ini mencerminkan adanya disparitas harga dan kemudahan akses antarnegara yang memengaruhi pola pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain BBM, ketersediaan listrik juga menjadi aspek penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sebatik Utara. Listrik berperan dalam menunjang kegiatan rumah tangga, layanan publik, usaha perdagangan, hingga sektor perikanan dan jasa. Stabilitas dan kecukupan pasokan listrik sangat menentukan kelancaran produktivitas serta kualitas pelayanan dasar di wilayah perbatasan, sehingga infrastruktur ketenagalistrikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan ketahanan energi daerah.

Tabel 3.18.4 Jumlah Desa menurut Sumber Listrik Utama di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Sumber Listrik Utama	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)
1	PLN	3
2	Non PLN	0
3	Genset	0
4	Tidak ada listrik	0

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 4, seluruh desa di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2025 telah menggunakan listrik yang bersumber dari PLN sebagai sumber utama, dengan jumlah sebanyak 3 desa. Tidak terdapat desa yang bergantung pada sumber listrik non-PLN, genset, maupun yang tidak memiliki akses listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan layanan listrik di wilayah tersebut



telah menjangkau seluruh desa secara formal dan terintegrasi dalam sistem kelistrikan nasional.

Keberadaan pasokan listrik PLN di seluruh desa mencerminkan ketersediaan infrastruktur dasar yang relatif merata dalam mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan tidak adanya desa yang mengalami ketiadaan listrik, Kecamatan Sebatik Utara memiliki fondasi yang cukup baik dalam aspek ketenagalistrikan, yang menjadi elemen penting dalam menunjang stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

### **PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA**

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kecamatan Sebatik Utara memiliki dinamika perdagangan dan jasa yang khas serta dipengaruhi oleh interaksi ekonomi lintas batas. Kedekatan geografis, perbedaan harga, dan kemudahan akses distribusi membentuk pola pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik untuk komoditas energi, kebutuhan pokok, maupun barang konsumsi lainnya. Aktivitas perdagangan dan layanan jasa berkembang seiring dengan mobilitas penduduk dan arus barang yang cukup intensif, sehingga sektor ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian lokal sekaligus mencerminkan kuatnya keterkaitan ekonomi antara wilayah perbatasan dan negara tetangga.

Tabel 3.18.5 Persentase Komoditas Perdagangan yang Berasal dari Negara Lain di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

<b>No</b>	<b>Komoditas</b>	<b>Dari Negara Lain?</b>	<b>Persentase</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Sembako	Ada	80%
2	LPG	Ada	70%
3	BBM	Ada	80%



No	Komoditas	Dari Negara Lain?	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Alat Transportasi	Tidak Ada	-
5	Hasil Pertanian	Ada	80%
6	Pakaian	Ada	30%
7	Bahan Bangunan	Ada	50%
8	Industri Pengolahan	Ada	50%

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 5, struktur perdagangan di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2025 menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan komoditas dari negara lain, terutama untuk sembako, BBM, dan hasil pertanian yang masing-masing mencapai 80 persen. Tingginya persentase ini menggambarkan bahwa kebutuhan pokok masyarakat serta energi sehari-hari sebagian besar dipenuhi melalui arus barang lintas batas, yang secara tidak langsung menunjukkan kuatnya interaksi ekonomi perbatasan dan keterkaitan antara Sebatik Utara dengan wilayah negara tetangga. Komoditas LPG juga memiliki ketergantungan yang signifikan sebesar 70 persen, mempertegas peran perdagangan lintas negara dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga masyarakat di wilayah ini.

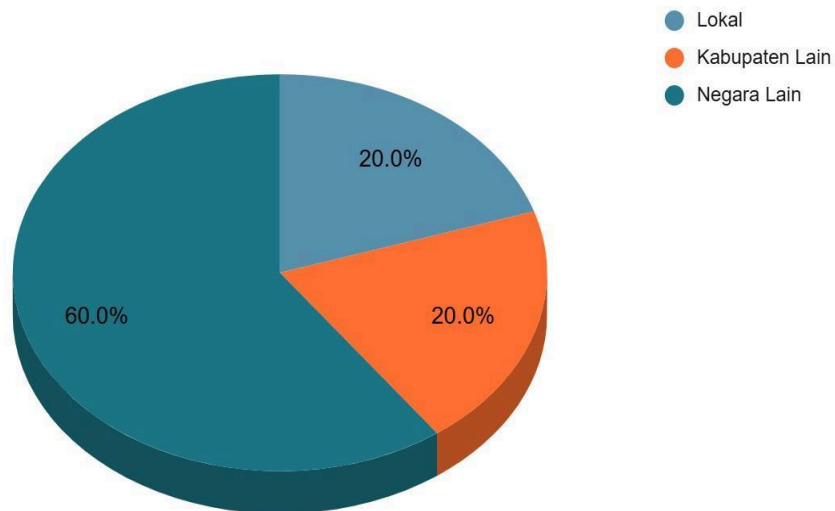
Di sisi lain, beberapa komoditas seperti pakaian, bahan bangunan, dan industri pengolahan juga masih memiliki porsi pasokan dari negara lain, meskipun pada tingkat yang lebih rendah, masing-masing 30 persen, 50 persen, dan 50 persen. Sementara alat transportasi menjadi satu-satunya komoditas yang sepenuhnya tidak berasal dari negara lain, menunjukkan bahwa kebutuhan sektor tersebut masih dapat dipenuhi oleh jalur distribusi domestik. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap pasokan luar negeri tetap menjadi karakter utama



perdagangan di Sebatik Utara, sehingga upaya penguatan rantai pasok domestik dan stabilisasi distribusi dalam negeri menjadi penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta mengurangi risiko gangguan pasokan akibat dinamika perdagangan lintas batas.

Struktur sumber pasokan barang merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pola distribusi dan ketahanan ekonomi suatu wilayah. Di kawasan perbatasan seperti Kecamatan Sebatik Utara, arus barang tidak hanya dipengaruhi oleh produksi lokal, tetapi juga oleh keterhubungan dengan wilayah lain, baik dalam lingkup kabupaten maupun lintas negara. Komposisi sumber pasokan tersebut mencerminkan sejauh mana kemandirian wilayah serta tingkat ketergantungan terhadap jaringan distribusi eksternal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Gambar 3.13 Distribusi Persentase Sumber Pasokan Barang di Kecamatan Sebatik Utara, 2025



Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)



Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa 60 persen pasokan barang di Kecamatan Sebatik Utara berasal dari negara lain. Dominasi pasokan lintas batas ini menunjukkan kuatnya ketergantungan wilayah terhadap barang-barang impor, terutama pada komoditas kebutuhan pokok, energi, dan beberapa barang konsumsi lainnya. Kondisi ini mencerminkan karakteristik wilayah perbatasan yang memiliki kedekatan fisik dan aksesibilitas yang relatif mudah terhadap jalur perdagangan luar negeri. Ketergantungan yang besar terhadap pasokan dari negara tetangga ini juga menandakan bahwa struktur pasar lokal cenderung mengikuti dinamika harga dan ketersediaan barang dari luar negeri, sehingga rentan terhadap fluktuasi apabila terjadi perubahan kebijakan atau gangguan distribusi.

Sementara itu, kontribusi pasokan dari wilayah lokal maupun kabupaten lain masing-masing hanya sebesar 20 persen. Porsi lokal yang relatif kecil mengindikasikan bahwa kapasitas produksi internal Sebatik Utara belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Demikian pula, pasokan dari kabupaten lain yang juga hanya 20 persen menunjukkan bahwa alur distribusi domestik belum menjadi sumber utama bagi pemenuhan barang di wilayah ini. Secara keseluruhan, komposisi ini memperlihatkan perlunya penguatan rantai pasok domestik, baik melalui peningkatan produksi lokal maupun optimalisasi distribusi dari wilayah lain dalam kabupaten, agar ketergantungan pada pasokan luar negeri dapat berkurang dan ketahanan ekonomi wilayah menjadi lebih stabil.

Ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi menjadi indikator penting dalam menggambarkan dinamika aktivitas perdagangan dan jasa di suatu wilayah. Di Kecamatan Sebatik Utara, keberadaan fasilitas seperti pasar, pertokoan, toko kelontong, hingga akomodasi tidak hanya mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menunjukkan struktur distribusi barang dan layanan yang berkembang di kawasan perbatasan. Komposisi dan jumlah fasilitas tersebut memberikan gambaran mengenai pola konsumsi, skala usaha, serta pergerakan ekonomi lokal.



Tabel 3.18.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok Pertokoan	3
2	Pasar dengan Bangunan Permanen	2
3	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	0
4	Pasar tanpa Bangunan	1
5	Minimarket/Swalayan/Supermarket	5
6	Restoran/Rumah Makan	1
7	Warung/Kedai Makanan Minuman	30
8	Hotel	1
9	Penginapan: Hostel/Motel/Losmen/Wisma	2
10	Toko/Warung Kelontong	70

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 6, Sarana dan prasarana ekonomi di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2025 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih bertumpu pada perdagangan skala kecil dan menengah. Hal ini tampak dari dominasi toko atau warung kelontong yang berjumlah 70 unit serta 30 warung atau kedai makanan dan minuman yang tersebar di berbagai titik aktivitas masyarakat. Keberadaan dua pasar permanen dan satu pasar tanpa bangunan mengindikasikan bahwa pasar tradisional tetap menjadi pusat transaksi utama, sementara minimarket atau swalayan yang berjumlah lima unit menggambarkan mulai tumbuhnya pola konsumsi modern di tengah masyarakat. Secara umum, struktur ini menunjukkan bahwa kebutuhan harian penduduk sebagian besar dipenuhi dari jaringan ritel lokal yang cukup berkembang.



Sementara itu, fasilitas ekonomi yang mendukung kegiatan jasa dan pariwisata masih terbatas jumlahnya. Hanya terdapat satu restoran dan satu hotel, serta dua penginapan sederhana, yang menunjukkan bahwa sektor kuliner dan akomodasi belum berkembang sepesat sektor perdagangan ritel. Minimnya fasilitas ini berpotensi menjadi hambatan bagi pertumbuhan kegiatan wisata maupun pergerakan orang dari dan ke Sebatik Utara. Dengan demikian, data tersebut mencerminkan adanya fondasi ekonomi lokal yang kuat pada sektor perdagangan, namun pada saat yang sama menunjukkan perlunya pengembangan fasilitas jasa modern yang lebih lengkap agar dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya tarik wilayah secara keseluruhan.

Komoditas unggulan Kecamatan Sebatik Utara, yaitu kelapa sawit, pisang, padi, dan kelapa dalam, memiliki peran strategis dalam menopang struktur ekonomi wilayah yang berbasis agribisnis. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang luas di Pulau Sebatik, termasuk Sebatik Utara, dan telah menjadi primadona dalam perekonomian lokal serta provinsi, di mana perkebunan ini memberikan peluang besar untuk perluasan usaha agribisnis dan penyerapan tenaga kerja di tingkat desa dan kecamatan. Sektor sawit juga mendapat perhatian karena potensinya yang tinggi bagi pengembangan industri hilir, meskipun masih membutuhkan investasi fasilitas pengolahan di dalam wilayah agar nilai tambah komoditas ini dapat meningkat dan tidak semata dijual sebagai bahan mentah ke luar daerah atau negara tetangga .

Lalu, pisang sebagai komoditas hortikultura banyak dibudidayakan masyarakat dan turut dipasarkan hingga ke wilayah Malaysia, mencerminkan keterkaitan perdagangan lintas batas yang menjadi karakter khas Sebatik. Integrasi antara produksi sawit, kakao, dan pisang dengan jaringan pasar domestik maupun lintas negara menunjukkan bahwa komoditas unggulan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi dan perdagangan di Kecamatan Sebatik Utara. Sementara itu, potensi padi di Pulau Sebatik juga mendapat perhatian pemerintah sebagai upaya untuk menjadikan



area ini sebagai sentra pengembangan padi dan penyangga kebutuhan beras di Kabupaten Nunukan, yang membuka peluang memperkuat ketahanan pangan lokal serta mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah. Secara keseluruhan, komoditas agribisnis tersebut mencerminkan peluang dan tantangan bagi pengembangan ekonomi lokal di Sebatik Utara, terutama dalam aspek peningkatan nilai tambah, fasilitas pengolahan, serta pemberdayaan petani agar sektor pertanian lebih produktif dan berkelanjutan di masa depan.

## PARIWISATA

Sektor pariwisata di Kecamatan Sebatik Utara merupakan salah satu potensi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi berbasis jasa dan meningkatkan aktivitas sosial masyarakat. Keberadaan objek daya tarik wisata, penyelenggaraan event tahunan, serta pola keterlibatan pengunjung menjadi indikator penting dalam melihat dinamika pariwisata di wilayah perbatasan. Pengelolaan potensi wisata secara terarah dapat memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal sekaligus memperkuat identitas wilayah.

Tabel 3.18.7 Kondisi dan Aktivitas Pariwisata Kecamatan Sebatik Utara, Tahun 2025

No	Uraian	Hasil
(1)	(2)	(3)
1	Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Ada
2	Event tahunan	Ada
3	Melibatkan negara lain	Tidak Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 7, pada tahun 2025 Kecamatan Sebatik Utara memiliki Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan menyelenggarakan event tahunan. ODTW yang tercatat meliputi



Tugu Garuda Perkasa, Hutan Mangrove, PLBN Sebatik, dan Embung Lapri yang menjadi pusat aktivitas wisata masyarakat. Keberadaan event tahunan menunjukkan adanya upaya institusional dalam menjaga keberlangsungan dan daya tarik kegiatan pariwisata melalui agenda yang terjadwal. Namun demikian, kegiatan pariwisata tersebut tidak melibatkan negara lain, sehingga cakupan kunjungan masih bersifat domestik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Sebatik Utara telah memiliki dasar potensi yang jelas, meskipun skalanya masih terbatas pada lingkup lokal dan nasional. Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, Kecamatan Sebatik Utara memerlukan dukungan pemerintah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dukungan tersebut meliputi penyusunan kebijakan yang berpihak pada penguatan destinasi lokal, peningkatan promosi wisata secara lebih luas, serta pemberian bantuan permodalan bagi pelaku usaha pariwisata. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola destinasi menjadi aspek penting guna meningkatkan kualitas layanan. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur pendukung pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), seperti akses jalan, fasilitas umum, dan sarana penunjang lainnya, juga diperlukan agar potensi pariwisata di Sebatik Timur dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing.

## **PENDIDIKAN**

Ketersediaan sarana pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas pelayanan dasar suatu wilayah. Jumlah dan sebaran satuan pendidikan pada setiap jenjang mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal, sekaligus menggambarkan kesiapan daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Di Kecamatan Sebatik Utara, struktur sarana pendidikan menjadi aspek strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi wilayah perbatasan.



Tabel 3.18.8 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA)	1
4	Sekolah Dasar (SD)	3
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
7	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
9	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-
10	Madrasah Aliyah (MA)	1
11	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Berdasarkan Tabel 8, ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2025 menunjukkan bahwa layanan pendidikan dasar hingga menengah sudah ada, namun variasinya masih terbatas. Pada jenjang awal, terdapat 4 PAUD, 2 TK, dan 1 RA/BA yang menunjukkan perhatian cukup baik terhadap pendidikan anak usia dini. Untuk pendidikan dasar, tersedia 3 SD dan 1 MI, yang memberikan pilihan layanan pendidikan umum maupun berbasis keagamaan. Namun, jumlah tersebut masih relatif



sedikit apabila dibandingkan dengan sebaran penduduk di desa-desa besar seperti Sungai Pancang. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas maupun pemerataan akses agar layanan pendidikan dasar dapat menjangkau seluruh wilayah secara lebih optimal.

Pada jenjang lanjutan, sarana pendidikan semakin terbatas. Hanya terdapat masing-masing 1 SMP, MTs, SMA, dan MA, sementara SMK dan perguruan tinggi tidak tersedia sama sekali. Ketiadaan SMK menjadi catatan penting karena wilayah perbatasan seperti Sebatik Utara membutuhkan pendidikan vokasional yang relevan dengan sektor unggulan, misalnya pertanian, perkebunan, perdagangan, atau perbatasan. Minimnya pilihan jenjang menengah atas dan tidak adanya pendidikan tinggi juga berpotensi mendorong lulusan usia sekolah untuk berpindah ke luar kecamatan, sehingga memperbesar biaya pendidikan dan dapat berdampak pada partisipasi sekolah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun layanan pendidikan telah tersedia, pengembangan fasilitas pada jenjang lanjutan masih menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sebatik Utara.

Tabel 3.18.9 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan merupakan faktor strategis dalam menjamin mutu proses belajar mengajar. Selain jumlah satuan pendidikan, keberadaan sarana penunjang



seperti listrik, air bersih, dan akses internet menjadi indikator penting



dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang layak dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan kondisi tahun 2025, seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara telah didukung oleh ketersediaan listrik, air bersih, dan akses internet. Keberadaan listrik memastikan kelancaran operasional kegiatan belajar mengajar, termasuk penggunaan perangkat elektronik dan media pembelajaran. Ketersediaan air bersih mendukung standar kesehatan dan sanitasi lingkungan sekolah. Sementara itu, akses internet memperluas peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, administrasi sekolah, serta akses terhadap sumber belajar digital.

Secara keseluruhan, tersedianya fasilitas pendukung tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dasar pendidikan di Kecamatan Sebatik Utara telah memadai, sehingga dapat menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penguatan daya saing sumber daya manusia.

## **KESEHATAN**

Ketersediaan sarana kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di suatu wilayah. Bagi Kecamatan Sebatik Utara yang berada di kawasan perbatasan, keberadaan fasilitas kesehatan memiliki peran strategis dalam menjamin akses pelayanan dasar sekaligus mendukung ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap jumlah dan jenis sarana kesehatan tahun 2025 menjadi relevan untuk menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.



Tabel 3.18.10 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas rawat inap	-
3	Puskesmas tanpa rawat inap	1
4	Puskesmas pembantu	1
5	Tempat Praktik Dokter	2
6	Tempat Praktik Bidan	2
7	Apotek	2

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2025 menunjukkan bahwa layanan kesehatan dasar sudah tersedia, namun masih sangat terbatas dalam hal fasilitas rujukan dan perawatan medis yang lebih komprehensif. Tidak adanya rumah sakit maupun puskesmas rawat inap menjadi indikator penting bahwa masyarakat di wilayah ini harus bergantung pada kecamatan lain atau pusat layanan kesehatan di Kabupaten Nunukan ketika membutuhkan pelayanan medis yang lebih intensif. Satu puskesmas tanpa rawat inap dan satu puskesmas pembantu menjadi tumpuan utama pelayanan kesehatan dasar, namun fasilitas ini tentu memiliki keterbatasan dalam menangani kasus gawat darurat atau penyakit yang membutuhkan perawatan lanjutan.

Di sisi lain, keberadaan dua tempat praktik dokter, dua tempat praktik bidan, serta dua apotek menunjukkan bahwa upaya untuk menghadirkan layanan kesehatan pada tingkat komunitas telah berjalan, meskipun kapasitasnya masih perlu diperkuat. Untuk daerah perbatasan yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi,



ketersediaan tenaga medis dan fasilitas penunjang kesehatan yang memadai sangat penting guna meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan perlunya peningkatan layanan kesehatan, terutama dalam bentuk pengadaan fasilitas rawat inap, penguatan tenaga kesehatan, serta penyediaan sarana penunjang medis yang lebih lengkap agar pelayanan kesehatan di Sebatik Utara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

Tabel 3.18.11 Ketersediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Fasilitas	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Listrik	Ada
2	Air	Ada
3	Internet	Ada

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Ketersediaan fasilitas pendukung merupakan unsur penting dalam menjamin mutu dan keberlanjutan pelayanan kesehatan. Selain keberadaan tenaga medis dan sarana pelayanan, dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan akses internet menjadi faktor strategis dalam menunjang operasional fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2025, seluruh fasilitas kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara telah didukung oleh ketersediaan listrik, air, dan akses internet. Ketersediaan listrik memastikan kelancaran operasional peralatan medis, penerangan, serta penyimpanan obat dan vaksin yang memerlukan suhu terkontrol. Dukungan air bersih berperan penting dalam menjaga standar kebersihan, sanitasi, dan pencegahan infeksi di lingkungan pelayanan kesehatan. Sementara itu, akses internet memperkuat sistem administrasi dan pelaporan,



mendukung pemanfaatan sistem informasi kesehatan, serta membuka peluang penerapan layanan telemedicine dan koordinasi rujukan secara lebih cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, tersedianya fasilitas pendukung tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dasar pelayanan kesehatan di Kecamatan Sebatik Utara telah memadai dari sisi operasional. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan.

## INDUSTRI PENGOLAHAN

Keberadaan industri pengolahan di suatu wilayah mencerminkan tingkat pemanfaatan potensi sumber daya alam sekaligus menunjukkan dinamika perekonomian lokal. Bagi Kecamatan Sebatik Utara yang berada di kawasan perbatasan, pengembangan industri pengolahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, identifikasi jenis industri dan komoditas yang diolah menjadi penting untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah pada tahun 2025.

Tabel 3.18.12 Keberadaan Industri Pengolahan menurut Jenis Industrinya di Kecamatan Sebatik Utara, 2025

No	Jenis Industri	Komoditas
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman Pangan	Padi
2	Hortikultura	-
3	Perkebunan	-
4	Hasil Kehutanan Kayu	-



No	Jenis Industri	Komoditas
(1)	(2)	(3)
5	Hasil Kehutanan Non Kayu	-
6	Perikanan Tangkap Laut	Ikan, Udang, Kepiting
7	Perikanan Budidaya Laut	-
8	Jasa Kelautan	-

Sumber: Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, 2025)

Keberadaan industri pengolahan di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2025 menunjukkan bahwa aktivitas hilirisasi sumber daya lokal masih sangat terbatas dan belum berkembang secara merata di berbagai sektor. Industri pengolahan yang tercatat hanya mencakup tanaman pangan dengan komoditas padi serta sektor perikanan tangkap laut yang mengolah hasil laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Sementara itu, sektor lain yang sebenarnya memiliki potensi, seperti hortikultura, perkebunan, hasil kehutanan, maupun budidaya laut, belum memiliki industri pengolahan sama sekali, sehingga sebagian besar komoditas primer kemungkinan dijual dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Sebatik Utara masih bertumpu pada sektor primer, dan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industri pengolahan belum dimaksimalkan. Pengembangan fasilitas pengolahan, terutama untuk komoditas perkebunan dan perikanan, menjadi penting agar wilayah ini dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengurangi keterhambatan mobilitas dan meningkatkan efisiensi distribusi barang, Pemerintah Daerah perlu mendorong pembangunan terminal penumpang dan terminal barang sebagai simpul distribusi darat pertama di Kecamatan Sebatik Utara. Peningkatan kualitas dermaga dan sarana pelabuhan rakyat juga



penting mengingat karakter pesisir yang menjadikan jalur air sebagai komponen vital logistik. Selain itu, penataan titik naik-turun penumpang, penyediaan rambu dan fasilitas pendukung jalan perlu ditingkatkan agar mobilitas masyarakat lebih teratur dan aman.

Kelangkaan BBM dalam periode tertentu menuntut kebijakan yang lebih terukur dalam pengawasan distribusi energi. Pemerintah perlu memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi, membangun storage atau buffer stok kecil di kecamatan, serta memperkuat mekanisme pengiriman agar tidak terhambat cuaca atau logistik. Upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri juga dapat dilakukan melalui kerja sama distribusi dengan unit pemasok dalam negeri serta pengawasan ketat aktivitas perdagangan lintas batas.

Mengingat belum tersedianya rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, diperlukan langkah bertahap untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap atau penyediaan layanan penunjang medis yang lebih lengkap. Hal ini akan membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih komprehensif tanpa harus keluar dari wilayah kecamatan.

Ketiadaan SMK dan perguruan tinggi menjadi tantangan signifikan bagi peningkatan SDM. Pemerintah perlu mendorong pendirian SMK berbasis kompetensi lokal, seperti agribisnis, pengolahan hasil laut, dan teknik perbatasan. Selain itu, kerja sama universitas melalui kelas jarak jauh (PJJ) atau pembukaan kelas filial dapat memperluas akses pendidikan tinggi. Perbaikan kualitas dan kapasitas jenjang SD dan SMP juga penting, terutama untuk desa dengan penduduk besar seperti Sungai Pancang.

Industri pengolahan yang minim menandakan perlunya akselerasi hilirisasi. Pemerintah perlu mendorong unit pengolahan skala kecamatan untuk komoditas unggulan seperti padi, pisang, sawit, dan hasil laut. Dukungan akses permodalan UMKM, pendampingan teknologi, serta kemudahan perizinan sangat penting



untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil perikanan dan produk turunan perkebunan, sehingga nilai tambah dapat dinikmati masyarakat lokal.

Ketergantungan pasokan barang hingga 60% dari luar negeri menuntut strategi peningkatan kapasitas produksi lokal. Pemerintah dapat mendorong pembentukan sentra distribusi kabupaten, memperkuat kerja sama dengan kecamatan lain di Pulau Sebatik, serta memfasilitasi pedagang lokal untuk bersaing secara harga dan kualitas. Penguatan regulasi perdagangan lintas batas juga diperlukan untuk menjaga stabilitas barang pokok di pasar lokal.

Sebatik Utara memiliki objek wisata strategis seperti PLBN Sebatik, Hutan Mangrove, dan Embung Lapri, namun pengelolaannya masih terbatas. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses jalan menuju destinasi, menyediakan fasilitas publik seperti toilet, taman, kios UMKM, dan area parkir, serta memperkuat promosi wisata berbasis digital. Pelibatan masyarakat melalui pelatihan wisata dan penciptaan paket wisata berbasis budaya dan pesisir juga perlu diperkuat untuk memperluas manfaat ekonomi.

Dengan karakter permukiman di atas air dan ketergantungan pada jalur laut, diperlukan kebijakan penguatan penataan permukiman pesisir, mitigasi bencana, serta peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Pengelolaan kawasan pesisir harus diarahkan pada pendekatan keberlanjutan agar lingkungan tetap terjaga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.



**TAHUN  
2025**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**BAB IV  
RANGKUM  
AN**

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**



## BAB IV RANGKUMAN

Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan strategis menunjukkan arah pembangunan yang relatif stabil dan membaik dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi kembali positif pasca kontraksi tahun 2020, mencapai puncak pada 2022, dan stabil di kisaran 4 persen hingga 2024.

Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian (57,63 persen), dengan ketergantungan tinggi pada net ekspor (60,72 persen PDRB sisi pengeluaran). Kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi, hilirisasi komoditas, serta penguatan sektor industri pengolahan dan ekonomi domestik.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 4,24 persen (2021) menjadi stabil di kisaran 2,6–2,7 persen hingga 2025. Kabupaten Nunukan berada pada fase bonus demografi sehingga peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas.

Persentase penduduk miskin menurun dari 6,36 persen (2020) menjadi 5,27 persen (2025). Meskipun demikian, wilayah perbatasan masih rentan terhadap guncangan ekonomi dan keterbatasan akses layanan.

IPM meningkat dari 66,50 (2020) menjadi 69,87 (2025). Peningkatan berlangsung konsisten namun masih memerlukan percepatan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Inflasi tahun 2024–2025 bersifat fluktuatif namun relatif terkendali. Karakter inflasi sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi dan pasokan luar daerah.

Kecamatan Krayan Selatan merupakan wilayah dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dengan aksesibilitas yang masih bergantung pada transportasi udara dan jalan darat terbatas. Struktur ekonomi didominasi sektor pertanian, khususnya komoditas unggulan beras adan yang telah memiliki kegiatan



pengolahan sehingga memberikan nilai tambah ekonomi lokal. Ketergantungan terhadap pasokan barang lintas negara masih cukup tinggi, sementara fasilitas perdagangan, pendidikan, dan kesehatan tersedia dalam skala dasar namun belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang optimal. Pembangunan wilayah diarahkan pada penguatan konektivitas, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kecamatan Krayan Tengah memiliki karakter wilayah pegunungan perbatasan dengan akses transportasi yang terbatas dan ketergantungan pada jalur udara serta darat non-aspal. Aktivitas ekonomi bertumpu pada pertanian dan perdagangan lintas batas dengan interaksi ekonomi yang kuat dengan Malaysia. Layanan pendidikan dan kesehatan tersedia pada tingkat dasar, namun fasilitas lanjutan dan infrastruktur pendukung masih perlu ditingkatkan. Pengembangan wilayah difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, penguatan produksi lokal, serta peningkatan kapasitas SDM.

Kecamatan Krayan Barat merupakan wilayah perbatasan dengan potensi pertanian dan sumber daya alam, namun menghadapi tantangan isolasi wilayah serta keterbatasan sarana transportasi dan distribusi logistik. Fasilitas ekonomi modern masih terbatas dan pelayanan publik perlu penguatan. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kecamatan Krayan Timur memiliki karakter dataran tinggi dengan aksesibilitas terbatas dan ketergantungan pada konektivitas udara untuk mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Struktur ekonomi bertumpu pada pertanian dan perdagangan skala kecil. Fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia pada tingkat dasar, namun peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur masih diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Kecamatan Lumbis merupakan wilayah perbatasan darat dengan dinamika perdagangan lintas batas yang aktif. Jaringan



transportasi darat menjadi faktor utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Struktur ekonomi didominasi sektor primer dan perdagangan, sementara layanan dasar telah tersedia meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas dan cakupan.

Kecamatan Lumbis Ogong memiliki akses yang relatif menantang dan ketergantungan pada konektivitas darat. Aktivitas ekonomi bertumpu pada pertanian dan perdagangan lintas batas. Fasilitas publik masih terbatas sehingga diperlukan penguatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan usaha produktif berbasis potensi wilayah.

Kecamatan Sebuku memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi kabupaten terutama pada sektor pertambangan dan perkebunan. Infrastruktur relatif lebih berkembang dibanding wilayah pedalaman, namun tetap menghadapi tantangan pemerataan layanan publik. Penguatan industri pengolahan dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi agenda penting.

Kecamatan Seimanggaris merupakan wilayah perbatasan dengan potensi pertanian dan perkebunan serta interaksi ekonomi lintas batas yang cukup kuat. Akses transportasi darat menjadi tulang punggung mobilitas, sementara fasilitas perdagangan dan jasa berkembang secara bertahap. Pembangunan diarahkan pada penguatan konektivitas dan pengembangan UMKM.

Kecamatan Nunukan merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Nunukan dengan infrastruktur transportasi, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan yang relatif lengkap. Wilayah ini menjadi simpul distribusi logistik dan interaksi perdagangan lintas batas.

Kecamatan Nunukan Selatan berperan sebagai wilayah penyangga pusat aktivitas ekonomi kabupaten dengan kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang. Infrastruktur dan fasilitas publik relatif lebih memadai dibanding kecamatan perbatasan terpencil.



Kecamatan Sebatik merupakan wilayah perbatasan strategis yang terletak di Pulau Sebatik dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Aktivitas ekonomi didominasi perdagangan lintas batas, perikanan, dan pertanian. Infrastruktur relatif berkembang dibanding wilayah pedalaman, namun dinamika sosial ekonomi sangat dipengaruhi interaksi antarnegara sehingga penguatan pengawasan, konektivitas, dan ekonomi lokal menjadi prioritas.

Kecamatan Sebatik Barat memiliki karakter wilayah pesisir dengan aktivitas ekonomi utama pada sektor perikanan, perdagangan, dan jasa lintas batas. Interaksi ekonomi dengan Malaysia cukup intensif, sehingga stabilitas distribusi barang dan penguatan ekonomi domestik menjadi perhatian penting dalam pembangunan kawasan ini.

Kecamatan Sebatik Timur berkembang sebagai kawasan perbatasan dengan potensi perdagangan, perikanan, dan usaha mikro. Infrastruktur dasar relatif tersedia, namun peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan usaha produktif masyarakat tetap diperlukan guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Kecamatan Sebatik Tengah memiliki peran sebagai penghubung antarwilayah di Pulau Sebatik dengan aktivitas ekonomi yang ditopang perdagangan, pertanian, dan jasa. Pembangunan diarahkan pada peningkatan konektivitas internal pulau, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Kecamatan Sebatik Utara merupakan wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki aktivitas ekonomi lintas batas yang signifikan. Potensi perdagangan dan perikanan cukup besar, namun penguatan infrastruktur perbatasan, stabilitas harga, serta pengembangan ekonomi berbasis masyarakat menjadi fokus pembangunan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. (2025). *Kecamatan Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Duka, Josafath M.R. (2021). *Optimalisasi Tugas TNI dalam Pelaksanaan Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Lain*. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Kabupaten Nunukan. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- Kementerian Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.
- Maisondra, M., & Timur, F. A. C. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(2), 210-225.
- Merlansa, B., Linggi, R. K., & Burhanudin, B. (2019). Pelayanan Publik Pas Lintas Batas (PLB) Krayan Indonesia-Ba'Kelalan Malaysia di Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7 (2), 769–780.



Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Steenbrink, P. A. (1974). Transport network optimization in the Dutch integral transportation study. *Transportation Research*, 8(1), 11-27.

Tefa, G., & Thaal, F. P. (2019). Kinerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 11-24.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**LAMP  
IR  
AN**

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**



## Lampiran 1. Kuesioner Pendataan Profil Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2025

I. IDENTITAS WILAYAH	
101	Provinsi [ ]
102	Kabupaten/Kota [ ]
103	Kecamatan [ ]

II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER		
Uraian	Enumerator	Validator
201	202	203
a. Nama		
b. Tanggal Pelaksanaan		
c. Nomor HP/WA		
d. Tanda Tangan		
204	Narasumber	
	Nama	Jabatan
1.		....., 2025
2.		Mengetahui
3.		Camat
4.		(.....)
5.		(.....)

III. KETERANGAN UMUM KECAMATAN	
301	Luas wilayah kecamatan : ..... km <sup>2</sup>
302	Kecamatan ditetapkan sebagai Kecamatan Pesisir <i>Ya - I Tidak - 2</i>
303	a. Keberadaan permukiman di atas permukaan air laut <i>Ya - I Tidak - 2</i>
	b. Keberadaan permukiman di atas permukaan air sungai/danau <i>Ya - I Tidak - 2</i>

**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**  
Alamat : Jln. Sei. Jepun Seodup, Kompleks Kantor Bupati Nunukan  
E-mail: [badanperbatasannmk@gmail.com](mailto:badanperbatasannmk@gmail.com)  
NUNUKAN 77482

**KUESIONER PENDATAAN**  
**PUSAT INFORMASI DATA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2025**

**PENGANTAR**

Pendataan Pusat Informasi Data Kawasan Perbatasan 2025 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dengan tujuan untuk membangun basis data terkait kecamatan dan desa di kawasan perbatasan yang akurat dan terkoneksi sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan untuk memajukan potensi kecamatan dan desa kawasan perbatasan.

**DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, dan ruang udara Indonesia, termasuk penetapan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga;
- Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Terkecil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2022;
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Bupati Nunukan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025.



IV. TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR	
401	Sumber listrik di kecamatan a. Jumlah desa dengan mayoritas sumber listrik PLN b. Jumlah desa dengan mayoritas sumber listrik Non-PLN c. Jumlah desa dengan mayoritas sumber listrik lainnya (sebutkan) ..... d. Jumlah desa tidak ada listrik sama sekali Transportasi antar desa/kelurahan atau ke kecamatan lain dapat melalui darat Ya - 1 Tidak - 2 → 414 403 a. Keberadaan terminal penumpang Ada - 1 Tidak ada - 2 → 404 b. Jumlah terminal penumpang 404 a. Keberadaan terminal barang Ada - 1 Tidak ada - 2 → 405 b. Jumlah terminal barang 405 a. Ketersediaan angkutan umum Ada - 1 Tidak ada - 2 → 406 b. Rute angkutan umum 1. 2. 3. 4. 5. 406 Moda transportasi yang digunakan antar desa/kelurahan Jalan kaki - 1 Sepeda motor - 2 Mobil - 3 407 Moda transportasi yang digunakan ke kecamatan lain Jalan kaki - 1 Sepeda motor - 2 Mobil - 3 408 Kelangkaan BBM dalam setahun terakhir Tidak pernah - 1 Sebulan terakhir - 2 1 - 3 bulan terakhir - 3 Lebih dari 3 bulan yang lalu - 4
409	Persentase pasokan BBM yang dari Indonesia < 50 % - 1 50 - 75 % - 2 > 75 % - 3
410	Persentase kendaraan yang dari Indonesia < 50 % - 1 50 - 75 % - 2 > 75 % - 3
411	Keberadaan akses menuju negara lain melalui darat Ada, jalur resmi - 1 Ada, jalur tidak resmi - 2 Tidak ada - 3
412	Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas Aspal/beton - 1 Diperkeras (kerikil, batu, dll.) - 2 Tanahnya - 3 Lainnya (tuliskan) ..... - 4
413	Keberadaan penerangan jalan utama Ada, listrik PLN - 1 Ada, listrik non-PLN - 2 Tidak ada - 3
414	Transportasi ke/dari kecamatan lain atau ke/dari kabupaten lain dapat melalui udara Ya - 1 Tidak - 2 → 424
415	Jumlah bandara/lapangan terbang di kecamatan
416	Jenis landasan Aspal - 1 Beton - 2 Tanah - 3 Rumpuk - 4
417	Aksesibilitas mayoritas desa menuju bandara/lapangan terbang terdekat Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sangat sulit - 3
418	Frekuensi penerbangan yang tersedia ke/dari kecamatan ini dalam 1 minggu (kali per minggu) Dari frekuensi penerbangan tersebut, seberapa sering kursi penuh / tidak dapat tiket Hampir tidak pernah penuh - 1 Kadang penuh (< 50 %) - 2 Sering penuh (50 - 75 %) - 3 Hampir selalu penuh (> 75 %) - 4
420	Jumlah penerbangan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat jumlah penerbangan lebih banyak dari kebutuhan - 1 jumlah penerbangan cukup sesuai - 2 jumlah penerbangan kurang dari kebutuhan - 3
421	Frekuensi penerbangan yang ideal (kali per minggu)
422	Keberadaan akses menuju negara lain melalui udara Ada, jalur resmi - 1 Ada, jalur tidak resmi - 2 Tidak ada - 3



V. PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA			
501	Komoditas yang berasal dari negara lain	Dari negara lain	
		Ada - 1	Tidak ada - 2
Jenis komoditas		Persentase dari negara lain (%)	
	a. Sembako		
	b. LPG		
	c. BBM		
	d. Alat transportasi		
	e. Hasil pertanian		
	f. Pakaian		
	g. Bahan bangunan		
	h. Lainnya (tuliskan) .....		
502	Usaha/perorangan yang menjual barang ke negara lain		
	a. Sembako	Ada - 1	Tidak ada - 2
	b. LPG		
	c. BBM		
	d. Alat transportasi		
	e. Hasil pertanian		
	f. Pakaian		
	g. Bahan bangunan		
	h. Lainnya (tuliskan) .....		
503	Penggunaan mata uang rupiah dalam perdagangan		
	< 50 %	- 1	50 - 75 % - 2
	> 75 %	- 3	
504	Persentase sumber pasokan barang dalam perdagangan di kecamatan ini (persen)		
	a. Lokal		
	b. Kecamatan lain		
	c. Kabupaten lain		
	d. Negara lain		

423	a. Komoditas yang paling banyak diangkut dari kecamatan ini	
423	b. Komoditas yang paling banyak diangkut ke kecamatan ini	
424	Transportasi antar desa/keurahan atau ke kecamatan lain dapat melalui air	Ya - 1 Tidak - 2 → 501
425	a. Keberadaan pelabuhan/dermaga penumpang	Ada - 1 Tidak ada - 2 → 426
425	b. Jumlah pelabuhan/dermaga penumpang	
426	a. Keberadaan pelabuhan/dermaga barang	Ada - 1 Tidak ada - 2 → 427
426	b. Jumlah pelabuhan/dermaga barang	
427	a. Ketersediaan angkutan umum	Ada - 1 Tidak ada - 2 → 428
427	b. Rute angkutan umum	1. 2. 3. 4. 5.
428	Kelangkaan BBM dalam setahun terakhir Tidak pernah - 1 1 - 3 bulan terakhir - 3 Lebih dari 3 bulan yang lalu - 4	- 2
429	Persentase pasokan BBM yang dari Indonesia < 50 % - 1 50 - 75 % - 2 > 75 % - 3	- 3
430	Keberadaan akses menuju negara lain melalui air Ada, jalur resmi - 1 Ada, jalur tidak resmi - 2 Tidak ada - 3	- 3



507	Komoditas unggulan di kecamatan	
<b>VI. PARIWISATA</b>		
601	Keberadaan Obyek Daya Tarik Wisata di wilayah kecamatan <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → 701</i>	
602	Sebutkan Obyek Daya Tarik Wisata di wilayah kecamatan	
603	a. Event yang diadakan dalam setahun terakhir <i>Ada - 1 Tidak ada - 2 → 605</i> b. Event yang melibatkan negara lain dalam setahun terakhir <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	
604	Jumlah WNA yang mengunjungi tempat wisata dalam setahun terakhir <i>Tidak ada - 1</i> <i>1 - 20 orang - 2</i> <i>20 - 50 orang - 3</i> <i>&gt; 50 orang - 4</i>	
605	Dukungan yang diharapkan dari pemerintah <i>Kebijakan - 1</i> <i>Promosi - 2</i> <i>Modal - 3</i> <i>Pengembangan SDM - 4</i> <i>Infrastruktur pendukung - 5</i> <i>Lainnya (sebutkan) ..... - 6</i>	

505	Ketertarikan masyarakat terhadap barang/jasa dari negara lain? <i>Tidak tergantung - 1</i> <i>Cukup tergantung - 2</i> <i>Sangat tergantung - 3</i>	Jika tidak ada, untuk mencapai sarana ekonomi terdekat	
		Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai
506	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di kecamatan	Jumlah	
	Jenis sarana dan prasarana	(1)	(2)
		(3)	(4)
	a. Kelompok per tokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokast)		
	b. Pasar dengan bangunan permanen		
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen		
	d. Pasar tanpa bangunan		
	e. Jumlah minimarket/swalayan/supermarket		
	f. Restoran/rumah makan		
	g. Warung/kecil makanan minuman		
	h. Hotel		
	i. Penginapan: hostel/note/losmen/wisma		
	j. Toko/warung kelontong		



VIII. KESEHATAN						
801	Keberadaan sarana kesehatan di kecamatan	Saran kesehatan	Jumlah	Jika tidak ada, untuk mencapai sarana kesehatan terdekat		Seluruh desa dapat mengakses sarana kesehatan Ya - 1 Tidak - 2
				Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan terdekat Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	Rumah sakit					
b.	Rumah sakit bersalin					
c.	Puskemas dengan rawat inap					
d.	Puskemas tanpa rawat inap					
e.	Puskemas pembantu					
f.	Poliklinik/balai pengobatan					
g.	Tempat praktik dokter					
h.	Rumah bersalin					
i.	Tempat praktik bidan					
j.	Poskesdes (pos kesehatan desa)					
k.	Polimedes (pondok bersalin desa)					
l.	Apotek					
m.	Toko khusus obat/jamu					

VII. PENDIDIKAN						
701	Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di kecamatan	Jenis/jenjang pendidikan	Jumlah	Jika tidak ada, untuk mencapai sarana pendidikan terdekat		Seluruh desa dapat mengakses sarana pendidikan Ya - 1 Tidak - 2
				Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan terdekat Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	PAUD					
b.	TK					
c.	RA/BA					
d.	SD					
e.	MI					
f.	SMP					
g.	MTs					
h.	SMA					
i.	MA					
j.	SMK					
k.	Perguruan Tinggi					
702	Ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan					Ada - 1 Tidak ada - 2
a.	Lisrik					
b.	Air					
c.	Internet					
703	Dengan kemudahan akses pekerjaan di luar negeri, adakah kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih bekerja dibanding sekolah (wajib belajar 13 tahun)					Tidak ada - 1 Ada, sebagian kecil - 2 Ada, sebagian besar - 3

802	Ketersediaan fasilitas pendukung kesehatan	<i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>
	a. Listrik	
	b. Air	
	c. Internet	
803	Jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat	<i>Lebih - 1 Cukup - 2 Kurang - 3</i>
804	Masyarakat yang berobat ke luar negeri dalam setahun terakhir	<i>Tidak ada - 1 Ada, sedikit - 2 Ada, banyak - 3</i>

IX. INDUSTRI PENGOLAHAN			
805	Keberadaan industri pengolahan menurut jenis industri di kecamatan	Jumlah tenaga kerja terbanyak tiap industri	
Jenis industri	Komoditas	Target Pasar Lokal	Kecamatan lain
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Tanaman Pangan		- 1	- 1
b. Tanaman Hortikultura		- 2	- 2
c. Tanaman Perkebunan		- 3	- 3
d. Peternakan		- 4	- 4
e. Jasa Pertanian dan Perburuan			

f. Hasil Kehutanan Kayu	-	
g. Hasil Kehutanan Non Kayu	-	
h. Perikanan Tangkap Laut		
i. Perikanan Budidaya Laut		
j. Perikanan Tangkap Darat		
k. Perikanan Budidaya Darat		
l. Jasa Kelautan		

X. CATATAN	
Permasalahan Kecamatan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	



**PEMERINTAHAN KABUPATEN NUNUKAN  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

*BIDANG  
EVALUASI DAN  
MONITORING  
WILAYAH  
PERBATASAN*

**PROFIL KECAMATAN KAWASAN  
PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**